



Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)



Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

TAHUN ANGGARAN 2022

Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasaNya, dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Tahun 2023-2027 Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan.

Pemutakhiran dokumen SSK diperlukan dalam rangka pembaruan data serta perbaikan pada metode penyusunan SSK agar kualitas dokumen SSK sesuai dan dapat diimplementasikan lebih efisien dari dokumen sebelumnya. Maka untuk selanjutnya, Pemutakhiran SSK Kabupaten Mojokerto digunakan pada periode 2023-2027.

Dokumen ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya yang terkait sektor sanitasi. Pada dokumen ini disajikan bab pendahuluan, profil sanitasi saat ini, kerangka pengembangan sanitasi, strategi pengembangan sanitasi, Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi, serta Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Laporan Akhir ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang telah membaca laporan ini.

Akhir kata, Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan berbagai pihak dalam penyusunan dokumen ini. Berkat kerjasama dan dukungan seluruh pihak terkait laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan arahan bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Mojokerto di masa mendatang.

Mojokerto, November 2022
Bupati Mojokerto

dr. Ikfina Fahmawati, M.Si.

Daftar Isi



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I – PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1 Peran SSK dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Mojokerto	I-1
1.1.2 Pentingnya memiliki dokumen strategi sanitasi yang berkelanjutan	I-2
1.1.3 Hubungan SSK yang telah disusun dengan SSK yang akan dimutakhirkan	I-2
1.2 METODE PENYUSUNAN	I-5
1.3 DASAR HUKUM	I-6
1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	I-8
BAB II – PROFIL SANITASI SAAT INI	II-1
2.1 GAMBARAN WILAYAH	II-1
2.1.1 Kebijakan Pembangunan	II-6
2.1.2 Rencana Struktur Ruang	II-9
2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI	II-14
2.2.1 Profil Sektor Air Limbah Domestik	II-14
2.2.2 Profil Pengelolaan Persampahan	II-35
2.2.3 Profil Drainase Lingkungan	II-76
2.3 Area Beresiko dan Permasalahan Sanitasi	II-82
2.4.1 Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik	II-82
2.4.2 Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan	II-85
2.4.3 Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan	II-88
BAB III – KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	III-1
3.1 VISI DAN MISI SANITASI	III-1
3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI	III-4
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi	III-4
3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi	III-7
3.2.3 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik	III-7
3.2.4 Tahapan Pengembangan Persampahan	III-10
3.2.5 Tahapan Pengembangan Drainase Lingkungan	III-13
3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH	III-16

BAB IV – STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI.....	IV-1
4.1 STRATEGI AIR LIMBAH DOMESTIK.....	IV-3
4.2 STRATEGI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	IV-13
4.3 STRATEGI DRAINASE LINGKUNGAN	IV-20
BAB V – PROGRAM, KEGIATAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	V-1
5.1 RINGKASAN PROGRAM KEGIATAN.....	V-1
5.2 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH	V-2
5.3 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH.....	V-4
5.4 ANTISIPASI FUNDING GAP	V-5
BAB VI – MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	VI-1
6.1 GAMBARAN UMUM STRUKTUR MONITORING DAN EVALUASI SANITASI.....	VI-1
6.1.1 Air Limbah Domestik	VI-1
6.1.2 Persampahan	VI-7
6.1.3 Drainase Lingkungan	VI-13

Daftar Tabel



Tabel 1.1	Perbandingan Target SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan Eksisting Tahun 2022	I-1
Tabel 2. 1	Jumlah Desa dan Luas Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	II-1
Tabel 2. 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2021	II-2
Tabel 2. 3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dan 2021 ...	II-3
Tabel 2. 4	Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Klasifikasi Perdesaan dan Perkotaan	II-4
Tabel 2. 5	Capaian Akses Air Limbah Domestik	II-15
Tabel 2. 6	Dokumentasi Sarana IPLT Kabupaten Mojokerto	II-16
Tabel 2. 7	Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat.....	II-19
Tabel 2. 8	Foto Sarana IPAL dan MCK Komunal	II-20
Tabel 2. 9	Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan Target RPJMN 2020-2024	II-26
Tabel 2. 10	Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat.....	II-30
Tabel 2. 11	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah	II-31
Tabel 2. 12	Data Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	II-33
Tabel 2. 13	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	II-34
Tabel 2. 14	Tabel Timbulan Sampah Perkotaan	II-36
Tabel 2. 15	Tabel Timbulan Sampah Perdesaan.....	II-37
Tabel 2. 16	Tabel Jumlah Sampah Masuk pada Setiap Infrastruktur Persampahan.....	II-41
Tabel 2. 17	Tahapan Pengelolaan Sampah pada Masing-masing Infrastruktur	II-44
Tabel 2. 18	Bank Sampah di Kabupaten Mojokerto	II-47
Tabel 2. 19	Rekapitulasi Jumlah Bank Sampah dan Sampah yang Terkelola	II-59
Tabel 2. 20	Persentase Capaian dan Target Yang Ditetapkan Dalam RPJMN.....	II-69
Tabel 2. 21	Persentase Capaian dan Target Yang Ditetapkan Dalam RPJMD.....	II-70
Tabel 2. 22	Persentase Capaian dan Target Yang Ditetapkan Dalam RPJMD.....	II-70
Tabel 2. 23	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	II-72
Tabel 2. 24	Kelembagaan Pengelola Infrastruktur Persampahan	II-73
Tabel 2. 25	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	II-74
Tabel 2. 26	Luas dan Lokasi Genangan Kabupaten Mojokerto	II-76
Tabel 2. 27	Panjang Saluran Drainase Sekunder Eksisting Berdasarkan Fungsi dan Perkerasan	II-79
Tabel 2. 28	Panjang Saluran Drainase Sekunder Berdasarkan Kondisinya.....	II-80
Tabel 2. 29	Area Berisiko Air Limbah Domestik	II-82
Tabel 2. 30	Permasalahan Mendesak Sektor Air Limbah	II-84
Tabel 2. 31	Area Berisiko Persampahan	II-85
Tabel 2. 32	Permasalahan Mendesak Sektor Persampahan	II-87
Tabel 2. 33	Area Berisiko Drainase	II-88
Tabel 2. 34	Permasalahan Mendesak Sektor Drainase Lingkungan.....	II-90
Tabel 3. 1	Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Mojokerto	III-1
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto.....	III-4
Tabel 3. 3	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Kab Mojokerto	III-5

Tabel 3. 4	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase Lingkungan Kab Mojokerto	III-5
Tabel 3. 5	Target Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto	III-8
Tabel 3. 6	Target Pengelolaan Persampahan Perkotaan Kabupaten Mojokerto	III-11
Tabel 3. 7	Target Pengelolaan Drainase Lingkungan Kabupaten Mojokerto	III-14
Tabel 3. 8	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Mojokerto untuk Sanitasi	III-17
Tabel 3. 9	Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan	III-17
Tabel 3. 10	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Mojokerto untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi	III-18
Tabel 3. 11	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Mojokerto untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2027	III-18
Tabel 3. 12	Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Mojokerto dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK	III-19
Tabel 4. 1	Matriks Kerangka Kerja Logis Air Limbah Domestik	IV-7
Tabel 4. 2	Matriks Kerangka Kerja Logis Persampahan	IV-15
Tabel 4. 3	Matriks Kerangka Kerja Logis Drainase Lingkungan	IV-21
Tabel 5. 1	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun (x Rp. 1 juta)	V-1
Tabel 5. 2	Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 Tahun (x Rp. 1 juta)	V-2
Tabel 5. 3	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran (x Rp. 1 juta)	V-2
Tabel 5. 4	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota	V-3
Tabel 5. 5	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi (x Rp. 1 juta)	V-3
Tabel 5. 6	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN (x Rp. 1 juta)	V-3
Tabel 5. 7	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK (x Rp. 1 juta)	V-3
Tabel 5. 8	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR (x Rp. 1 juta)	V-4
Tabel 5. 9	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat (x Rp. 1 juta)	V-4
Tabel 6. 1	Capaian Strategis Sektor Air Limbah 1	VI-2
Tabel 6. 2	Capaian Strategis Sektor Air Limbah 2	VI-3
Tabel 6. 3	Capaian Strategis Sektor Air Limbah 3	VI-4
Tabel 6. 4	Capaian Strategis Sektor Air Limbah 4	VI-5
Tabel 6. 5	Capaian Strategis Sektor Air Limbah 5	VI-5
Tabel 6. 6	Capaian Strategis Sektor Air Limbah 6	VI-6
Tabel 6. 7	Capaian Strategis Sektor Air Limbah 7	VI-6
Tabel 6. 8	Capaian Strategis Sektor Persampahan 1	VI-7
Tabel 6. 9	Capaian Strategis Sektor Persampahan 2	VI-10
Tabel 6. 10	Capaian Strategis Sektor Persampahan 3	VI-10
Tabel 6. 11	Capaian Strategis Sektor Persampahan 4	VI-11
Tabel 6. 12	Capaian Strategis Sektor Persampahan 5	VI-12
Tabel 6. 13	Capaian Strategis Sektor Persampahan 6	VI-12
Tabel 6. 14	Capaian Strategis Sektor Persampahan 7	VI-13
Tabel 6. 15	Capaian Strategis Sektor Drainase 1	VI-13
Tabel 6. 16	Capaian Strategis Sektor Drainase 2	VI-14
Tabel 6. 17	Capaian Strategis Sektor Drainase 3	VI-14
Tabel 6. 18	Capaian Strategis Sektor Drainase 4	VI-15

Daftar Gambar



Gambar 1. 1	Kedudukan Dokumen SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
Gambar 1. 2	Proses Pengolahan Data Dengan Instrumen SSK	I-6
Gambar 2. 1	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2015-2020	II-2
Gambar 2. 2	Peta Administrasi Kabupaten Mojokerto	II-5
Gambar 2. 3	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mojokerto	II-10
Gambar 2. 4	Diagram Rencana Guna Lahan Kabupaten Mojokerto	II-11
Gambar 2. 5	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mojokerto	II-13
Gambar 2. 6	Analisis Rantai Layanan Sanitasi Kabupaten Mojokerto	II-28
Gambar 2. 7	Peta Cakupan Layanan Sarana IPAL & MCK Komunal Kabupaten	II-29
Gambar 2. 8	Skema Tahapan Penanganan Sampah Kabupaten Mojokerto	II-39
Gambar 2. 9	Rantai Layanan Sampah di Wilayah Kabupaten Mojokerto	II-40
Gambar 2. 10	Sarana Prasarana Pengangkutan Sampah.....	II-42
Gambar 2. 11	Sarana Penampungan Sampah.....	II-43
Gambar 2. 12	Diagram Pengolahan Akhir	II-66
Gambar 2. 13	Peta Cakupan Pelayanan Infrastruktur Persampahan Kab Mojokerto.....	II-68
Gambar 2. 14	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	II-71
Gambar 2. 15	Struktur Organisasi Kelembagaan Swadaya Masyarakat (KSM).....	II-73
Gambar 2. 16	Peta Lokasi Genangan Kabupaten Mojokerto	II-78
Gambar 2. 17	Grafik Panjang Saluran Drainase Berdasarkan Fungsi dan Perkerasannya.....	II-79
Gambar 2. 18	Grafik Panjang Saluran Drainase Berdasarkan Kondisinya	II-81
Gambar 2. 19	Peta Area Berisiko Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto	II-83
Gambar 2. 20	Peta Area Berisiko Persampahan Kabupaten Mojokerto	II-86
Gambar 2. 21	Peta IRS EHRA Drainase Lingkungan Kabupaten Mojokerto	II-89
Gambar 3. 1	Target Sanitasi Tingkat Nasional dan Provinsi.....	III-7
Gambar 3. 2	Peta Zonasi Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto.....	III-9
Gambar 3. 3	Peta Zonasi Persampahan Kabupaten Mojokerto.....	III-12
Gambar 3. 4	Peta Zonasi Drainase Lingkungan Kabupaten Mojokerto	III-15

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Peran SSK dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Mojokerto

Sektor sanitasi yang terdiri dari sistem air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu penentu kualitas Kesehatan masyarakat. Sanitasi juga berkaitan erat dengan angka stunting. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing negara. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, sementara kualitas SDM yang baik adalah suatu aset berharga suatu daerah. Sehingga, rendahnya kualitas suatu sistem sanitasi dapat menyebabkan turunnya tingkat kesehatan masyarakat,

PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh pihak dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan yang telah berjalan sejak tahun 2010. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program yang dibentuk oleh beberapa kementerian dengan satu tujuan yaitu untuk mempercepat kinerja pengadaan sanitasi di Indonesia. Program ini memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun rencana strategis pembangunan sanitasi di daerahnya.

SSK merupakan dokumen acuan bagi daerah untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Dalam periode tahun 2020-2024, fokus program PPSP dititikberatkan pada pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 Universal Access layanan sanitasi 100%, dengan menargetkan 100% kabupaten/kota di Indonesia telah menyusun SSK dan mengimplementasikannya, termasuk Kabupaten Mojokerto.

Untuk meningkatkan layanan sanitasi di Kabupaten Mojokerto, diharapkan agar kerjasama dan partisipasi dapat terjalin dengan baik agar capaian yang diinginkan dapat terlaksana. Hal ini sejalan dengan misi ke-4 RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yaitu Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan, dengan mengarusutamakan sector sanitasi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

1.1.2 Pentingnya memiliki dokumen strategi sanitasi yang berkelanjutan

Dokumen SSK juga dibutuhkan sebagai pengikat dan mengintegrasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi. Dokumen SSK yang telah disepakati akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*), yang berisi informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan pengembangan layanan sanitasi kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya serta penanggung jawabnya. Dalam hal ini, keberlanjutan dari Dokumen SSK dapat diartikan bahwa strategi-strategi yang akan tersusun dapat dilakukan secara menerus, menyesuaikan dengan dokumen yang telah disusun sebelumnya dan juga perkembangan Kabupaten Mojokerto di masa mendatang.

1.1.3 Hubungan SSK yang telah disusun dengan SSK yang akan dimutakhirkan, serta kaitannya dengan dokumen perencanaan lain (RPJMD, RTRW, dll)

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu peserta program PPSP dan telah melakukan penyusunan SSK pada tahun 2016 yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Pada SSK Kabupaten Mojokerto tahun 2016 telah ditentukan target untuk masing masing sektor, namun didapati bahwa sampai tahun 2022 belum tercapai. Berikut adalah perbandingan target sanitasi tahun 2016 dengan kondisi eksisting pada tahun 2022.

Tabel 1.1 Perbandingan Target SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan Eksisting Tahun 2022

Sektor	Target SSK 2016	Kondisi Eksisting 2022	Keterangan
Air Limbah Domestik	<ol style="list-style-type: none"> BABS 0%, pengelolaan air limbah setempat (onsite) 93,60% Sistem Komunal dan sistem pengolahan air limbah terpusat (off-site) 6,40%. 	<ol style="list-style-type: none"> BABS 2% pengelolaan air limbah setempat (onsite)/ Akses Layak 87,3% Sistem Komunal dan sistem pengolahan air limbah terpusat (off-site) 0%. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tercapai Belum tercapai Belum tercapai
Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase sampah yang terangkut sebesar 50% Persentase sampah tereduksi melalui 3R 14% Persentase sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumbernya sebesar 6% Persentase sampah tidak terkelola sebesar 30%. 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase sampah yang terangkut sebesar 16% (Studi EHRA 2022) Persentase sampah tereduksi melalui 3R 0,60% Persentase sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumbernya (Bank Sampah) sebesar 0,079% 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tercapai Belum tercapai Belum tercapai Tercapai

Sektor	Target SSK 2016	Kondisi Eksisting 2022	Keterangan
		4. Persentase sampah tidak terkelola sebesar 2,47%	
Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target penanganan luas genangan jangka pendek sebesar 1.148 ha 2. Target penanganan luas genangan jangka menengah menjadi 0 ha (bebas banjir). 	1. Luas genangan sebesar 416,35 Ha.	Belum tercapai

Sumber: SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan Hasil Survey dan Analisis 2022.

Pemutakhiran dokumen SSK diperlukan dalam rangka pembaruan data serta perbaikan pada metode penyusunan SSK agar kualitas dokumen SSK sesuai dan dapat diimplementasikan lebih efisien dari dokumen sebelumnya. Maka untuk selanjutnya, Pemutakhiran SSK Kabupaten Mojokerto digunakan pada periode 2023-2027.

Dokumen SSK yang termutakhir dapat menjadi acuan dalam pembangunan sanitasi yang sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat menjadi acuan penyusunan atau program-program pembangunan Kabupaten Mojokerto selanjutnya. Dokumen SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027 diposisikan sebagai acuan dalam perencanaan strategis sektor sanitasi skala kabupaten dan disesuaikan dengan program kegiatan sektor sanitasi dengan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti Revisi RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026, Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026 dan Renja SKPD sampai dengan tahun 2027.

a. Hubungan SSK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dokumen SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027 meruakan dokumen hasil penjabaran operasional RPJMD yang secara khusus berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi, komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini dengan visi RPJMD, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Dokumen SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027 mengakomodir rencana sektor sanitasi pada RPJMD Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2024, sesuai pula dengan RPJM Nasional, dan sampai tahun 2027 menyesuaikan dengan RPJM selanjutnya yang akan berlaku.

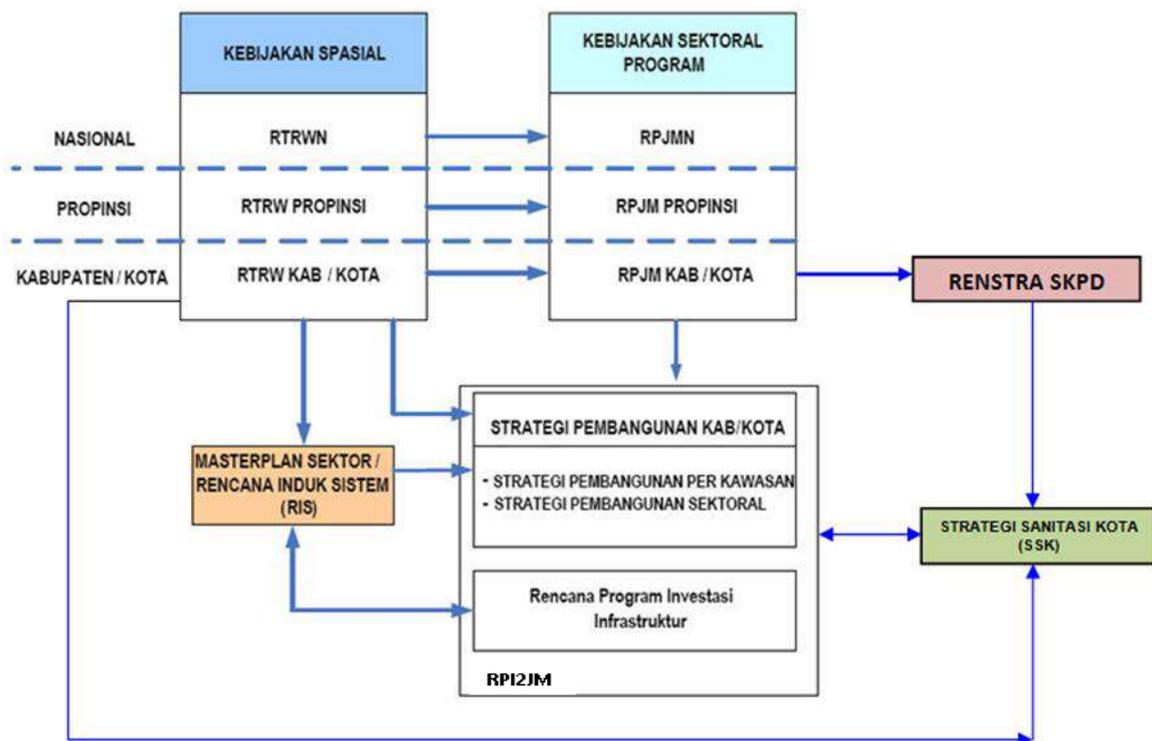
b. Hubungan SSK dengan Rencana Strategis OPD

Renstra SKPD/OPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun oleh masing-masing OPD. Strategi Sanitasi dapat diimplementasikan pada Renstra khususnya bagi OPD yang menangani sektor sanitasi sehingga program kegiatan sectoral saling

terintegrasi dan sesuai dengan sasaran sanitasi kabupaten. Pada Kabupaten Mojokerto, dokumen SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027 dapat menjadi input terhadap Renstra maupun Renja masing-masing OPD sampai dengan Tahun 2027.

c. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW dapat dijadikan input strategi dan sebaliknya, Strategi Sanitasi dapat dikolaborasikan dan diintegrasikan dengan substansi RTRW saat ini maupun dalam proses Revisi RTRW, sehingga dapat tersusun dengan sistematis apabila disandingkan dengan perencanaan sektor lainnya selain sanitasi. Pada Kabupaten Mojokerto, dokumen SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027 dapat menjadi input terhadap Revisi RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032.



Gambar 1. 1 Kedudukan Dokumen SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan tersusunnya Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto, diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan legal untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi Kabupaten Mojokerto sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, dengan adanya Pemutakhiran SSK Kabupaten Mojokerto, diharapkan dapat mempercepat implementasi terkait strategi daerah, provinsi, strategi nasional dan strategi global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030.

1.2 METODE PENYUSUNAN

Kegiatan penyusunan pemutakhiran SSK Kabupaten Mojokerto ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja

PKP) Kabupaten Mojokerto, yang terdiri dari beberapa OPD, institusi dan profesional secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi, asistensi, maupun diskusi kelompok terfokus (FGD). Penyusunan dokumen ini juga dilakukan dengan dukungan Fasilitator Provinsi Jawa Timur (PF) dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Metode dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh. Secara umum metode yang digunakan dalam penyusunan pemutakhiran SSK terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

A. Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota/ Kabupaten terdahulu dan Dokumen terkait.

Review dokumen SSK Lama dan dokumen terkait dilakukan untuk mengkaji kekurangan dan kelebihan terkait penanganan sanitasi yang telah dilakukan, serta implementasi sebelumnya. Metode yang digunakan adalah kajian data sekunder dan observasi lapangan untuk melakukan verifikasi data dan informasi.

B. Diskusi dan Konsultasi

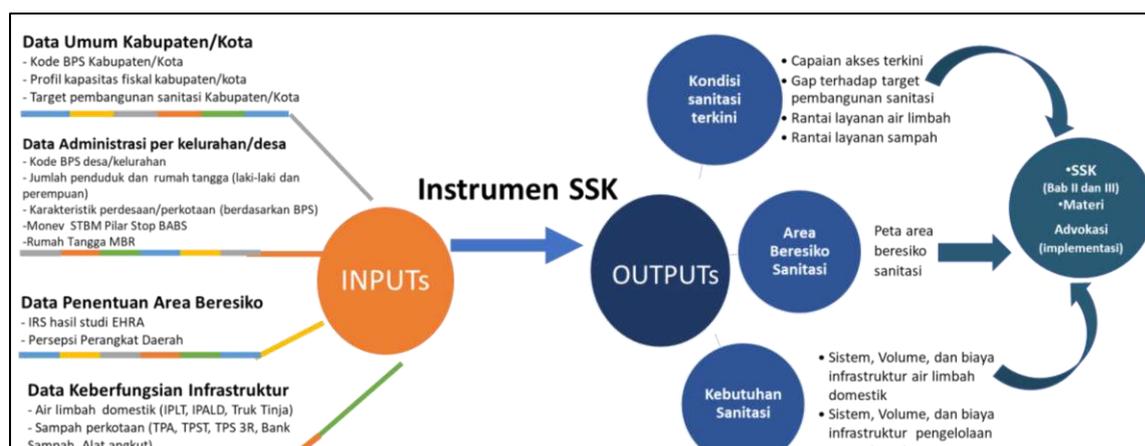
Diskusi dan konsultasi dilakukan terkait substansi dan kegiatan yang akan dilakukan dalam penyusunan SSK dengan Pokja dan Fasilitator Provinsi.

C. Perumusan Target, Visi Dan Misi dan Strategi Sanitasi

Perumusan strategi terdiri dari beberapa tahapan yang saling berpengaruh, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menyusun atau melakukan review terhadap Kajian EHRA yang masih berlaku
- 2) Melakukan pengisian Instrumen SSK, yang terdiri dari Penyusunan Profil Sanitasi Saat Ini dan Pemetaan Area Berisiko
- 3) Menyusun Visi Misi Sanitasi Kabupaten Mojokerto
- 4) Menyusun Kerangka Kerja Logis (KKL) dan Matriks Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Program Prioritas
- 5) Melakukan konsultasi kepada OPD, Pokja dan Satker terkait alokasi pemanfaatan dana

Secara teknis ,penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Mojokerto dapat digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 1. 2 Proses Pengolahan Data Dengan Instrumen SSK

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027 yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 12) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

- 14) Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 18) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- 20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- 21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 23) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik dan Baku Mutu Air Limbah
- 24) Buku Panduan Fasilitas Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2020 oleh Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi dalam Program PPSP.
- 25) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur
- 26) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur
- 27) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Pergub jatim nomor 72 tahun 2013
- 28) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

- 29) Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/198/HK416-012/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mojokerto.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam laporan ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum serta sistematika penulisan dokumen pemuktahiran SSK.

Bab II Profil Sanitasi Saat Ini

Bab ini terdiri dari gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, serta permasalahan sanitasi dan area berisiko sanitasi. Informasi tersebut mencakup:

- Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto
- Kemajuan Pelaksanaan SSK sebelumnya
- Profil Sanitasi Saat Ini, meliputi sistem air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan, cakupan layanan serta rencana pengembangan berdasarkan masterplan yang sudah tersusun.
- Area Berisiko dan prioritas permasalahan, berisi penjelasan singkat tentang pemetaan area berisiko serta permasalahan mendesak yang dihadapi.

Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, tujuan dan sasaran sanitasi, skenario pencapaian sasaran serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi

Bab ini menguraikan tentang strategi pengembangan sanitasi yang mencakup air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase perkotaan. Bab ini menggunakan instrument SWOT sebagai metodenya.

Bab V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Bab ini berisi ringkasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non-pemerintah (CSR/swasta), dan antisipasi funding gap.

Bab VI Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Bab ini menguraikan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi hasil/capaian implementasi SSK selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode implementasi tahun 2023 – 2027.

Lampiran

1. Lampiran 1 : Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian Studi EHRA
2. Lampiran 2 : Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah
3. Lampiran 3 : Peta Rencana Pengembangan Berdasarkan Rencana Induk
4. Lampiran 4 : Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK
5. Lampiran 5 : Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

BAB II

PROFIL SANITASI

SAAT INI



2.1 GAMBARAN WILAYAH

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki letak mengelilingi wilayah Kota Mojokerto. Secara geografis Kabupaten Mojokerto terletak di antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47" Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang, Kota Batu
- Sebelah Timur : Kabupaten Jombang

Secara administratif Wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 299 desa, 5 kelurahan, 1.173 dusun, 2.086 Rukun Warga (RW), dan 7.104 Rukun Tetangga (RT). Penjabaran jumlah desa/kelurahan, dusun, RW, serta RT pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Desa dan Luas Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
Jatirejo	19	32,98
Gondang	18	39,11
Pacet	20	45,16
Trawas	13	29,86
Ngoro	19	57,48
Pungging	19	48,14
Kutorejo	17	42,83
Mojosari	14	26,65
Bangsalsari	17	24,06
Mojoanyar	12	23,02

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
Dlanggu	16	35,42
Puri	16	35,65
Trowulan	16	39,20
Sooko	15	23,46
Gedek	14	22,98
Kemlagi	20	50,05
Jetis	16	57,17
Dawar blandong	18	58,93
Kabupaten Mojokerto	299	692,15

Sumber : Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

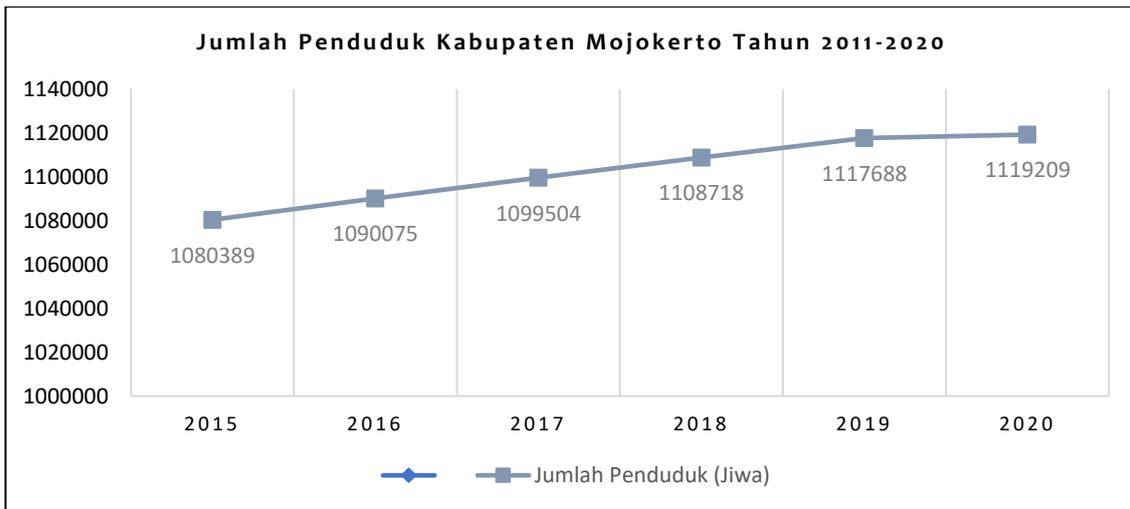
Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 692,15 km² dengan luas seluruhnya berupa daratan dikarenakan Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah berupa perairan ataupun laut. Kecamatan paling luas yang terdapat di Kabupaten Mojokerto adalah Kecamatan Dawarblandong dengan luas 58,93 km².

Penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.119.209 jiwa. Adapun komposisi penduduk Kabupaten Mojokerto didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan rincian 556.262 jiwa penduduk laki-laki dan 562.947 jiwa penduduk perempuan. Berikut merupakan penjabaran data jumlah penduduk series Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013 hingga 2021:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2021

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2015	539.613	540.776	1.080.389
2016	544.475	545.600	1.090.075
2017	549.177	550.327	1.099.504
2018	553.878	554.840	1.108.718
2019	558.375	559.313	1.117.688
2020	562.947	556.262	1.119.209

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, 2022



Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, 2022

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1 dapat diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya meningkat. Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam persen masing-masing pada tahun 2020 adalah sebesar 50,3% dan 49,7%. Berikut merupakan data distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di 18 kecamatan dan rasio jenis kelamin Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk, baik berkurang ataupun bertambah di Kabupaten Mojokerto. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan sebesar 0,96%. Adapun rincian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2020	2021	2020	2021
1.	Jatirejo	44.012	44.325	1,35	0,53
2.	Gondang	42.836	43.119	1,08	0,50
3.	Pacet	58.520	58.913	1,15	0,50
4.	Trawas	30.842	31.011	0,69	0,41
5.	Ngoro	85.109	85.431	1,26	0,28
6.	Pungging	78.788	79.258	1,09	0,45
7.	Kutorejo	66.257	66.977	1,07	0,81

No	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2020	2021	2020	2021
8.	Mojosari	77.997	78.176	0,94	0,17
9.	Bangsals	50.824	51.103	1,10	0,41
10.	Mojoanyar	50.541	50.808	0,65	0,40
11.	Dlanggu	55.352	55.733	1,14	0,52
12.	Puri	77.988	78.532	1,43	0,52
13.	Trowulan	74.409	74.829	0,90	0,42
14.	Sooko	74.874	75.278	0,88	0,40
15.	Gedek	56.490	56.708	0,43	0,29
16.	Kemlagi	57.588	58.016	0,58	0,56
17.	Jetis	85.237	86.621	0,76	0,33
18.	Dawar Blandong	50.545	50.684	0,56	0,21
Kabupaten Mojokerto		1.119.209	1.125.522	0,96	0,42

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto yang meningkat ditahun berikutnya rata-rata memiliki laju pertumbuhan penduduk 0,96% pada tahun 2020 dan 0,42% pada tahun 2021.

Berikut adalah rekapitulasi perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Mojokerto per Kecamatan.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Klasifikasi Perdesaan dan Perkotaan

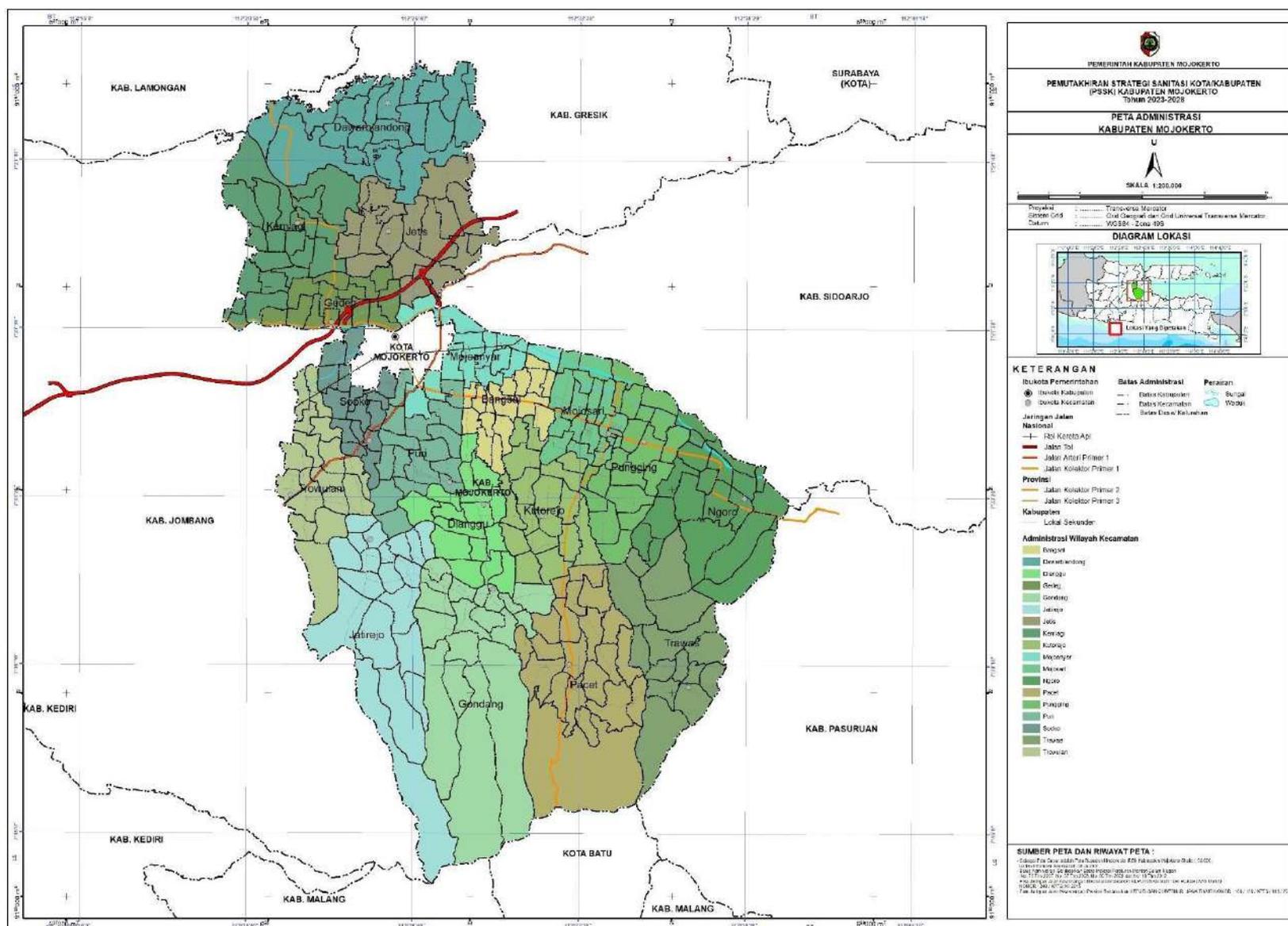
Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
JATIREJO	6	13	510,15	8105	33107	4054	16556	80,78
GONDANG	9	9	547,11	14960	27511	7483	13759	77,63
PACET	9	11	746,72	20333	37954	10170	18980	78,06
TRAWAS	6	7	550,36	8182	22246	4092	11124	55,29
NGORO	0	19	1311,45	0	82878	0	41443	63,20
PUNGGING	0	19	1203,56	0	78313	0	39162	65,07
KUTOREJO	1	16	1055,1	2380	62350	1190	31180	61,35
MOJOSARI	0	19	1069,82	0	84115	0	42060	78,63
BANGSAL	0	17	658,91	0	49710	0	24858	75,44
MOJOANYAR	0	12	561,93	0	49739	0	24873	88,51
DLANGGU	0	16	769,02	0	57395	0	28703	74,63
PURI	0	16	946,48	0	78164	0	39087	82,58
TROWULAN	0	16	926,32	0	75662	0	37835	81,68

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
SOOKO	0	15	676,36	0	75429	0	37717	111,52
GEDEK	0	14	553,55	0	56490	0	28247	102,05
KEMLAGI	1	19	702,95	2286	54268	1143	27140	80,45
JETIS	2	14	750,56	7192	80052	3597	40030	116,24
DAWAR BLANDONG	14	4	559,42	38150	12395	19077	6199	90,35

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Mojokerto, 2022.

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Mojokerto

2.1.1 Kebijakan Pembangunan

Pengembangan Kabupaten Mojokerto menurut Revisi RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 pada sektor sanitasi adalah sebagai berikut.

A. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Arahan pengelolaan Limbah meliputi:

1. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan sarana sanitasi yang Pembangunan sarana baru untuk pembuangan air limbah domestik, ditujukan bagi penduduk yang belum mempunyai sarana dan tidak mampu dari segi pendapatan.
2. Diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan promosi dan penyuluhan untuk memberikan pengertian dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah sanitasi.
3. Pengadaan sarana penunjang pengolah limbah domestik seperti truck penguras lumpur tinja dan pengolah lumpur tinja
4. Perlu adanya Pengolahan terhadap sistem pembuangan sampah
5. Rencana pengolahan limbah hasil industri di kawasan industri
6. Rencana IPAL Komunal untuk Rumah Tangga di Seluruh Kecamatan
7. Rencana pengembangan IPAL untuk industry kecil berbentuk cluster.

Rencana sistem sanitasi di Perkotaan diarahkan secara kolektif dengan sistem MCK tiap 10 – 20 Kepala keluarga. Air limbah rumah tangga disalurkan terpadu dengan limbah padat yang ditampung dalam sumur resapan, demikian juga dengan limbah industri direncanakan dengan sistem pengolahan sendiri sebelum disalurkan ke saluran drainase.

1. Sistem pembuangan air kotor/tinja

Pembuangan kotoran/tinja dilakukan dengan sistem on site dan off site. Sistem on site direncanakan untuk unit lingkungan pada tiap blok perencanaan dengan kepadatan rendah hingga sedang yang penyediaannya secara perorangan atau tiap rumah tangga. Sedangkan sistem off site direncanakan pada unit lingkungan dengan kepadatan tinggi dan sangat tinggi terutama pada kawasan pusat kota dengan cara membangun saluran khusus untuk pembuangan berupa sewerage/sistem perpipaan atau untuk pemecahan sementara dengan menggunakan sarana jenis A (MCK – 10 Keluarga).

2. Sistem penyaluran/pematusan air hujan

Rencana sistem pematusan air hujan tidak dipisahkan dengan air buangan rumah tangga (minus tinja). Saluran ini berupa saluran terbuka pada lingkungan perumahan yang jarak antar bangunannya lebih dari 3 meter dan saluran tertutup pada lingkungan perumahan dengan jarak bangunan kurang dari 3 meter.

B. Sistem Jaringan Persampahan

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Mojosari merupakan TPA eksisting yang berada di daerah kabupaten Mojokerto. TPA Multifungsi ini terletak di Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari. TPA ini telah beroperasi sejak Agustus 2008. Bidang pelayan sampah mojosari mempunyai 55 kontainer yang digunakan untuk mengangkut sampah ke TPA. Setiap hari kontainer yang beroperasi skitar setengah dari seluruh jumlah yang ada. Jadi ada 25 kontainer bisa beroperasi mengangkut sampah setiap harinya. Arah sistem persampahan meliputi:

1. Tempat pemrosesan sampah akhir (TPA) skala regional diarahkan di Kecamatan Kemlagi.
2. Rencana pengembangan TPA baru berdasarkan penanganan wilayah sebagai berikut:
 - a. Wilayah utara berada di Kecamatan Kemlagi
 - b. Wilayah barat berada di Kecamatan Jatirejo
 - c. Wilayah timur berada di Kecamatan Kutorejo
 - d. Wilayah selatan berada di Kecamatan Pacet
3. penataan prasarana dan sarana penunjang sistem sanitary landfill TPA Mojosari di Kecamatan Mojosari.
4. Pengembangan TPS secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada pusat-pusat perkotaan.
5. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kecamatan Mojosari.
6. Rencana pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan komposting.
7. Pengaturan jam dan jalur truk pengangkut sampah dari TPS ke TPA sehingga dapat dilakukan pembuangan secara rutin setiap harinya.
8. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga menggunakan sistem pengomposan sampah untuk sampah organik dan pengolahan daur ulang untuk sampah non organik. Untuk mengatasi masalah persampahan terutama bagi wilayah perkotaan dapat ditempuh melalui:
 1. Kerjasama antar wilayah/kecamatan secara saling menguntungkan, baik bagi wilayah/kecamatan yang memiliki TPA atau TPS maupun bagi pihak pembuang sampah.
 2. Penyediaan TPS atau TPA di wilayahnya sendiri dalam satu kecamatan dengan syarat tanah peruntukan ada dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitarnya.
 3. Kerjasama dengan wilayah lain dalam pemanfaatan TPA dan tidak saling merugikan.

Sedangkan Pengembangan Kabupaten Mojokerto menurut RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** yang dibantu perwujudannya dengan misi sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Misi 1 RPJMD Kabupaten Mojokerto memiliki tujuan yaitu terwujudnya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan

2. Misi 2: Membangun kemandirian ekonomi yg berdimensi kerakyatan

Misi 2 memiliki tujuan yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

Misi 3 memiliki tujuan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan & optimalisasi penerimaan PAD mll peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah

4. Misi 4: Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Misi 4 memiliki tujuan yaitu Terwujudnya pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Misi 4 memiliki sasaran salah satunya yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan strategi meminimalisasi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh, sasaran selanjutnya yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan strategi penataan sarana dan prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Misi 4 juga memiliki sasaran pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum dan bangunan gedung dengan strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi.

2.1.1 Rencana Struktur dan Pola Ruang

A. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mojokerto

Sistem perkotaan di Kabupaten Mojokerto mengatur : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal "Promosi" (PKLp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Sistem perkotaan di Kabupaten Mojokerto direncanakan membentuk berhirarki sesuai ukuran perkotaan yang disebutkan dalam Pusat Kegiatan. Perkembangan perkotaan di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat dipengaruhi oleh perkembangan Kota Mojokerto. Hasil analisa sistem perkotaan yang ada di Kabupaten Mojokerto diketahui bahwa dalam sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3 (tiga) Pusat Kegiatan yaitu;

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

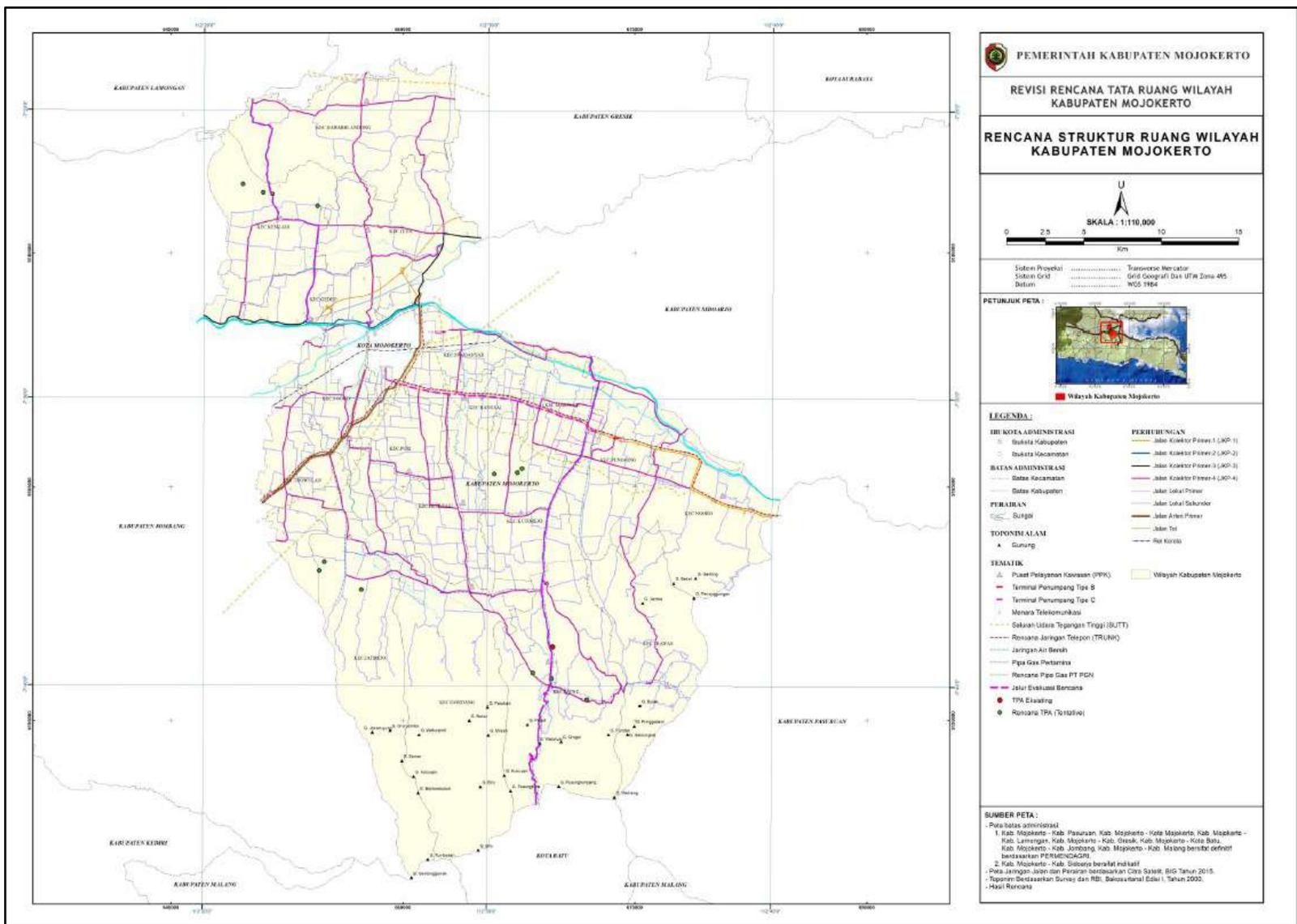
Kebijakan RTRWP Jawa Timur mengarahkan Kota Mojokerto sebagai kota yang termasuk dalam kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila Plus dan sebagai pusat pelayanan dari Kabupaten Mojokerto.

Perkotaan Kecamatan Gedeg, Sooko, Mojosari dan Pacet dikondisikan untuk dapat melayani beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya. Kawasan perkotaan Bangsal memiliki lokasi yang relatif strategis karena terletak pada jalur regional sehingga perkotaan ini diarahkan sebagai pusat pelayanan dari wilayah Kabupaten Mojokerto.

Kota – Perkotaan lain yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang perkembangan Kabupaten Mojokerto dan pengembangan kegiatan industri maupun pertanian dikondisikan sebagai kota Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Mojokerto terdiri dari

- PKL berada di perkotaan Mojoanyar
- PPK Utama berada di perkotaan Bangsal, Gedeg, Sooko, Mojosari, dan Pacet
- PPK lainnya terdapat di Perkotaan Dawarblandong, Perkotaan Kemlagi, Perkotaan Jetis, Perkotaan Puri, Perkotaan Pungging, Perkotaan Dlangu, Perkotaan Kutorejo, Perkotaan Ngoro, Perkotaan Trawas, Perkotaan Pacet, Perkotaan Gondang, Perkotaan Jatirejo dan Perkotaan Trowulan.
- PPL berada di 18 kecamatan.

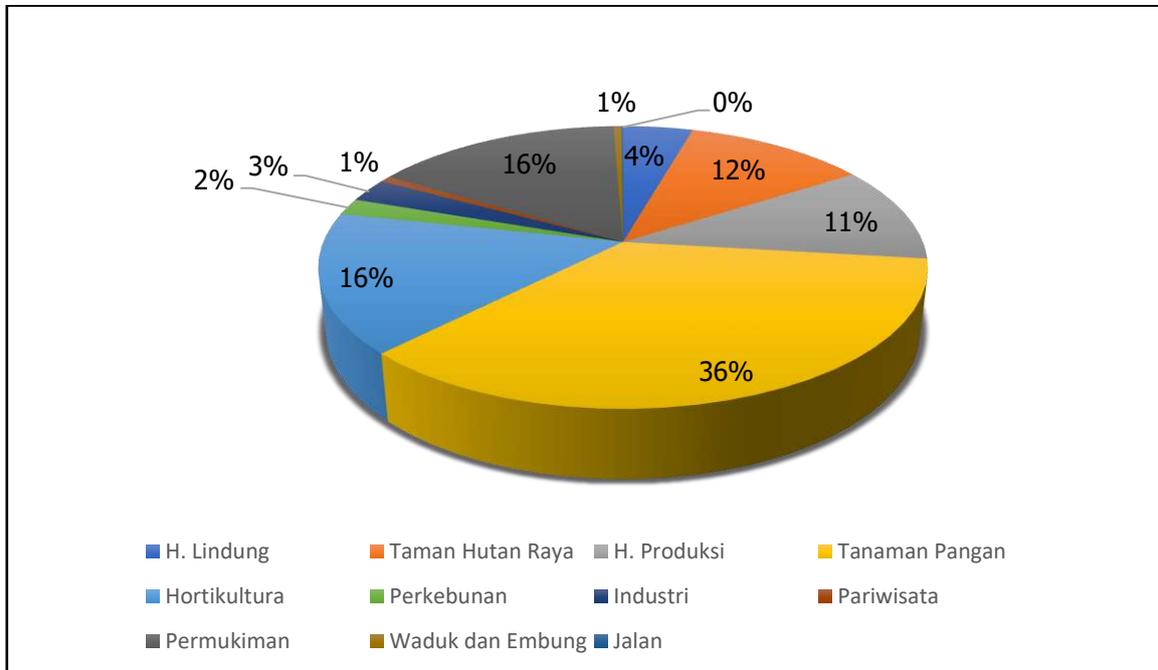
Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mojokerto
 Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032

B. Rencana Pola Ruang Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan rencana pola ruang di Wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas mencapai 97.519,97 Hektar terdiri dari rencana kawasan lindung dengan luas 15.467,97 hektar (16 %) dan rencana kawasan budidaya dengan luas 82.052 hektar (84 %).



Gambar 2. 4 Diagram Rencana Guna Lahan Kabupaten Mojokerto

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Kabupaten Mojokerto terdiri dari:

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan bawahannya (Resapan Air)
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Sempadan Sungai
- Kawasan Sekitar Danau/Waduk dan Embung
- Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Pelestarian Alam
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Imbuhan Air Tanah
- Kawasan Sempadan Mata Air
- Kawasan Rawan Bencana Alam
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung Lainnya

2) Kawasan Budidaya

- Kawasan Permukiman Perkotaan

Sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok yakni permukiman perkotaan menengah, permukiman perkotaan kecil, permukiman di kawasan industri, permukiman dikawasan pariwisata, permukiman di kawasan pengembangan kota baru, dan permukiman kawasan khusus. Wilayah perkotaan di Kabupaten Mojokerto memiliki pusat pelayanan terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Sooko, Gedeg dan Mojosari. Orientasi pergerakan penduduk cenderung mengarah ke pusat kota di mana pada wilayah ini terdapat fasilitas pendukung yang lengkap.

Permukiman perkotaan menengah, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan PKL Promosi. Pengembangan permukiman tersebut dapat dikembangkan di Perkotaan Sooko, Gedeg, Mojosari dan Pacet. Dengan berkembangnya kawasan permukiman tersebut akan membentuk pusat pertumbuhan skala wilayah/regional.

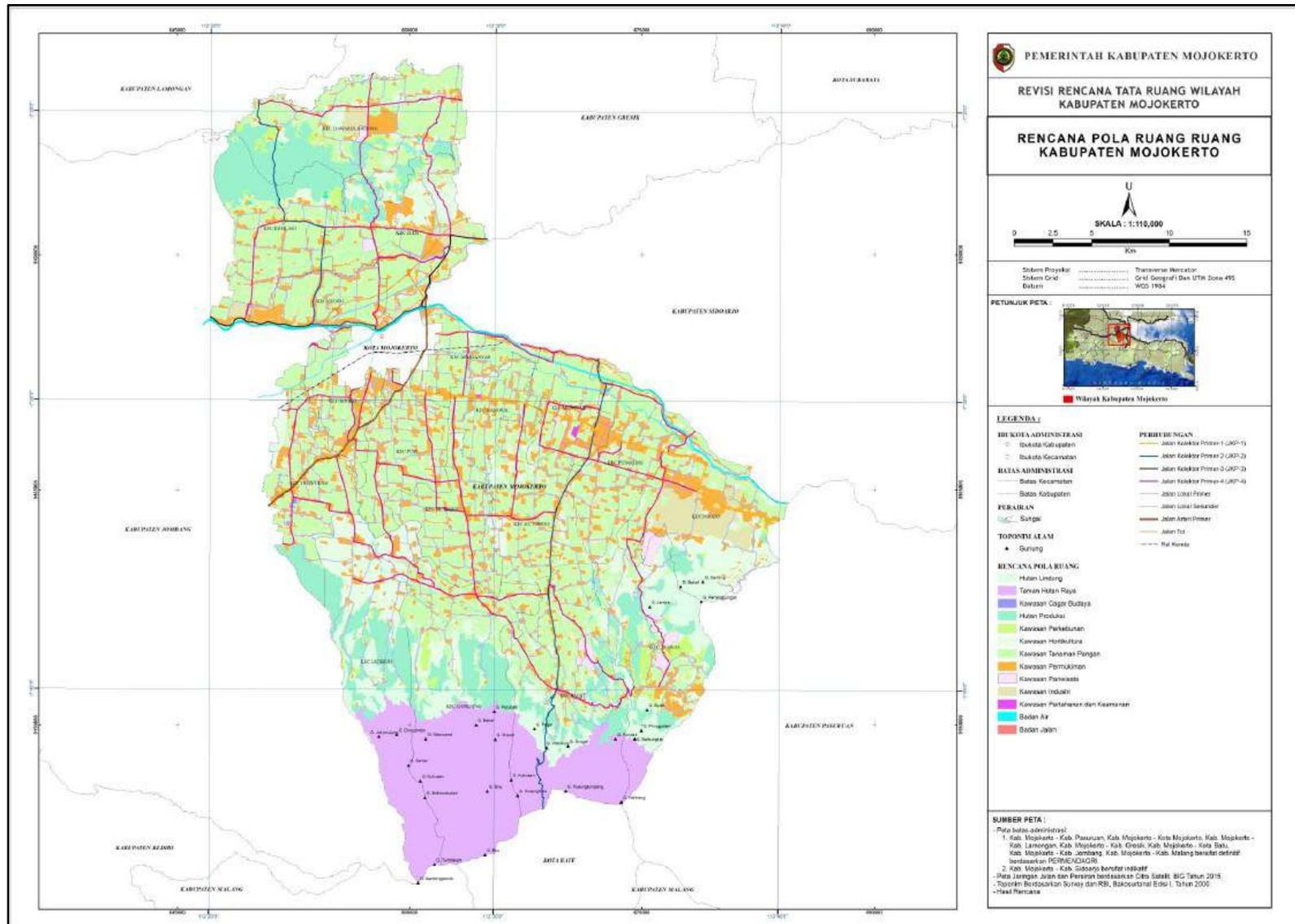
Pada kawasan perkotaan ini dimungkinkan untuk diarahkan pengembangan Rusunawa, terutama pada kawasan perkotaan Mojosari, Gedeg, Jetis dan Sooko, dimana diprediksi selama 20 tahun kedepan akan terjadi perubahan dalam perkembangan jalan Tol, dan kawasan industri sehingga sangat dimungkinkan terjadi penambahan kebutuhan akan hunian. Permukiman perkotaan kecil, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan. Perkembangan permukiman perkotaan kecil terdapat di Ngoro, Mojoanyar, Jetis, Puri, Trowulan, Kemlagi, Pungging. Perkembangan permukiman perkotaan kecil ini perlu dibatasi terutama bagi kecamatan yang memiliki lahan dengan tingkat produktifitas lahan tinggi.

- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kriteria kawasan ini adalah pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada, menghindari sawah irigasi, memperhatikan kebutuhan perumahan, penduduk perdesaan untuk masa yang akan datang dengan usahanya dan memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas.

Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto mengikuti sumber produksi masyarakat setempat. Status kawasan permukiman desa adalah desa rural atau desa yang memiliki karakter atau ciri pedesaan dan pertanian yang masih kuat.

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mojokerto
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032

2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI

2.2.1 Profil Sektor Air Limbah Domestik

(1) Sistem dan Infrastruktur Air Limbah Domestik

Penanganan air limbah Kab. Mojokerto di dominasi dengan penanganan sistem setempat (onsite sistem) yaitu penanganan air limbah di lokasi setempat untuk melayani perorangan atau sekelompok warga yang dikelola oleh warga setempat dengan penggunaan teknologi tepat guna/sederhana berupa septic tank. Pengadaan septic tank di masyarakat dilakukan sendiri dan bagi yang tidak mampu dibantu oleh Pemda lewat bantuan langsung yang ditangani oleh Dinkes dan DPUPR juga lewat Program Pemberdayaan seperti PNPM Perkotaan/Perdesaan, Sanimas, USRI, SLBM dan lain sebagainya.

A. Capaian Akses Air Limbah Domestik

Capaian dalam akses air limbah domestik dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Pada pembagian wilayah ini diklasifikasikan kondisi akses pada sanitasi yang dikelola pada wilayah tersebut.

- a. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).
- b. Akses Layak Individu adalah:
 - i. apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik;
 - ii. untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.
- c. Akses Layak Bersama adalah:
 - i. apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD;
 - ii. khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.
- d. Akses Belum Layak adalah

- i. apabila rumah tangga di perkotaan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa dan bangunan bawah lubang tanah;
 - ii. apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, dimana bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup, dan cubluk/ cemplung, dengan bangunan bawahnya tangki septik/ IPALD/ lubang tanah; serta
 - iii. apabila rumah tangga (di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet pasar, terminal, masjid, dll).
- e. BABS tertutup adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dengan pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya
- f. Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka adalah apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya.

Tabel 2. 5 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Wilayah Perkotaan		
1	Akses Aman	%	0,10
2	Akses Layak		
a	Akses layak individual	%	82,40
b	Akses layak komunal	%	5,30
3	Akses Belum Layak		2,50
	BABS di Tempat Tertutup	%	
4	Persentase BABS di Tempat Terbuka	%	0,00
	Wilayah Perdesaan		
1	Akses aman	%	0,08
2	Akses Layak	%	
A	Akses layak individual	%	6,40
b	Akses layak komunal	%	1,70
C	Akses layak khusus perdesaan	%	0,20
3	Akses belum layak		1,80
	BABS di Tempat Tertutup	%	
4	Persentase BABS di Tempat Terbuka	%	0,00
Total		%	100

Sumber: Analisis, 2022

Cakupan akses air limbah domestik di Kabupaten Mojokerto yang diklasifikasikan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020. Berdasarkan Tabel 2. 5 didapatkan bahwa pada Kawasan perkotaan kategori akses sanitasi yang paling tinggi yaitu akses layak individu yaitu sebesar 82,40%, kemudian akses layak bersama sebesar 5,30% dan akses belum layak sebesar 2,50% serta untuk akses aman sebesar 0,10%. Untuk persentase BABS di tempat terbuka sebesar 0%, yang berarti bahwa Kabupaten Mojokerto telah dapat menyandang status ODF. Pada Kawasan perdesaan akses sanitasi yang paling tinggi yaitu akses layak individu sebesar 6,40%, kemudian diikuti akses belum layak sebesar 1,80%, akses layak bersama 1,70% dan akses aman sebesar 0,08%.

Berdasarkan data yang didapat kondisi akses aman di Kabupaten Mojokerto masih memiliki persentase yang kecil, hal ini dikarenakan pada Kabupaten Mojokerto tidak memiliki IPLT yang beroperasi. Berdasarkan pada studi EHRA tempat penyaluran akhir tinja di Kabupaten Mojokerto disalurkan pada 4 (empat) antara lain:

1. sebanyak 67,1% ke sumur resapan
2. sebanyak 27,6% Tidak ada/meresap ke bawah/dinding,
3. sebanyak 3,2 ke Sungai/badan air/kolam/laut
4. sebanyak 0,9% ke Drainase

Berdasarkan pada studi EHRA dijelaskan bahwa sebanyak 94,7% responden tidak pernah melakukan pengurasan/penyedotan tinja, 1,2% dilakukan lebih dari 10 tahun lalu, Berdasarkan gambar 3.8 dijelaskan bahwa sebanyak 94,7% responden tidak pernah melakukan pengurasan/penyedotan tinja, 1,2% dilakukan lebih dari 10 tahun lalu.

B. Dokumentasi Sarana IPLT Kabupaten Mojokerto

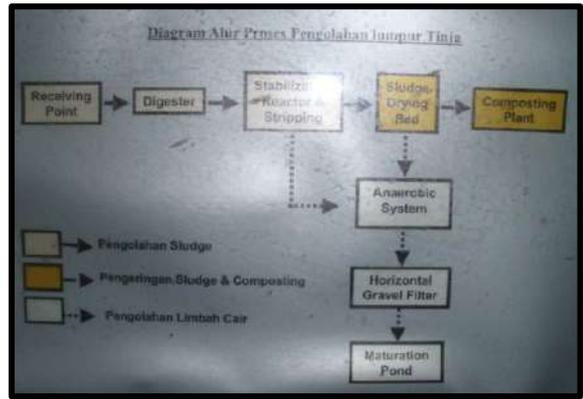
Kondisi pelayanan lumpur tinja di Kabupaten Mojokerto saat ini sudah tidak beroperasi sehingga tidak melayani. Hal ini dikarenakan bangunan IPLT yang terletak di Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto yang berada di area TPA Mojosari dalam kondisi rusak. Pembangunan IPLT ini pada tahun 2003 dan dibangun oleh BORDA-Jerman dengan kapasitas sekitar 20 m³/hari. Untuk keterangan desain dimensi tidak ada informasi secara rinci DED-nya.

Tabel 2. 6 Dokumentasi Sarana IPLT Kabupaten Mojokerto

Keterangan	Dokumentasi
Kantor IPLT Kabupaten Mojokerto	

Keterangan **Dokumentasi**

Bagan Alir IPLT



Receiving Point IPLT



Bio Digester IPLT



Keterangan	Dokumentasi
<p><i>Stabilization Reactor</i> IPLT</p>	

C. Pengolahan SPALD-Terpusat

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. SPALD-T diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD yaitu bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Dalam hal ini, Kabupaten Mojokerto memiliki 9 IPAL Komunal yang bertindak sebagai SPALD-T yang tersebar pada beberapa desa di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 7 Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan	Pengelola	Status Aset
1	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Kedungpen, Kec. Gondang	Ds. Kedungpen Kec. Gondang	2016	60	60	Anaerobic Baffled Reactor	Baik, Berfungsi	KSM Ds. Kedungpen	Desa
2	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Kalen, Kecamatan Dlanggu	Ds. Kalen Kec. Dlanggu	2016	60	60	Anaerobic Baffled Reactor	Baik, Berfungsi	KSM Ds. Kalen	Desa
3	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Beratwetan, Kec. Gedeg	Ds. Beratwetan Kec. Gedeg	2016	60	60	Anaerobic Baffled Reactor	Terdapat kerusakan pada MCK Kombinasi sehingga Tidak berfungsi. IPAL Berfungsi	KSM Ds. Beratwetan	Desa
4	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Kebontunggul, Kec. Gondang	Ds. Kebontunggul Kec. Gondang	2017	66	66	Anaerobic Baffled Reactor	Baik, Berfungsi	KSM Ds. Kebontunggul	Desa
5	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Sumberjati, Kecamatan Jatirejo	Ds. Sumberjati Kec. Jatirejo	2017	66	66	Anaerobic Baffled Reactor	Baik, Berfungsi	KSM Ds. Sumberjati	Desa
6	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan	Dusun Sambigede, Ds. Jambuwok Kec. Trowulan	2017	66	66	Anaerobic Baffled Reactor	Terdapat kerusakan pada MCK Kombinasi sehingga Tidak berfungsi. IPAL Berfungsi	KSM Ds. Jambuwok	Desa
7	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Talunblandong, Kec. Dawarblandong	Ds. Talunblandong Kec. Dawarblandong	2017	66	66	Anaerobic Baffled Reactor	Baik, Berfungsi	KSM Ds. Talunblandong	Desa

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan	Pengelola	Status Aset
8	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Gedangan, Kec. Kutorejo	Ds. Gedangan Kec. Kutorejo	2017	66	66	Anaerobic Baffled Reactor	Baik, Berfungsi	KSM Ds. Talunblandong	Desa
9	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Lebakjabung, Kec. Jatirejo	Ds. Lebakjabung, Kec. Jatirejo	2017	60	60	Anaerobic Baffled Reactor	Baik, Berfungsi	KSM Ds. Gedangan	Desa

Sumber: Survey SSK Kabupaten Mojokerto, 2022

D. Dokumentasi Sarana IPAL dan MCK Komunal Kabupaten Mojokerto

Tabel 2. 8 Foto Sarana IPAL dan MCK Komunal

No	Keterangan	Dokumentasi
1. IPAL dan MCK Komunal Desa Kedungpen		
	MCK Komunal	
	IPAL	
	Toilet MCK Komunal	
2. IPAL dan MCK Komunal Desa Kalen, Kecamatan Dlanggu		

No	Keterangan	Dokumentasi
	MCK Komunal	
	IPAL Komunal	
	Toilet MCK	
<p>3. IPAL dan MCK Komunal Desa Beratwetan, Kecamatan Gedeg</p>		

No	Keterangan	Dokumentasi
	MCK Komunal	
	IPAL Komunal	
4. IPAL dan MCK Komunal Desa Sumberjati, Kecamatan Trowulan		
	IPAL Komunal	
	MCK Komunal	
5. IPAL dan MCK Komunal Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang		

No	Keterangan	Dokumentasi
	MCK Komunal	
	IPAL Komunal	
	Toilet MCK	
6 IPAL dan MCK Komunal Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan		
	IPAL Komunal	

No	Keterangan	Dokumentasi
	MCK Komunal	
7	IPAL dan MCK komunal Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong	
	IPAL Komunal	
	MCK Komunal	
8	IPAL dan MCK Komunal Desa Gedangan, Kecamatan Kutorejo	
	IPAL Komunal	

No	Keterangan	Dokumentasi
	MCK Komunal	
	Toilet MCK	
9 IPAL dan MCK Komunal Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo		
	IPAL Komunal	 

Sumber: Survey SSK Kabupaten Mojokerto, 2022

E. Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah

Analisis gap dilakukan untuk mengetahui celah atau *gap* antara capaian kondisi eksisting terkait akses air limbah dengan target RPJMN 2020-2024, target Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto serta target jangka pendek Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 9 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2022	GAP (%) Terhadap Target 2027	GAP (%) Terhadap Target Jangka Menengah 2024
			Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Kabupaten Mojokerto Tahun 2027	Kabupaten Mojokerto Tahun 2024			
1	Akses Aman	15%	20,0%	10,0%	5,0%	0,2%	9,8%	4,8%
2	Akses Layak	90%	95,0%	97,0%	95,0%	96,2%	0,8%	-1,2%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	80,0%	75,0%	88,8%	-8,8%	-13,8%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	5,0%	5,0%	7,0%	-2,0%	-2,0%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	2,0%	10,0%	0,2%	1,8%	9,8%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,3%	-4,3%	-4,3%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sumber: Analisis 2022.

Berdasarkan pada Tabel 2.13 analisis gap pencapaian akses air limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024, didapatkan bahwa terdapat gap pada akses sanitasi layak sebesar 0,8% dari yang ditargetkan pada tahun 2027 sedangkan terhadap target jangka pendek terdapat gap sebesar -1,2%. Hasil perhitungan minus (-) dalam nilai gap akses layak bersama, akses layak khusus perdesaan dan akses belum layak menunjukkan bahwa kondisi eksisting Kabupaten Mojokerto telah melebihi target pada tahun 2022 untuk Akses Sanitasi Layak, baik pada tahun 2024 maupun tahun 2027. Sedangkan pada BABS di tempat terbuka tidak terdapat gap yang menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi target untuk bebas BABS.

Sedangkan pada sanitasi akses aman, berdasarkan data yang didapat dan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai capaian adalah 0,2% yang mana capaian ini didapatkan karena adanya IPAL Permukiman pada beberapa kelurahan. Sedangkan untuk capaian sanitasi belum layak masih berada dalam capaian 4,3% dari penduduk Kabupaten Mojokerto. Hasil tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan pada instrumen PSSK Kabupaten Mojokerto.

F. Analisis Utilisasi Infrastruktur Kabupaten Mojokerto

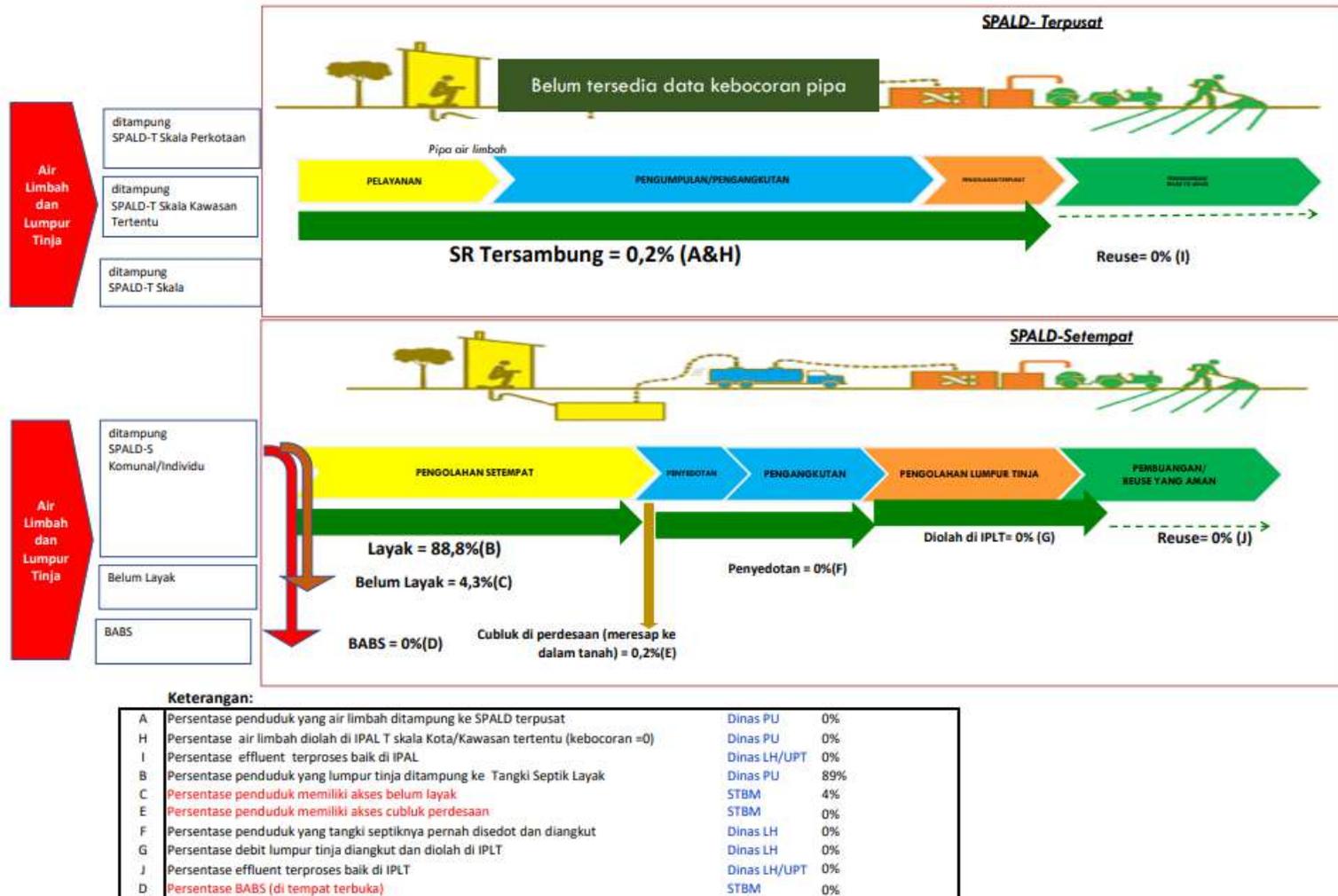
Analisis ini memuat terkait kapasitas penggunaan dari truk tinja dan IPLT yang telah dimiliki Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten Mojokerto sendiri IPLT yang ada sudah tidak beroperasi karena sudah tidak berfungsi secara total. Hal ini dikarenakan bangunan IPLT yang terdapat di Kabupaten Mojokerto dalam kondisi yang rusak. Faktor ketidakberfungsian IPLT ini mempengaruhi nilai akses aman, sehingga persentase capaian Akses Aman Tahun 2022 sebesar 0,2% dari seharusnya 5% pada tahun 2024 (target jangka pendek).

G. Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Pada analisis rantai layanan sanitasi ini memuat informasi terkait infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (tangki septik individual, MCK komunal, IPAL Domestik, IPLT, dll) yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kondisi yang digambarkan dalam rantai layanan adalah kondisi eksisting pengelolaan air limbah di Kabupaten Mojokerto.

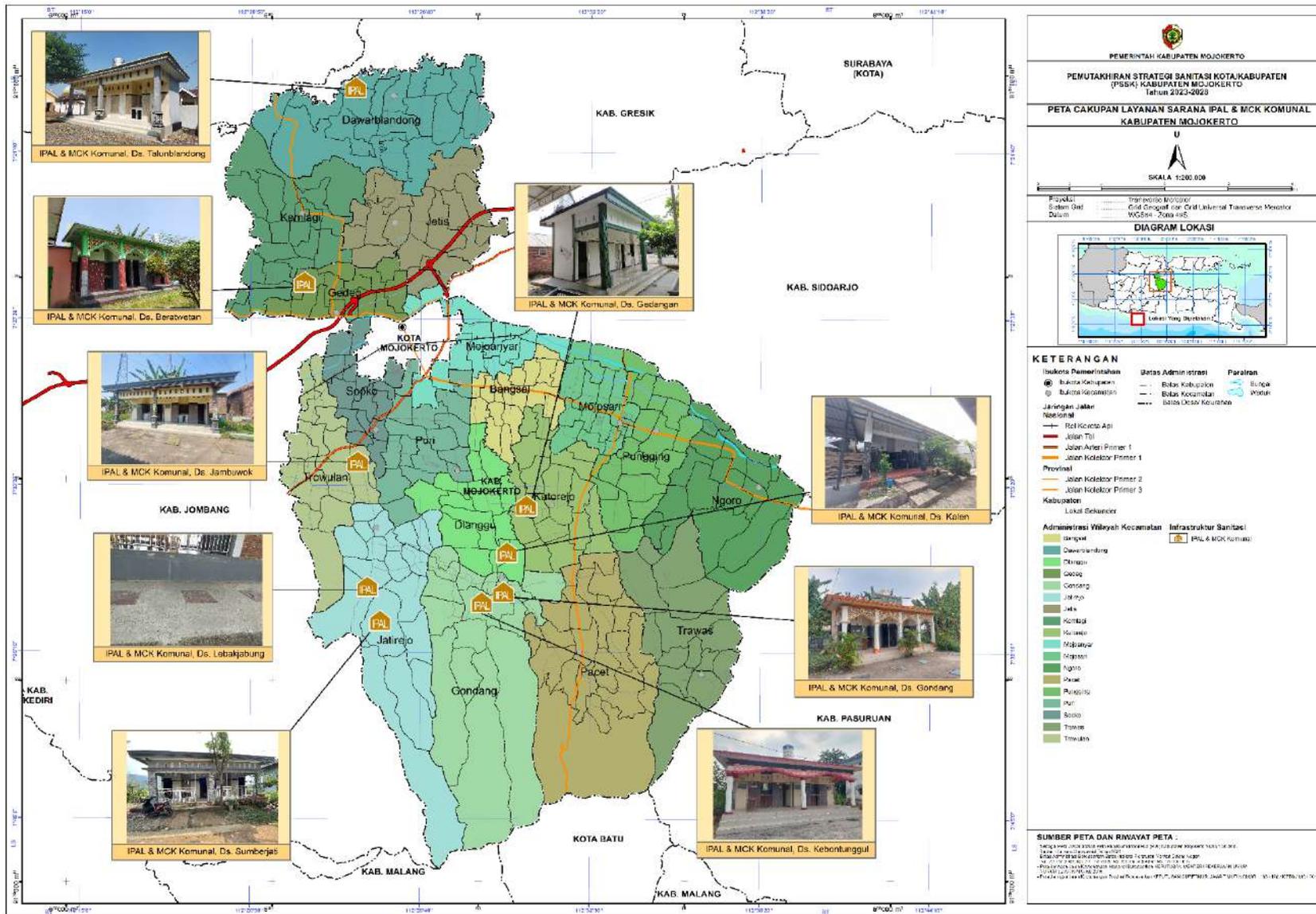
Berdasarkan analisis rantai layanan sanitasi Kabupaten Mojokerto pada SPALD Terpusat yaitu IPAL di Kabupaten Mojokerto, penduduk yang tersambung dan terlayani oleh IPAL Komunal yaitu sebesar 0,2%. Sedangkan untuk sistem SPALD-Setempat di Kabupaten Mojokerto pada akses layak sebesar 87,3%, belum layak sebesar 4,3%. Sistem SPALD-S di Kabupaten Mojokerto ini belum adanya dilakukan penyedotan tangki septik dan belum juga adanya pengolahan di IPLT karena kondisi IPLT yang tidak beroperasi.

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 6 Analisis Rantai Layanan Sanitasi Kabupaten Mojokerto

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 7 Peta Cakupan Layanan Sarana IPAL & MCK Komunal Kabupaten Mojokerto

(2) Kelembagaan dan Kebijakan/ Peraturan

Kelembagaan dan kebijakan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan ringkas mengenai pemetaan institusi yang berwenang dalam pengelolaannya. Pada bagian kelembagaan di Kabupaten Mojokerto yang ada dan berjalan yaitu kelembagaan pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat.

A. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pada kelembagaan pemerintah daerah di Kabupaten Mojokerto dilakukan penjelasan ringkas mengenai pemetaan institusi yang berwenang dalam pengelolaannya. Dalam hal ini diambil perangkat daerah yaitu BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR.

Tabel 2. 10 Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja Sub Bidang Prasarana Wilayah, perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana kerja badan - Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman - Menyusun rencana program pembangunan lingkup prasarana pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman - Menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman - Melakukan monitoring, evaluasi dan Menyusun laporan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sampah - Pengurangan Sampah - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto	Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, perbaikan, peremajaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman - Pelaksanaan pembinaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman - Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan, peremajaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penyehatan lingkungan

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

Tabel 2. 11 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
Perencanaan			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	BAPPEDA		
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA		
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA		
Pengadaan Sarana			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Pengelolaan			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
Mengelola IPLT dan atau IPAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangka septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Pengaturan dan Pembinaan			
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	Dinas Kesehatan		
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Monitoring dan Evaluasi			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestic skala Kabupaten/Kota	BAPPEDA		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
mengelola keluhan atas layanan air limbah domestic			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

B. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat menjelaskan terkait pemetaan kelembagaan masyarakat khususnya pada hal ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan IPAL dan MCK Komunal di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 12 Data Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

No	Fasilitas yang Dikelola	Pengelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang	Status/ Keterangan
1	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Kedungpen, Kec. Gondang	KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	Berfungsi
2	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Kalen, Kecamatan Dlanggu	Pengurus Masjid, KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	Berfungsi
3	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Beratwetan, Kec. Gedeg	KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	MCK tidak Beroperasi, tidak berfungsi IPAL Berfungsi
4	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Kebontunggul, Kec. Gondang	KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	Berfungsi
5	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Sumberjati, Kecamatan Jatirejo	KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	Berfungsi
6	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan	Pengurus Masjid, KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	MCK Tidak Beroperasi, tidak berfungsi IPAL Berfungsi
7	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Talunblandong, Kec. Dawarblandong	Pengurus Kebun Kantor Desa, KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	Berfungsi
8	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Gedangan, Kec. Kutorejo	KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	Berfungsi
9	MCK kombinasi + IPAL Komunal Desa Lebakjabung, Kec. Jatirejo	KSM (Masyarakat yang terhubung dengan IPAL)	Desa	Swadaya masyarakat	Pemerintah Desa	Berfungsi

C. Regulasi

Pada regulasi ini akan diberikan penjelasan ringkas mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait air limbah domestik yang terdapat di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 13 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No.		
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tidak Ada
2	Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah	RPJMD Kabupaten Mojokerto Misi 4: Pemerataan & Perluasan pembangunan infrastruktur di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan
3	Nama Lengkap Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tidak ada
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-
B	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-
C	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-
d	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/ Pedoman sudah ada?	Tidak ada
6	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Belum ada
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Belum ada

2.2.2 Profil Pengelolaan Persampahan

(1) Sistem dan Infrastruktur Persampahan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 pertumbuhan sektor lapangan salah satunya pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,47%. Dengan prosentasi luas cakupan yang terlayani pengangkutan sampah 77,8%. Beberapa infrastruktur didirikan untuk memperluas cakupan layanan. Terdapat TPA baru, TPS, dan TPST. TPA baru seluas 4 ha di bangun pada tahun 2020 dengan total TPS & TPST saat ini berjumlah 79 unit. Cakupan area pelayanan mencapai 14 kecamatan. Sampah yang tertangani pada kondisi eksisting sebesar 30,73%. Rata-rata cakupan layanan infrastruktur persampahan mencapai 10% dari seluruh jumlah KK di desa atau kecamatan tersebut.

Sampah yang dihasilkan berupa timbulan didapatkan dengan menggunakan perhitungan. Jumlah penduduk yang berbeda pada setiap kecamatan menghasilkan perhitungan timbulan sampah yang berbeda pula. Berikut hasil perhitungan timbulan sampah yang terbagi menjadi timbulan sampah perkotaan dan bukan timbulan sampah perkotaan pada setiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 14 Tabel Timbulan Sampah Perkotaan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan	Timbulan Sampah Perkotaan	Pengurangan sampah Perkotaan		Total Penanganan Sampah Perkotaan		Sampah Tidak Terkelola di Perkotaan	
	RT	Ton/tahun	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%
JATIREJO	11314	8273	0	0,0%	7378	89,2%	0	0%
GONDANG	8976	8526	31	0,4%	5853	68,6%	0	0%
PACET	9219	11701	238	2,0%	6061	51,8%	1321	11%
TRAWAS	5035	6108	1	0,0%	3283	53,7%	1182	19%
NGORO	27006	16638	251	1,5%	17142	103,0%	0	0%
PUNGGING	24050	15721	12	0,1%	15683	99,8%	26	0%
KUTUREJO	17223	12995	24	0,2%	11231	86,4%	1262	10%
MOJOSARI	24279	16886	247	1,5%	15306	90,6%	1333	8%
BANGSAL	16045	9979	2	0,0%	10463	104,8%	0	0%
MOJOANYAR	14766	9985	1	0,0%	9629	96,4%	356	4%
DLANGGU	17082	11522	2	0,0%	11139	96,7%	382	3%
PURI	23181	15691	3	0,0%	15116	96,3%	573	4%
TROWULAN	21267	15189	394	2,6%	13487	88,8%	1308	9%
SOOKO	22798	15142	177	1,2%	14572	96,2%	393	3%
GEDEK	18168	11340	0	0,0%	11847	104,5%	0	0%

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan	Timbulan Sampah Perkotaan	Pengurangan sampah Perkotaan		Total Penanganan Sampah Perkotaan		Sampah Tidak Terkelola di Perkotaan	
	RT	Ton/tahun	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%
KEMLAGI	17047	11353	0	0,0%	11116	97,9%	0	0%
JETIS	25548	17514	1	0,0%	16659	95,1%	0	0%
DAWAR BLANDONG	2968	10147	0	0,0%	1935	19,1%	553	5%
TOTAL	305972	224713	1384	0,62%	197.898	88,07%	8.688	3,87%

Sumber: Analisis, 2022.

Tabel 2. 15 Tabel Timbulan Sampah Perdesaan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Perdesaan	Timbulan Sampah	Total Pengurangan sampah		Total Penanganan Sampah		Sampah Tidak Terkelola	
	RT	Ton/tahun	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%
JATIEJO	2787	1627	1	0,0%	122	1,5%	1503	18%
GONDANG	5744	3003	1	0,0%	183	2,2%	2819	33%
PACET	8569	4082	2	0,0%	5771	49,3%	0	0%
TRAWAS	3424	1643	47	0,8%	231	3,8%	1365	22%
NGORO	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
PUNGGING	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
KUTOREJO	651	478	0	0,0%	20	0,2%	457	4%
MOJOSARI	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
BANGSAL	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
MOJOANYAR	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
DLANGGU	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
PURI	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
TROWULAN	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
SOOKO	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
GEDEK	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
KEMLAGI	746	459	0	0,0%	507	4,5%	0	0%

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

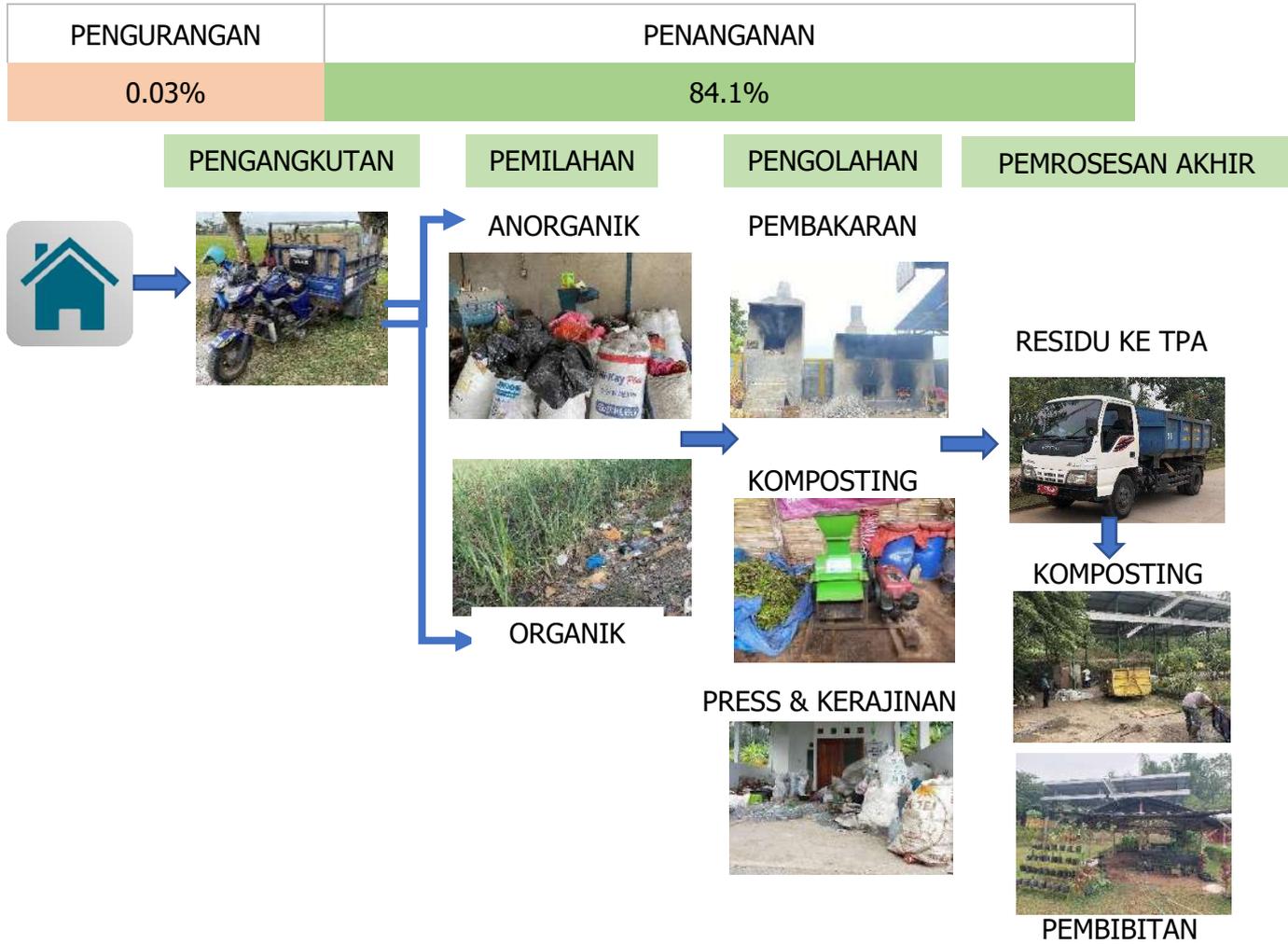
Kecamatan	Jumlah Penduduk Perdesaan	Timbulan Sampah	Total Pengurangan sampah		Total Penanganan Sampah		Sampah Tidak Terkelola	
	RT	Ton/tahun	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%
JETIS	2533	1444	0	0,0%	1692	9,7%	0	0%
DAWAR BLANDONG	9125	7659	0	0,0%	285	2,8%	7373	73%
TOTAL	33579	20394	51	0,02%	8.813	3,92%	13.518	6,02%

Sumber: Analisis, 2022.

Pada Tabel 2.14 terdapat data beberapa Kecamatan (Ngoro, Bangsal dan Gedek) yang memiliki persentase total penanganan sampah lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Gedek tersebut menerima sampah dari kecamatan/daerah di luar kecamatan itu sendiri untuk ditangani dalam area Kecamatan tersebut.

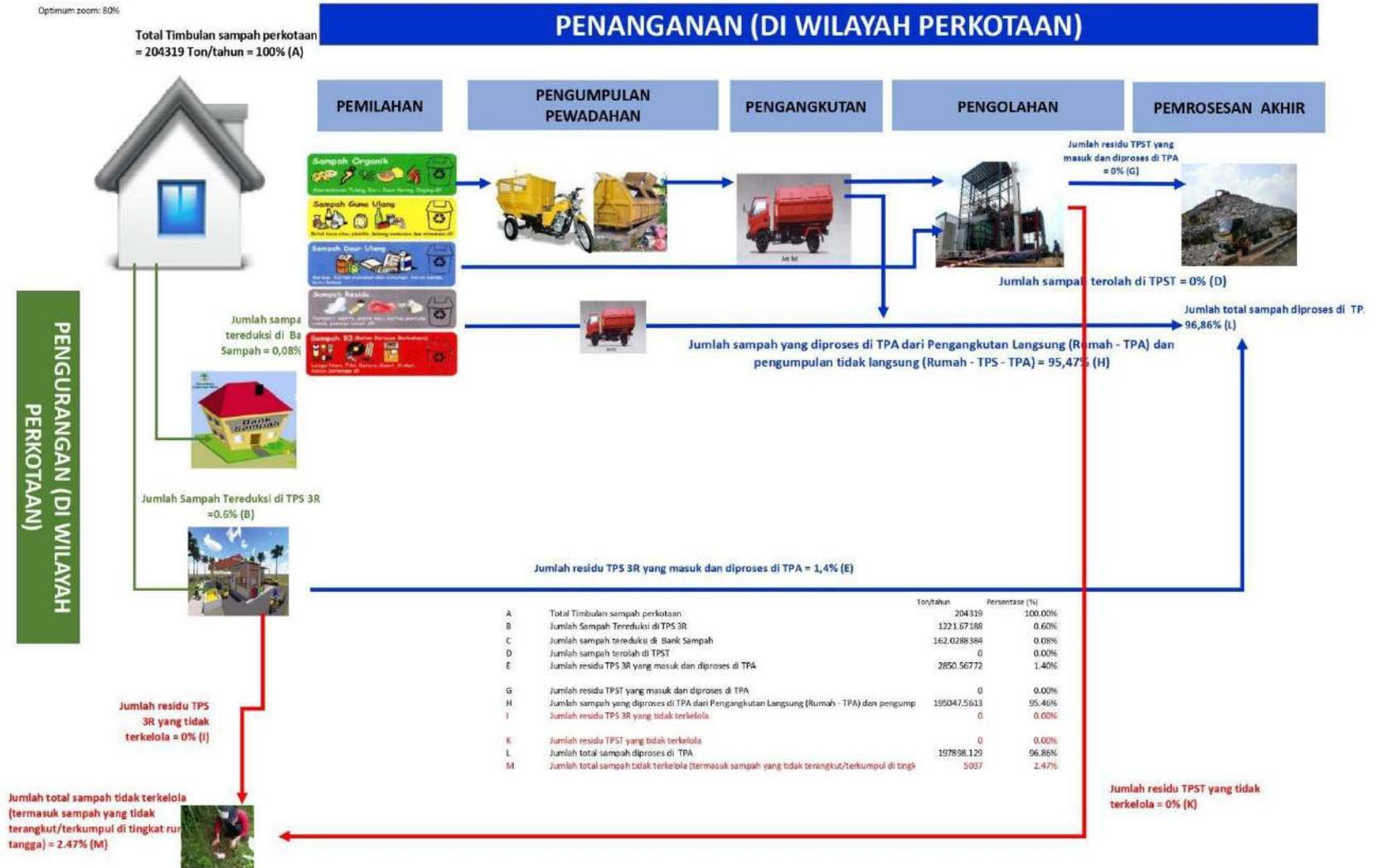
Timbulan sampah yang dihasilkan baik wilayah perkotaan dan perdesaan sebesar 224.712,9 ton/tahun. Timbulan tersebut telah mengalami proses dan mampu tertangani sebanyak 20,63%. Hal tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tertangani sebanyak 11.368,9 ton/tahun. Adapun sampah yang mampu berkurang dengan proses 3R sebanyak 0,25% tertulis dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto. Tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto yang juga termuat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021, target pengelolaan timbulan sampah sebesar 100%. Pengelolaan tersebut terdiri dari pengurangan sebesar 210267,1 m³ atau 25% sedangkan penanganan sebesar 75% atau sebanyak 630801 m³. Hasil tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan pada instrumen PSSK Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan data yang didapat dari DLH Kabupaten Mojokerto, capaian saat ini pengurangan sebanyak 25,3% dimana di dalamnya tidak hanya dari proses pengurangan 3R saja. Sedangkan untuk penanganan masih berada di angka 5,3%. Terdapat perbedaan capaian pengolahan sampah dimana dari hasil pengisian instrument SSK dengan pengisian berdasarkan kondisi eksisting di tahun 2022 yaitu pengurangan sampah sebesar 0,3% sedangkan penanganan sebesar 84,1%.



Gambar 2. 8 Skema Tahapan Penanganan Sampah Kabupaten Mojokerto

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 9 Rantai Layanan Sampah di Wilayah Kabupaten Mojokerto

Sampah individu dan sampah rumah tangga dikumpulkan dari rumah ke rumah menggunakan gerobak motor. Adapula yang secara individual mengumpulkan sampah ke TPS. TPS di sini dapat berupa TPS3R dan TPST. Pada infrastruktur persampahan tersebut dilakukan pemilahan sampah menjadi sampah organik dan sampah nonorganik. Tidak sedikit beberapa daerah telah menerapkan pemilahan di awal pada masing-masing rumah sehingga pengangkutan telah dipilah. Berikut merupakan jumlah sampah yang masuk pada masing-masing infrastruktur persampahan.

Tabel 2. 16 Tabel Jumlah Sampah yang Masuk pada Setiap Infrastruktur Persampahan

Lokasi TPA	Jumlah Sampah yang Masuk (ton/hari)
TPA Belahantengah	60
TPA Karangdieng	67
Lokasi TPST	Jumlah Sampah yang Masuk (ton/hari)
TPST Seduri	16
TPST Kauman	0,5
TPST Lebaksono	24
Lokasi TPS3R	Jumlah Sampah yang Masuk (ton/hari)
TPS3R Ds. Tampungrejo Kec. Puri	1
TPS3R Ds. Belahantengah Kec. Mojosari	1
TPS3R Ds. Petak Kec. Pacet	2
TPS3R di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan (DAK)	Sudah tidak operasional
TPS3R di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan (DAK)	1,5
TPS3R di Desa Sooko Kecamatan Sooko (DAK)	Belum Operasional
TPS3R di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko (DAK)	0,5
TPS3R di Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo (DAK)	Belum Operasional
TPS3R di Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo (DAK)	Belum Operasional
TPS3R di Desa Purwojati Kecamatan Ngoro (DAK)	0,5
TPS3R di Desa Padusan Kecamatan Pacet (DAK)	Belum Operasional
TPS3R Desa Kupang Kec. Jetis (DAK)	Belum Operasional
TPS3R Desa Trawas Kec. Trawas (DAK)	Belum Operasional
TPS3R Desa Kedungudi Kec. Trawas (DAK)	2

Sumber: Hasil Wawancara, 2022

Berdasarkan tabel di atas, masih banyak infrastruktur persampahan yang belum beroperasi sehingga jumlah sampah yang masuk ke TPA cukup banyak. Akan tetapi terdapat satu TPS3R yang sudah pernah beroperasi selama satu tahun namun terhenti terkendala biaya berada di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan. Rata-rata sampah yang masuk ke TPS3R sebanyak 1 ton per hari. TPS3R menangkut sampah warga menggunakan gerobak motor ataupun gerobak. Para pekerja yang mengangkut sering menyebut moda pengumpulan sampah dengan tosa. Moda tersebut berasal dari bantuan PUPR dan adapula yang berasal dari dana desa. Dalam sehari mereka dapat mengangkut 3-4 gerobak motor penuh sampah dan darisitulah perkiraan sampah masuk dari masing-masing infrastruktur. Lain halnya dengan TPST, sampah yang masuk berada di atas 15 ton/harinya. Kecuali TPST di Kauman yang cukup sedikit dikarenakan lingkup pelayanan yang lebih kecil dibandingkan dengan TPST lainnya.



Gambar 2. 10 Sarana Prasarana Pengangkutan Sampah

- (a) Sarana pengumpulan sampah (b) gerobak motor pengumpul sampah dari rumah ke penampungan sementara (c) pengangkutan dari rumah-rumah ke TPST (d) gerobak pengumpul sampah dari rumah ke penampungan sementara

Sampah-sampah tersebut di tampung sementara di TPST dan TPS3R. Pada penampungan tersebut terdapat proses pemilahan. Pemilahan saat ini hanya ada pada sampah organik dan sampah nonorganik saja. Terdapat satu lokasi yaitu Desa Trawas Kecamatan Trawas dimana TPS3R desa tersebut belum berfungsi namun berdasarkan hasil wawancara dan perencanaan pengelola menyebutkan bahwa pemilhan akan dimulai dari asal sampah tersebut. Pada masing-masing rumah akan disediakan dua tempat sampah berbeda yaitu sampah organik

dan nonorganic. Dengan begitu pengumpulan akan lebih mudah. Penampungan sementara di TPS3R dan TPST juga akan lebih baik pengelolaannya.



Gambar 2. 11 Sarana Penampungan Sampah

(a) Kontainer (b) lokasi penampungan sementara sampah yang masuk (c) Kontainer sampah

Tahapan penanganan sampah selanjutnya adalah pengolahan. Pengolahan untuk penanganan sampah yang dilakukan di penampungan sementara cukup beragam. Mulai dari menampung sampah yang masuk, memilah, melakukan pengomposan, dan sebagainya. Berikut tabel tahapan pengelolaan masing-masing infrastruktur persampahan.

Tabel 2. 17 Tahapan Pengelolaan Sampah pada Masing-masing Infrastruktur

Lokasi TPST	Tahapan Pengelolaan							
	Pemilahan	Organik -> Pengmposan	Organik -> Pembibitan	Anorganik -> Press	Anorganik -> Pembakaran	Anorganik -> Penjualan	Residu ke TPA	Tidak ada Pengolahan (langsung ke TPA)
TPST Seduri								√
TPST Kauman								√
TPST Lebaksono								√
Lokasi TPS3R								
TPS3R Ds. Tampungrejo Kec. Puri								√
TPS3R Ds. Belahantengah Kec. Mojosari	√	√					√	1
TPS3R Ds. Petak Kec. Pacet	√				√			2
TPS3R di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan (DAK)								Sudah tidak operasional
TPS3R di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan (DAK)	√					√	√	1,5

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi TPST	Tahapan Pengelolaan							
	Pemilahan	Organik -> Pengomposan	Organik -> Pembibitan	Anorganik -> Press	Anorganik -> Pembakaran	Anorganik -> Penjualan	Residu ke TPA	Tidak ada Pengolahan (langsung ke TPA)
TPS3R di Desa Sooko Kecamatan Sooko (DAK)								Belum Operasional
TPS3R di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko (DAK)	√					√	√	0,5
TPS3R di Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo (DAK)								Belum Operasional
TPS3R di Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo (DAK)								Belum Operasional
TPS3R di Desa Purwojati Kecamatan Ngoro (DAK)	√	√			√	√	√	0,5
TPS3R di Desa Padusan Kecamatan Pacet (DAK)								Belum Operasional

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi TPST	Tahapan Pengelolaan							Tidak ada Pengolahan (langsung ke TPA)
	Pemilahan	Organik -> Pengomposan	Organik -> Pembibitan	Anorganik -> Press	Anorganik -> Pembakaran	Anorganik -> Penjualan	Residu ke TPA	
TPS3R Desa Kupang Kec. Jetis (DAK)								Belum Operasional
TPS3R Desa Trawas Kec. Trawas (DAK)								Belum Operasional
TPS3R Desa Kedungudi Kec. Trawas (DAK)	√	√				√	√	2

Sumber : Hasil Survey, 2022

Pengolahan yang dilakukan terdiri dari pemilahan yang dilakukan pada TPS3R di Desa Kedungudi, Purwojati, Jampirogo, Trowulan, Petak, dan Belahantengah. Selanjutnya sampah organik yang sudah dipilah digunakan sebagai bahan untuk pengomposan. Beberapa desa meliputi TPS3R Belahantengah, Purowjati, Kedungudi mengolah sampah organik menjadi kompos. Proses pengomposan meliputi pencacahan sampah organik. Kemudian penggilingan atau mencampur dengan bahan lainnya. Selanjutnya dibiarkan atau ditimbun dalam tangki selama beberapa hari sehingga menghasilkan pupuk kompos. Adapula yang mengelola sampah organik tersebut menjadi bentuk pupuk kompos cair. Akan tetapi prospek penjualan yang sangat rendah membuat pembuatan pupuk kompos cair ini masih sedikit. Pembuatannya berada di TPS3R Desa Kedungudi. Sampah organik juga dilakukan pembakaran dengan tungku pembakaran yang terletak di Desa Petak dan Purwojati. Abu yang dihasilkan diletakkan di tanah untuk menyuburkan tanah. Sampah organik juga dapat menjadi awal pembibitan tanah.

Pengolahan sampah anorganik hasil pemilahan mengalami beberapa proses. Salah satunya adalah press seperti pada di TPS3R Desa Trawas yang masih dalam bentuk perencanaan. Sampah anorganik seperti plastic dan botol dipress untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu dan dijual yang dilakukan pengelola TPS3R di Trowulan, Jampirogo, Purwojati, Kedungudi. TPS3R di Kedungudi melakukan tindakan lain terhadap sampah anorganik ini. Sampah yang dapat di daur ulang dioleh kembali untuk dibuat kerajinan. Hasilnya dapat dipakai sendiri juga dijual oleh pengelola. Di samping itu, terdapat infrastruktur persampahan yang tidak memiliki program pengolahan apapun yang ada pada TPST Seduri, Kauman, Lebaksono, TPS3R Tampungrejo. Adapun TPS yang belum beroperasi dikarenakan minimnya pengetahuan untuk pengolahan sampah serta pendanaan yang dinilai belum mampu untuk memulai pengelolaan secara maksimal di lokasi tersebut.

Kabupaten Mojokerto diketahui memiliki infrastruktur penanganan sampah lainnya yaitu bank sampah. Bank sampah memiliki kegiatan mengolah sampah dengan mendaur ulang ataupun diperjualbelikan. Sampah anorganik umumnya akan ditampung dan disetorkan kepada industri yang membutuhkannya sebagai bahan baku untuk nantinya dilebur dan dibentuk kembali. Tengkulak rongsokan dikatakan memiliki cara kerja yang sama sehingga juga dapat dikategorikan sebagai bank sampah. Berikut daftar bank sampah di Kabupaten Mojokerto yang bersumber dari SIPSN(Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2021.

Tabel 2. 18 Bank Sampah di Kabupaten Mojokerto

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Kedungudi Kec. Trawas	Beroperasi	2021	0.2	0.1	0
Desa Pacing Kecamatan Bangsal	Beroperasi	2021	0.001401	0.001401	0
Desa Pacing Kecamatan Bangsal	Beroperasi	2021	0.000464	0.000464	0
Desa Pacing Kecamatan Bangsal	Beroperasi	2021	0.000217	0.000217	0
Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.000178	0.000178	0
Desa Punggul Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.000878	0.000878	0
Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.002919	0.002919	0
Desa Randugenengan Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.000740	0.000740	0
Desa Sambilawang Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.000424	0.000423	0
Desa Talok Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.000838	0.000838	0
Desa Punggul Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.000306	0.000306	0
Desa Talok Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.001410	0.001410	0
Desa Punggul Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.000079	0.000079	0
Desa Punggul Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2021	0.000030	0.000030	0
Desa Randugenengan Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2020	0.000740	0.000740	0
Desa Talok Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2020	0.000838	0.000838	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Randugenengan Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2019	0.002466	0.002466	0
Desa Talok Kecamatan Dlanggu	Beroperasi	2019	0.002795	0.002795	0
Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000197	0.000197	0
Desa Jatidukuh Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.001105	0.001105	0
Desa Padi Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.001045	0.001045	0
Desa Jatidukuh Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.001233	0.001233	0
Desa Gondang Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.000375	0.000375	0
Desa Pohjejer Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.000631	0.000631	0
Desa Gondang Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.000454	0.000454	0
Desa Kalikatir Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.003235	0.003235	0
Desa Begaganlimo Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.000316	0.000316	0
Desa Begaganlimo Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.001164	0.001164	0
Desa Gondang Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.000464	0.000464	0
Desa Jembul Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2021	0.001193	0.001193	0
Desa Mojogeneng Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2021	0.001216	0.001216	0
Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2021	0.000503	0.000503	0
Desa Sumberjati Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2021	0.000247	0.000247	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Sumberjati Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2021	0.000325	0.000325	0
Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2021	0.000108	0.000108	0
Desa Sumberjati Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2021	0.000325	0.000325	0
Desa Jembul Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2021	0.001203	0.001203	0
Desa Jembul Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2020	0.001193	0.001193	0
Desa Sumberjati Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2020	0.000247	0.000247	0
Desa Sumberjati Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2020	0.000325	0.000325	0
Desa Jembul Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2020	0.001203	0.001203	0
Desa Sumberjati Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2019	0.000822	0.000822	0
Desa Sumberjati Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2019	0.001085	0.001085	0
Desa Jembul Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2019	0.001203	0.001203	0
Desa Jembul Kecamatan Jatirejo	Beroperasi	2019	0.003978	0.003978	0
Desa Mlirip Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000533	0.000533	0
Desa Mlirip Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000473	0.000473	0
Desa Mojolebak Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000335	0.000335	0
Desa Parning Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.001479	0.000000	0
Desa Mlirip Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000072	0.000072	0
Desa Mlirip Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000316	0.000315	0
Desa Mlirip Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000395	0.000395	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Kupang Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.004507	0.004507	0
Desa Mojolebak Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000700	0.000700	0
Desa Sidorejo Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000503	0.000503	0
Desa Jetis Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.002347	0.002347	0
Desa Sidorejo Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000493	0.000493	0
Desa Mlirip Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000069	0.000069	0
Desa Mlirip Kecamatan Jetis	Beroperasi	2021	0.000069	0.000069	0
Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi	Beroperasi	2021	0.000513	0.000513	0
Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi	Beroperasi	2021	0.000355	0.000355	0
Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi	Beroperasi	2020	0.000513	0.000513	0
Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi	Beroperasi	2019	0.001710	0.001710	0
Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000395	0.000395	0
Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000325	0.000325	0
Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.002407	0.002407	0
Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000197	0.000197	0
Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000503	0.000503	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Windurejo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.001312	0.001312	0
Desa Sawo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000187	0.000187	0
Desa Sawo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000296	0.000296	0
Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000759	0.000759	0
Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000967	0.000967	0
Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000197	0.000197	0
Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000434	0.000434	0
Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000306	0.000306	0
Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000404	0.000404	0
Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000898	0.000898	0
Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.000434	0.000434	0
Desa Karangasem Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.002850	0.002850	0
Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.002407	0.002407	0
Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.000503	0.000503	0
Desa Windurejo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.001312	0.001311	0
Desa Sawo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.000187	0.000187	0
Desa Sawo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.000296	0.000296	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.000759	0.000759	0
Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.000197	0.000197	0
Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.000434	0.000434	0
Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2020	0.000898	0.000898	0
Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.008022	0.008022	0
Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.001677	0.001677	0
Desa Windurejo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.004373	0.004373	0
Desa Sawo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.000625	0.000625	0
Desa Sawo Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.000986	0.000986	0
Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.000658	0.000658	0
Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.000898	0.000898	0
Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar	Beroperasi	2021	0.003715	0.003715	0
Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar	Beroperasi	2021	0.000907	0.000907	0
Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar	Beroperasi	2021	0.001115	0.001114	0
Desa Wonokusumo Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	0.000138	0.000138	0
Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	0.000219	0.000219	0
Desa Belahantengah Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	0.004932	0.004932	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Sawahan Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	0.000325	0.000325	0
Desa Wonokusumo Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	0.000404	0.000404	0
Desa Sawahan Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	0.000227	0.000227	0
Desa Modopuro Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	0.000848	0.000848	0
Desa Kauman Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	0.001193	0.001193	0
Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro	Beroperasi	2021	0.000927	0.000927	0
Desa Tambakrejo Kecamatan Ngoro	Beroperasi	2021	0.000661	0.000661	0
Desa Sukoanyar Kecamatan Ngoro	Beroperasi	2021	0.000168	0.000168	0
Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro	Beroperasi	2020	0.000927	0.000927	0
Desa Tambakrejo Kecamatan Ngoro	Beroperasi	2020	0.000325	0.000325	0
Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro	Beroperasi	2019	0.003090	0.003090	0
Desa Tambakrejo Kecamatan Ngoro	Beroperasi	2019	0.002203	0.002203	0
Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.002532	0.002532	0
Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2019	0.001447	0.001447	0
Desa Pacet Kecamatan Pacet	Beroperasi	2021	0.000444	0.000443	0
Desa Balongmasin Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.001322	0.001322	0
Desa Pungging Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.000878	0.000878	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.000237	0.000237	0
Desa Pungging Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.000878	0.000878	0
Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.001312	0.001312	0
Desa Banjartanggul Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.000335	0.000334	0
Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.000868	0.000868	0
Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.000237	0.000237	0
Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.001312	0.001312	0
Desa Randuharjo Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.003600	0.003599	0
Desa Pungging Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	0.004419	0.004419	0
Desa Sumbergirang Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.004389	0.004389	0
Desa Tangunan Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.001440	0.001440	0
Desa Brangkal Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.001272	0.001272	0
Desa Medali Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.004241	0.004241	0
Desa Mlaten Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.013151	0.013151	0
Desa Puri Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.000444	0.000444	0
Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.000395	0.000395	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Brayung Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.002140	0.002140	0
Desa Kenanten Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.000562	0.000562	0
Desa Kintelan Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.000197	0.000197	0
Desa Mlaten Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.001045	0.001045	0
Desa Balongmojo Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.001479	0.001479	0
Desa Mlaten Kecamatan Puri	Beroperasi	2021	0.000572	0.000572	0
Desa Japan Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.000414	0.000414	0
Desa Sambiroto Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.001894	0.001894	0
Desa Japan Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.000335	0.000335	0
Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.002130	0.002130	0
Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.002229	0.002229	0
Desa Blimbing Asri Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.003008	0.003008	0
Desa Japan Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.000404	0.000404	0
Desa Karangkedawang Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.000710	0.000710	0
Desa Jampirogo Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.000483	0.000483	0
Desa Brangkal Kecamatan Sooko	Beroperasi	2021	0.000562	0.000562	0
Desa Trawas Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.001243	0.001243	0
Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000779	0.000779	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000296	0.000263	0
Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000424	0.000424	0
Desa Selotapak Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000533	0.000533	0
Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000276	0.000276	0
Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.001401	0.001401	0
Desa Trawas Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.001243	0.001243	0
Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000483	0.000483	0
Desa Penanggungan Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000237	0.000237	0
Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.001322	0.001322	0
Desa Penanggungan Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000237	0.000237	0
Desa Penanggungan Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000148	0.000148	0
Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000375	0.000375	0
Desa Trawas Kecamatan Trawas	Beroperasi	2021	0.000237	0.000237	0
Desa Temon Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	0.000750	0.000750	0
Desa Sidomulyo Kecamatan Bangsal	Beroperasi	2021	3.200000	1.280000	1.920000
Desa Sidomulyo Kecamatan Bangsal	Beroperasi	2021	6.666630	5.333370	1.333260
Desa Centong Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	0.600000	0.400000	0.200000

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Kemasantani Kecamatan Gondang	Beroperasi	2021	12.000000	11.520000	0.480000
Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	2.000000	1.600000	0.400000
Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo	Beroperasi	2021	0.520000	0.376000	0.144000
Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	4.288000	2.664000	1.624000
Desa Belahantengah Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	4.000000	3.360000	0.640000
Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari	Beroperasi	2021	9.424000	7.372000	2.052000
Desa Cempokolimo Kecamatan Pacet	Beroperasi	2021	3.200000	2.960000	0.240000
Desa Cempokolimo Kecamatan Pacet	Beroperasi	2021	4.200000	3.285534	0.914466
Desa Pacet Kecamatan Pacet	Beroperasi	2021	0.856000	0.400000	0.456000
Desa Lebaksono Kecamatan Pungging	Beroperasi	2021	2.666630	0.000000	2.666630
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	5.666630	4.333370	1.333260
Desa Trowulan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	7.200000	5.760000	1.440000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	1.166685	0.933315	0.233370
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	1.166685	0.816685	0.350000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	5.800000	0.625014	5.174986
Desa Trowulan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	6.400000	5.120000	1.280000

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	1.666685	0.933315	0.733370
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	5.333370	3.733370	1.600000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	40.000000	32.000000	8.000000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	5.333370	4.266630	1.066740
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	2.666630	1.866630	0.800000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	1.333370	1.066630	0.266740
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	10.989370	7.965644	3.023726
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	8.602986	3.648219	4.954767
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	2.333315	1.866685	0.466630
Desa Trowulan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	3.200000	2.400000	0.800000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	1.333370	1.066630	0.266740
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	3.500000	2.100000	1.400000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	2.333315	1.866685	0.466630
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	0.233315	0.186685	0.046630
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	3.200000	1.920000	1.280000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	6.666630	4.666630	2.000000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	2.666630	1.866630	0.800000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	5.666630	3.666630	2.000000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	1.166685	0.840000	0.326685

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi	Status	Tahun Pembangunan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang terolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang dibawa ke TPA (ton/hari)
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	2.666630	1.866630	0.800000
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	6.666630	5.333370	1.333260
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	6.666630	3.336000	3.330630
Desa Kejagan Kecamatan Trowulan	Beroperasi	2021	3.733370	1.680000	2.053370

Tabel 2. 19 Rekapitulasi Jumlah Bank Sampah dan Sampah yang Terkelola

Lokasi Kelurahan/Desa	Jumlah	Sampah yang Terkelola (ton/tahun)
Kecamatan Bangsal	5	2414.6396
Pacing	3	0.7596
Sidomulyo	2	2413.88
Kecamatan Dlanggu	14	5.34336
Jrambe	1	1.0656
Punggul	4	0.4716
Randugenengan	3	1.44
Sambilawang	1	0.15456
Sumberkarang	1	0.0648
Talok	4	2.1468
Kecamatan Gondang	12	4354.45757

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi Kelurahan/Desa	Jumlah	Sampah yang Terkelola (ton/tahun)
Begaganlimo	2	0.53999
Centong	1	146
Gondang	3	0.4716
Jatidukuh	2	0.8532
Kalikatir	1	1.1808
Kemasantani	1	4204.8
Padi	1	0.38159
Pohjejer	1	0.23039
Kecamatan Jatirejo	16	5.5401
Gebangsari	1	0.0396
Jembul	6	3.6408
Mojogeneng	1	0.4437
Sumberagung	1	0.1836
Sumberjati	7	1.2324
Kecamatan Jetis	14	3.94621
Jetis	1	0.8568
Kupang	1	1.6452
Mlirip	7	0.70273
Mojolebak	2	0.378

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi Kelurahan/Desa	Jumlah	Sampah yang Terkelola (ton/tahun)
Perning	1	0
Sidorejo	2	0.36348
Kecamatan Kemlagi	4	1.128
Pandankrajan	3	0.9984
Tanjungan	1	0.1296
Kecamatan Kutorejo	38	736.30589
Gedangan	2	0.2304
Jiyu	3	0.9828
Karangasem	1	1.0404
Kepuharum	3	0.378
Kepuhpandak	1	0.072
Payungrejo	1	0.144
Pesanggrahan	7	6.0168
Sampangagung	2	721.24
Sawo	6	0.9408
Simbaringin	6	2.3232
Singowangi	3	0.384
Windurejo	3	2.55349
Kecamatan Mojoanyar	3	2.09399
Jabon	3	2.09399

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi Kelurahan/Desa	Jumlah	Sampah yang Terkelola (ton/tahun)
Kecamatan Mojosari	11	4892.56479
Awang-awang	1	972.36
Belahantengah	2	1228.2
Kauman	1	0.4356
Kebondalem	1	0.08
Modopuro	1	0.30959
Sawahana	2	0.2016
Sumbertanggul	1	2690.78
Wonokusumo	2	0.198
Kecamatan Ngoro	7	3.03
Kunjorowesi	3	1.8048
Sukoanyar	1	0.0612
Tambakrejo	3	1.164
Kecamatan Pacet	4	2425.78175
Cempokolimo	2	2279.62
Pacet	2	146.16175
Kecamatan Pungging	12	5.61898
Balongmasin	1	0.4824
Banjartanggul	1	0.12203
Lebaksono	1	0

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi Kelurahan/Desa	Jumlah	Sampah yang Terkelola (ton/tahun)
Pungging	3	2.25359
Randuharjo	1	1.31376
Tunggal Pager	5	1.4472
Kecamatan Puri	12	10.97039
Balongmojo	1	0.54
Brayung	1	0.78119
Kenanten	1	0.2052
Ketemasdungus	1	0.144
Kintelan	1	0.072
Medali	1	1.548
Mlaten	3	5.3904
Puri	1	0.162
Sumbergirang	1	1.602
Tangunan	1	0.5256
Kecamatan Sooko	11	4.90678
Blimbing Asri	1	1.098
Brangkal	2	0.6696
Jampirogo	1	0.1764
Japan	3	0.4212
Karangkedawang	1	0.2592

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Lokasi Kelurahan/Desa	Jumlah	Sampah yang Terkelola (ton/tahun)
Kedung Maling	2	1.59118
Sambiroto	1	0.6912
Kecamatan Trawas	15	3.3577
Ketapanrame	1	0.09612
Penanggungan	3	0.2268
Selotapak	1	0.1944
Tamiajeng	7	1.84679
Trawas	3	0.99359
Kecamatan Trowulan	30	39322.2336
Kejagan	25	34134.1
Kejagan	1	340.66
Temon	1	0.2736
Trowulan	3	4847.2
Total	208	54191.91871

Residu yang dihasilkan dan sampah yang tidak dapat diolah akan diangkut menuju tempat pembuangan akhir. TPA di Kabupaten Mojokerto terdapat di dua lokasi yaitu TPA Belahan Tengah dan TPA Karangdieng. Berikut skema pengolahan akhir sampah di TPA.

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. SEQ Gambar_2. * ARABIC 12 Diagram

Gambar di atas merupakan skema proses pengolahan dan pemrosesan akhir. Terdapat dua TPA di Belahantengah dan TPA Karangdiyeng. Keduanya menerima residu dari masing-masing TPS. Terdapat konektivitas antar kedua TPA tersebut dimana sampah hasil pemilahan yang berukuran besar di TPA Belahantengah akan diangkut ke TPA Karangdiyeng. TPA Karangdiyeng sendiri memiliki proses pengolahan sampah yang sama dengan TPA Belahantengah. Sampah masuk TPA akan ditimbang. Selanjutnya dilakukan pemilahan yang dilakukan oleh pemulung. Pengelola TPA sendiri tidak memiliki pengolahan lain selain dumping. Hasil pemilahan dengan ukuran kecil akan dilakukan dumping menggunakan alat berat. Sedangkan berukuran besar akan diangkut ke TPA Karangdiyeng dengan proses yang sama. Selanjutnya sampah akan dicacah menggunakan mesin penghancur untuk diproses lanjutan menggunakan proses penggilingan. Tahap terakhir pengomposan akan ditimbun untuk menghasilkan kompos. Selain itu, sampah diolah menjadi ecoenzym menggunakan tangki plastic seperti pada gambar. TPA Karangdiyeng memiliki olahan lanjutan berupa pembibitan. Berikut peta cakupan pelayanan infrastruktur persampahan Kabupaten Mojokerto.

Menurut RPJMN tahun 2020-2024 terdapat capaian visi 2045 ialah melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Adapun highlight sasaran tahun 2024 yang terbagi menjadi 5 sektor antara lain infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, energy & ketenagalistikan, transformasi digital, dan infrastruktur perkotaan. Pada infrastruktur perkotaan salah satu sasaran adalah mencapai 20% pengurangan dan 80% penanganan sampah. Sasaran tersebut dilihat dari akses sampah yang terkelola dengan baik. Berikut tabel persentase capaian dan target yang ditetapkan dalam RPJMN.

Tabel 2. 20 Persentase Capaian dan Target Yang Ditetapkan Dalam RPJMN

Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
		Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Mojokerto			
Penanganan Sampah Perkotaan	80%	82,0%	75,0%	73,0%	96,0%	-21,0%	-23,0%
Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	18,0%	25,0%	26,0%	0,03%	25,0%	26,0%

Sumber: Analisis, 2022.

Seperti yang sudah disebutkan dan digambarkan pada skema serta tabel di atas bahwa capaian Kabupaten Mojokerto untuk pengurangan sejumlah 0,03% sedangkan penanganan sampah sebesar 96,0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada eksisting capaian untuk pengelolaan sampah belum mencapai target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tidak hanya itu, capaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki target pengurangan 25% dan penanganan 75%. Dari target capaian di tingkat daerah pun masih belum tercapai. GAP capaian saat ini dengan target pada tahun 2024 untuk pengurangan cukup besar yaitu 24,7% sedangkan untuk penanganan sudah melebihi target dimana capaian saat ini sebesar 84,1% yang berarti 9,1% lebih tinggi dari target RPJMD Kabupaten Mojokerto. Hasil tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan pada instrumen PSSK Kabupaten Mojokerto.

Berikut merupakan tabel persentase capaian yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 21 Persentase Capaian dan Target Yang Ditetapkan Dalam RPJMD

Indikator	Capaian Pengelolaan Sampah
-----------	----------------------------

	Target		Capaian	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Timbulan Sampah	841068 m3	100	258460 m3	30.7300
Pengurangan	210267.1 m3	25	213567 m3	25.3924
Penanganan	630801 m3	75	44892.8 m3	5.3376

Sumber : DLH Kabupaten Mojokerto, 2021

Target untuk pengurangan dan penanganan masih sama yaitu 75% untuk penanganan dan 25% untuk pengurangan. Perbedaan yang cukup jelas ada pada capaian saat ini. Pada analisis gap capaian di atas didasarkan pada hasil pengisian instrumen SSK. Tabel di atas menunjukkan pengurangan sebesar 25% dan penanganan sebesar 5,3%. Cukup berbanding terbalik dari analisis di atas. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa capaian pengelolaan sampah khususnya pada penanganan telah mencapai 84,1%. Nilai yang cukup jauh berbeda. Adapun rantai layanan persampahan dari hasil perhitungan timbulan sampah pada instrument penyusunan.

Tabel 2. 22 Persentase Capaian dan Target Yang Ditetapkan Dalam RPJMD

	Ton/tahun	Persentase(%)
Total Timbulan sampah perkotaan	204319	100,00%
Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	1221,67	0,60%
Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	162,03	0,079%
Jumlah sampah terolah di TPST	0	0,00%
Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	2850,57	1,40%
Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	0	0,00%
Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpulan tidak langsung (Rumah - TPS - TPA)	195047,56	95,46%
Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	0	0,00%
Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	0	0,00%
Jumlah total sampah diproses di TPA	197898,13	96,86%
Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga)	5037	2,47%

Sumber: Analisis, 2022.

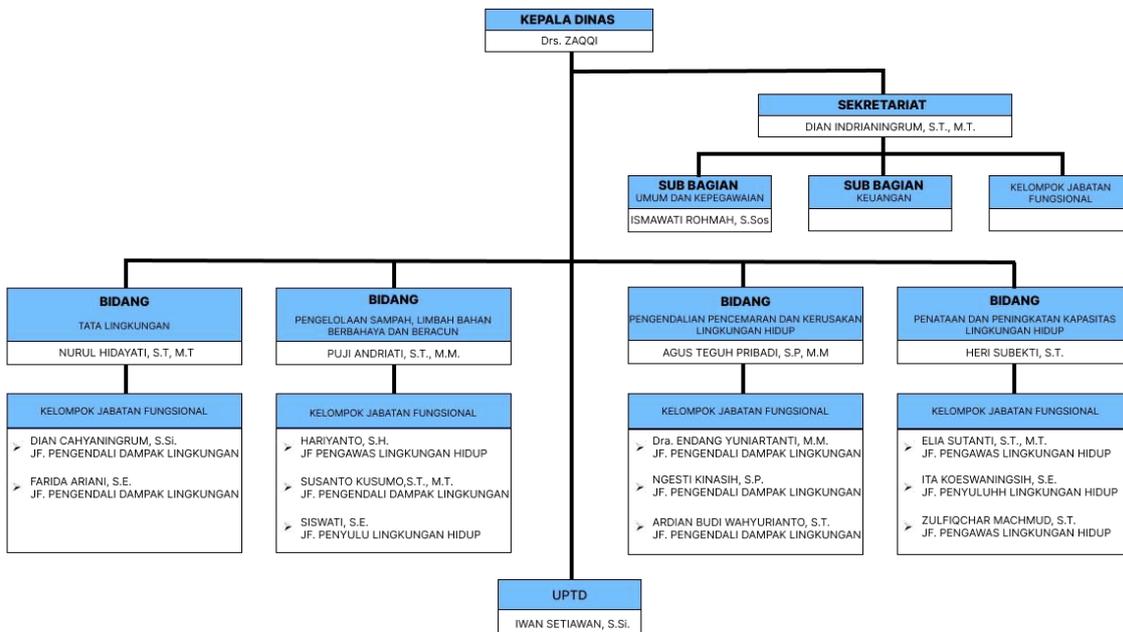
Hasil capaian pengelolaan sampah yang bersumber dari RPJMD Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan hasil perhitungan pengisian instrumen SSK didapatkan tabel rantai layanan sampah seperti di atas cukup berbeda. Jumlah sampah tereduksi dengan proses 3R

sebanyak 1221,67 ton/tahun atau sebesar 0,6%. Dari infrastruktur TPS3R menghasilkan residu yang diangkut ke TPA sebanyak 1,40%. Adapula sampah yang langsung diangkut ke TPA tanpa proses pengumpulan sementara ataupun pengolahan terlebih dahulu yang dinilai cukup tinggi sebanyak 95,46%. Itu mengapa persentase penanganan sampah mencapai 96,86% di TPA. Adapun sampah yang tidak mengalami pengelolaan sama sekali sebanyak 2,47%. Hal tersebut disebabkan oleh sangat rendahnya kegiatan pengelolaan di kedua infrastruktur persampahan tersebut.

(2) Kelembagaan dan Kebijakan/ Peraturan

A. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pada kelembagaan pemerintah daerah di Kabupaten Mojokerto dilakukan penjelasan ringkas mengenai pemetaan institusi yang berwenang dalam pengelolaannya. Tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan hidup. Adapun beberapa kerjasama dengan instansi lain dalam pengelolaan persampahan. Salah satunya dengan BAPPEDA terkait keuangan dan untuk infrastruktur persampahan TPS3R bersama dengan PUPR. PUPR bertugas untuk melakukan pembangunan. Residu yang dihasilkan diangkut ke TPA dan menjadi peran dari DLH. DLH bersama pemerintah desa melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dalam bentuk pembinaan, penyuluhan, dan terkait desa kalpataru. Struktur organisasi instansi tersebut sebagai berikut.



Gambar 2. 14 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

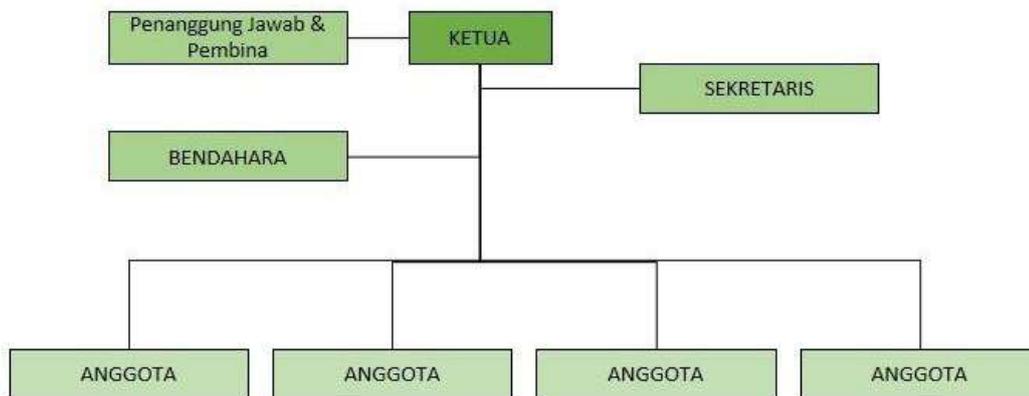
Pada struktur organisasi Instansi DLH Kabupaten Mojokerto pengelolaan persampahan ditangani oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan pertamanan. Terdapat tiga seksi pada bidang tersebut. Dua seksi yaitu Seksi Pengelolaan Sampah dan Seksi Pengurangan Sampah memiliki tugas terkait pengelolaan sampah. Untuk kemudian memiliki konektivitas dengan UPT di daerah.

Tabel 2. 23 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Pemerintah Kabupaten	Swasta	Masyarakat
PERENCANAAN			
<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran Database Persampahan, termasuk cakupan pelayanan, data TPST, TPS3R, Bank Sampah dan Data Pengepul. 	DLH		
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Masterplan Persampahan 	BAPPEDA		
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) 	DLH		
<ul style="list-style-type: none"> Studi/ kajian tentang komposisi, kualitas dan kuantitas sampah Kabupaten 	BAPPEDA		
<ul style="list-style-type: none"> Studi/ kajian pemanfaatan sampah sebagai sumber energi terbarukan 	BAPPEDA		
<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan adipura 	DLH		Kecamatan
PENGADAAN SARANA			
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Tanah TPA 	DPRKP2		
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan TPA/ Controlled Landfill Baru 	DPUPR	CSR	
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (Excavator, Loader) 	DPUPR	CSR	
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan dan Pengenalan Keranjang Sampah Takakura 	DLH		
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Alat Angkut menuju TPA (gerobak bermotor, mobil pick up dan dump truck) 	DLH	CSR	
PENGLOLAAN			
<ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS 	DLH		
<ul style="list-style-type: none"> Mengelola sampah di TPS 	DLH	CSR	
<ul style="list-style-type: none"> Mengangkut sampah dari TPS ke TPA 	DLH		
<ul style="list-style-type: none"> Mengelola TPA 	DLH	CSR	
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemilahan sampah 	DLH		KSM TPS3R
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penarikan Retribusi sampah 	DLH		
<ul style="list-style-type: none"> Memberikan izin pengelolaan sampah 	DLH	CSR	
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Perda Pengelolaan Sampah dan Perda UPTD Pengelolaan Persampahan/ TPA 	BAPPEDA DAN DLH		
<ul style="list-style-type: none"> Mengatur prosedur penyediaan layanan Sampah (Pangkutan, personil, peralatan, dll) 	DLH		
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah 	DLH		
MONITORING DAN EVALUASI			
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan Persampahan skala kota/kabupaten 	DLH DAN BAPPEDA		
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan Persampahan 	DLH DAN BAPPEDA		
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas layanan persampahan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan 	DLH DAN BAPPEDA		

B. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat menjelaskan terkait pemetaan kelembagaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak serta merta secara langsung dan keseluruhan melakukan pengelolaan persampahan hanya pada satu pusat. Dibutuhkan adanya peran serta dari pemerintah daerah infrastruktur persampahan menindaklanjuti pengelolaannya. Dengan begitu pemerintah desa membentuk suatu kelembagaan masyarakat untuk mengolah persampahan melalui pengelolaan infrastruktur tersebut. Kelembagaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto dibentuk untuk pengelolaan TPS3R, TPST, dan TPA. struktur organisasi KSM (Kelembagaan Swadaya Masyarakat) sebagai berikut.



Gambar 2. 15 Struktur Organisasi Kelembagaan Swadaya Masyarakat (KSM)

Berikut tabel kelembagaan baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat pengelola infrastruktur persampahan di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 24 Kelembagaan Pengelola Infrastruktur Persampahan

Lokasi TPA	Lembaga Pengelola
TPA Belahantengah	DLH Kabupaten Mojokerto
TPA Karangdieng	DLH Kabupaten Mojokerto
Lokasi TPST	Lembaga Pengelola
TPST Seduri	DLH Kabupaten Mojokerto
TPST Kauman	Koordinator TPST Kauman
TPST Lebaksono	DLH Kabupaten Mojokerto
Lokasi TPS3R	Lembaga Pengelola
TPS3R Ds. Tampungrejo Kec. Puri	Tidak ada pengelola
TPS3R Ds. Belahantengah Kec. Mojosari	KSM TPS3R Belahantengah
TPS3R Ds. Petak Kec. Pacet	KSM Petak Berseri
TPS3R di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan (DAK)	Sudah tidak operasional

Lokasi TPA	Lembaga Pengelola
TPS3R di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan (DAK)	KSM TPS3R Trowulan
TPS3R di Desa Sooko Kecamatan Sooko (DAK)	Belum Operasional
TPS3R di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko (DAK)	BUMDes Jampirogo
TPS3R di Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo (DAK)	Belum Operasional
TPS3R di Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo (DAK)	Belum Operasional
TPS3R di Desa Purwojati Kecamatan Ngoro (DAK)	KSM Purowasri
TPS3R di Desa Padusan Kecamatan Pacet (DAK)	Belum Operasional
TPS3R Desa Kupang Kec. Jetis (DAK)	Belum Operasional
TPS3R Desa Trawas Kec. Trawas (DAK)	Belum Operasional
TPS3R Desa Kedungudi Kec. Trawas (DAK)	KSM Griya Nuansa Kedungudi

Pemerintah Kabupaten Mojokerto diketahui belum memiliki kelembagaan non pemerintah yang bekerjasama. Pengelolaan sanitasi dan persampahan di Kabupaten Mojokerto masih dilakukan secara mandiri. Salah satu contoh dari penyedotan lumpur tinja tidak menggunakan jasa ataupun bekerjasama dengan kelembagaan non pemerintah.

C. Regulasi

Pada regulasi ini akan diberikan penjelasan ringkas mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait persampahan yang terdapat di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 25 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No.	Komponen Regulasi	Keterangan
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Ada
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Ada
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah)	Ada
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	Ada
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	Ada
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	Ada

No.	Komponen Regulasi	Keterangan
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	Ada
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	Ada
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	Ada
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	Ada
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Ada
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	<p>Ada: Peraturan Bupati Mojokerto No. 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto</p> <p>Belum Ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan tentang Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. • Peraturan Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis • Peraturan tentang Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah. • Peraturan tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pengelola Sampah. • Peraturan tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. • Peraturan tentang Penerapan Sanksi Administratif bagi Pengelola Sampah • Peraturan tentang Penempatan dan/atau Pengolahan Sampah Spesifik. • Peraturan tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif kepada Perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan Pengelolaan Sampah.

(3) Komunikasi dan Media

Kegiatan promosi terkait higienitas dan sanitasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan melakukan penyuluhan secara langsung ke daerah-daerah yang memiliki permasalahan sanitasi dan higienitas. Penyuluhan tersebut bisa dalam bentuk sosialisasi ataupun pelatihan yang nantinya berupa praktik dari higienitas dan sanitasi. Dinas kesehatan memberikan perhatiannya saat ini pada lisensi halal. Selain itu perihal sanitasi dan hygiene dinas kesehatan juga sedang berfokus pada penerbitan sertifikat layak sehat. UMKM yang baru berjalan dan yang belum memiliki sertifikat tersebut wajib melakukan pemenuhan layak sehat. Promosi terkait hal tersebut dikomunikasikan melalui banner yang dipajang di Dinas Kesehatan. Tidak hanya itu, web Dinas Kesehatan Mojokerto juga memuat promosi terkait hygiene dan sanitasi yang saat baru mengangkat isu terkait layak sehat bagi UMKM Kabupaten Mojokerto.

Air limbah merupakan hasil dari kegiatan mandi cuci kakus. Dalam hal ini pula Dinas Kesehatan memiliki peran untuk penanggulangannya. Dalam rangka perwujudan sanitasi layak tentu pemenuhan 100% ODF menjadi syarat yang harus dipenuhi. Terkait air limbah ini Dinas Kesehatan melakukan komunikasi secara langsung pada daerah yang terindikasi terdapat BABS. Media yang digunakan masih belum bersifat dalam jaringan. Penyuluhan yang dilakukan membahas hal-hal tentang kebiasaan sanitasi yang baik. Selain itu, pembentukan persepsi masyarakat yang juga menjadi salah satu faktor adanya BABS menjadi indikator penting dalam kegiatan komunikasi tentang air limbah dan kaitannya dengan hygiene serta sanitasi di Kabupaten Mojokerto.

2.2.3 Profil Drainase Lingkungan

(1) Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

Genangan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto diakibatkan oleh beberapa aspek yaitu: aspek topografis, aspek teknis dan aspek sosial. Kondisi topografi yang datar cukup sulit bagi air untuk mengalir cepat sehingga mudah menimbulkan genangan. Keterlibatan masyarakat setempat dalam pembuangan sampah di saluran dan sungai memberikan tingkat kesulitan yang cukup bagi air untuk mengisi badan air dan mengalirkan debit sebagaimana mestinya. Bangunan-bangunan non teknis juga ditemukan di beberapa titik sehingga menghambat laju aliran. Bangunan-bangunan baik yang bersifat teknis pun seringkali tidak mengindahkan pola struktur yang seharusnya dibangun di daerah aliran dan seringkali memangkas badan air sehingga menyebabkan menyempitnya penampang dan menurunkan kapasitas aliran yang ada. Tidak terpeliharanya saluran menjadi pemicu utama penurunan fungsi saluran sehingga tak mudah bagi air untuk mengalir dan menimbulkan genangan. Sarana jalan tidak semuanya memiliki saluran tepi jalan. Saluran tepi jalan yang ada tidak semua memiliki side inlet menambah sarana terjadinya genangan di beberapa titik.

Lokasi genangan di Kabupaten Mojokerto terdapat di 7 kecamatan dengan luas genangan yang bervariasi mulai dari 0,10 Ha sampai dengan 34,09 Ha. Lokasi dengan luas genangan paling besar adalah Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar. Ketinggian genangan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto rata-rata sekitar 30 cm dan lama genangan kurang dari 2 jam. Genangan ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas drainase untuk mengalirkan air hujan.

Berikut adalah luas genangan pada masing-masing desa dan Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 26 Luas dan Lokasi Genangan Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa	Luas Genangan (Ha)
Bangsar	Mejoyo	9,081834
	Ngrowo	24,59572
	Pekuwon	30,52623
	Salen	22,63437
	Sidomulyo	1,01002
	Sumbertebu	1,248174
	Tinggarbuntut	32,8924
Mojosari	Jotangan	34,09827
	Kebondalem	5,933515
	Modopuro	46,99799
	Randubango	8,422462
Ngoro	Jasem	15,39855
	Kembangsri	27,54863
	Purwojati	1,273869

Kecamatan	Desa	Luas Genangan (Ha)
Sooko	Kedungmaling	25,0322
	Klinterejo	16,08908
	Sambiroto	24,12041
Mojoanyar	Gebangmalang	2,798933
	Jumeneng	6,282901
	Kepuhanyar	24,59572
	Sadartengah	8,422462
Jatirejo	Tawangsari	10,10437
	Sumberjati	2,578978
Pungging	Kembangringgit	18,57482
Trowulan	Balongwono	16,08908

(2) Peta Lokasi Genangan

(3) Sistem dan Infrastruktur

Sistem drainase yang ada di kota Mojokerto saat ini meliputi saluran drainase tersier, sekunder, primer dan badan air penerima adalah Kali Sadar dan Kali Brantas.

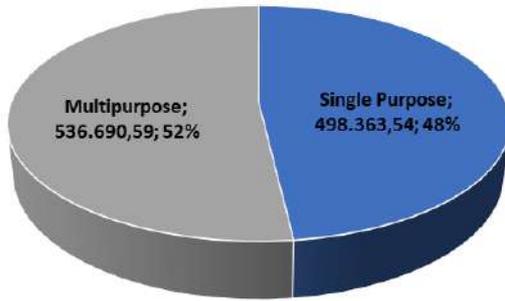
Adapun pembagian panjang drainase berdasarkan fungsi serta perkerasan konstruksi saluran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27 Panjang Saluran Drainase Sekunder Eksisting Berdasarkan Fungsi dan Perkerasan

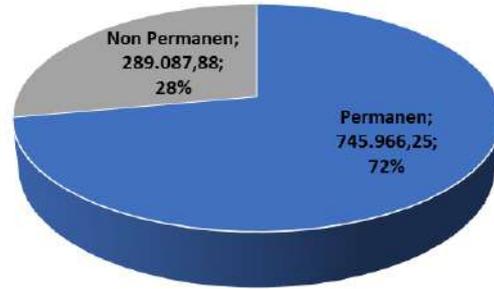
Kecamatan	Berdasarkan Fungsinya				Berdasarkan Perkerasannya			
	Single Purpose		Multipurpose		Permanen		Non Permanen	
	Panjang (m)	Persentase (%)	Panjang (m)	Persentase (%)	Panjang (m)	Persentase (%)	Panjang (m)	Persentase (%)
Jatirejo	42.689,88	48,4%	45.516,32	51,6%	88.206,20	100,0%	0,00	0,0%
Gondang	32.983,98	44,7%	40.868,87	55,3%	43.052,36	58,3%	30.800,49	41,7%
Pacet	11.003,24	78,6%	2.996,44	21,4%	9.604,30	68,6%	4.395,38	31,4%
Trawas	5.226,71	87,0%	780,61	13,0%	4.540,51	75,6%	1.466,81	24,4%
Ngoro	20.023,74	92,6%	1.591,49	7,4%	20.895,26	96,7%	719,97	3,3%
Punggging	23.801,39	77,0%	7.118,50	23,0%	26.249,44	84,9%	4.670,45	15,1%
Kutorejo	58.623,13	61,7%	36.413,75	38,3%	60.959,34	64,1%	34.077,54	35,9%
Mojosari	42.564,19	63,2%	24.827,29	36,8%	60.558,43	89,9%	6.833,05	10,1%
Bangsals	10.869,79	23,1%	36.170,19	76,9%	35.632,48	75,7%	11.407,50	24,3%
Mojoanyar	17.089,61	41,9%	23.686,11	58,1%	35.244,29	86,4%	5.531,43	13,6%
Dlanggu	34.877,62	32,9%	71.100,46	67,1%	57.831,54	54,6%	48.146,54	45,4%
Puri	83.838,25	67,1%	41.055,50	32,9%	120.960,81	96,9%	3.932,94	3,1%
Trowulan	62.819,56	69,2%	28.012,45	30,8%	46.679,68	51,4%	44.152,33	48,6%
Sooko	33.765,12	65,9%	17.481,98	34,1%	41.687,49	81,3%	9.559,61	18,7%
Gedek	10.866,45	28,6%	27.087,33	71,4%	29.005,69	76,4%	8.948,09	23,6%
Kemlagi	3.594,51	7,5%	44.294,60	92,5%	27.351,20	57,1%	20.537,91	42,9%
Jetis	1.827,47	6,6%	25.724,86	93,4%	17.010,59	61,7%	10.541,74	38,3%
Dawar blandong	1.898,90	3,0%	61.963,84	97,0%	20.496,64	32,1%	43.366,10	67,9%
Kabupaten Mojokerto	498.363,54	48,1%	536.690,59	51,9%	745.966,25	72,1%	289.087,88	27,9%

Sumber: Dokumen Penyusunan Informasi/Database Jaringan Drainase Kabupaten Mojokerto Tahun 2017

PANJANG SALURAN DRAINASE SEKUNDER BERDASARKAN FUNGSINYA (meter;%)



PANJANG SALURAN DRAINASE SEKUNDER BERDASARKAN PERKERASANNYA (meter;%)



Gambar 2. 17 Grafik Panjang Saluran Drainase Berdasarkan Fungsi dan Perkerasannya

Sumber: Dokumen Penyusunan Informasi/Database Jaringan Drainase Kabupaten Mojokerto Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan fungsinya saluran drainase sekunder di Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi dua yaitu *single purpose* dan *multipurpose*. Total panjang saluran drainase *single purpose* atau saluran yang memiliki fungsi murni sebagai saluran drainase adalah sebesar 48,1% dari total saluran drainase eksisting atau sepanjang 498,36 km. Sedangkan, total panjang saluran drainase *multipurpose* atau saluran drainase yang memiliki multifungsi dengan kepentingan irigrasi adalah sebesar 51,9% atau sepanjang 536,69 km. Berdasarkan perkerasannya, sebesar 72,07% atau sepanjang 745,96 km saluran drainase di Kabupaten Mojokerto telah memiliki perkerasan kontruksi permanen. Sedangkan, sisa saluran drainase yaitu sebesar 27,93% atau sepanjang 289,08 km masih memiliki kontruksi tidak permanen. Selain berdasarkan fungsi dan jenis perkerasannya, kondisi eksisting saluran drainase yang terdapat di Kabupaten Mojokerto dapat digambarkan berdasarkan kondisi saluran yang terbagi dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak berat. Panjang saluran drainase berdasarkan kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut:

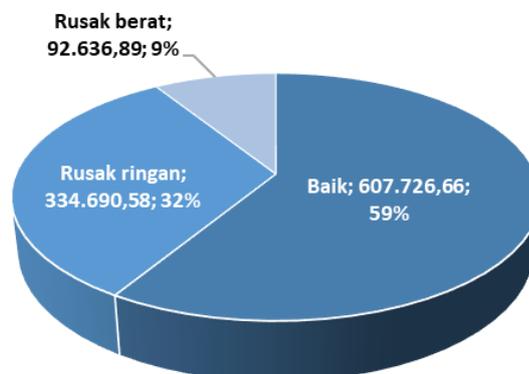
Tabel 2. 28 Panjang Saluran Drainase Sekunder Berdasarkan Kondisinya

Kecamatan	Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisinya					
	Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	Panjang (m)	Persentase	Panjang (m)	Persentase	Panjang (m)	Persentase
Jatirejo	18.722,46	21,2%	69.483,74	78,8%	0,00	0,0%
Gondang	71.726,60	97,1%	2.126,25	2,9%	0,00	0,0%
Pacet	8.207,69	58,6%	3.893,68	27,8%	1.898,31	13,6%
Trawas	3.032,19	50,5%	1.798,09	29,9%	1.177,04	19,6%
Ngoro	10.595,18	49,0%	8.823,77	40,8%	2.196,28	10,2%

Kecamatan	Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisinya					
	Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	Panjang (m)	Persentase	Panjang (m)	Persentase	Panjang (m)	Persentase
Pungging	12.773,75	41,3%	13.710,39	44,3%	4.435,75	14,3%
Kutorejo	85.360,67	89,8%	9.652,36	10,2%	23,85	0,0%
Mojosari	62.755,04	93,1%	4.636,44	6,9%	0,00	0,0%
Bangsals	8.599,03	18,3%	22.537,10	47,9%	15.903,85	33,8%
Mojoanyar	3.972,94	9,7%	15.486,60	38,0%	21.316,18	52,3%
Dlanggu	105.163,71	99,2%	814,37	0,8%	0,00	0,0%
Puri	4.171,92	3,3%	119.687,56	95,8%	1.034,27	0,8%
Trowulan	89.314,58	98,3%	1.517,43	1,7%	0,00	0,0%
Sooko	27.358,01	53,4%	18.904,43	36,9%	4.984,66	9,7%
Gedek	28.260,05	74,5%	6.204,03	16,3%	3.489,70	9,2%
Kemlagi	14.595,59	30,5%	14.905,60	31,1%	18.387,92	38,4%
Jetis	17.423,66	63,2%	7.495,42	27,2%	2.633,25	9,6%
Dawar blandong	35.693,59	55,9%	13.013,32	20,4%	15.155,83	23,7%
Kabupaten Mojokerto	607.726,66	58,7%	334.690,58	32,3%	92.636,89	8,9%

Sumber: Dokumen Penyusunan Informasi/Database Jaringan Drainase Kabupaten Mojokerto Tahun 2017

PANJANG SALURAN DRAINASE SEKUNDER BERDASARKAN KONDISINYA (meter;%)



Gambar 2. 18 Grafik Panjang Saluran Drainase Berdasarkan Kondisinya

Sumber: Dokumen Penyusunan Informasi/Database Jaringan Drainase Kabupaten Mojokerto Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa kondisi saluran drainase yang terdapat di Kabupaten Mojokerto memiliki kondisi beragam yaitu kondisi saluran baik, saluran rusak ringan, dan saluran rusak berat. Saluran drainase sekunder yang memiliki kondisi baik adalah sebanyak 59% dari total panjang saluran atau 607,72 km. saluran drainase dengan kondisi rusak ringan sebesar 32% atau 334,69 km dan saluran drainase dengan kondisi rusak berat sebesar 9% atau 92,63 km. Kondisi saluran drainase dengan rusak ringan dan berat tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan potensi-potensi genangan ataupun dapat menimbulkan banjir pada masa datang.

(4) Kelembagaan dan Kebijakan/ Peraturan

Pengelolaan drainase Kabupaten Mojokerto termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto di bawah Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Penyuluhan Sumber Daya Air, Seksi Perencanaan dan Pengendalian, dan Seksi Penyehatan Lingkungan.

2.3 Area Berisiko dan Permasalahan Sanitasi

2.4.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

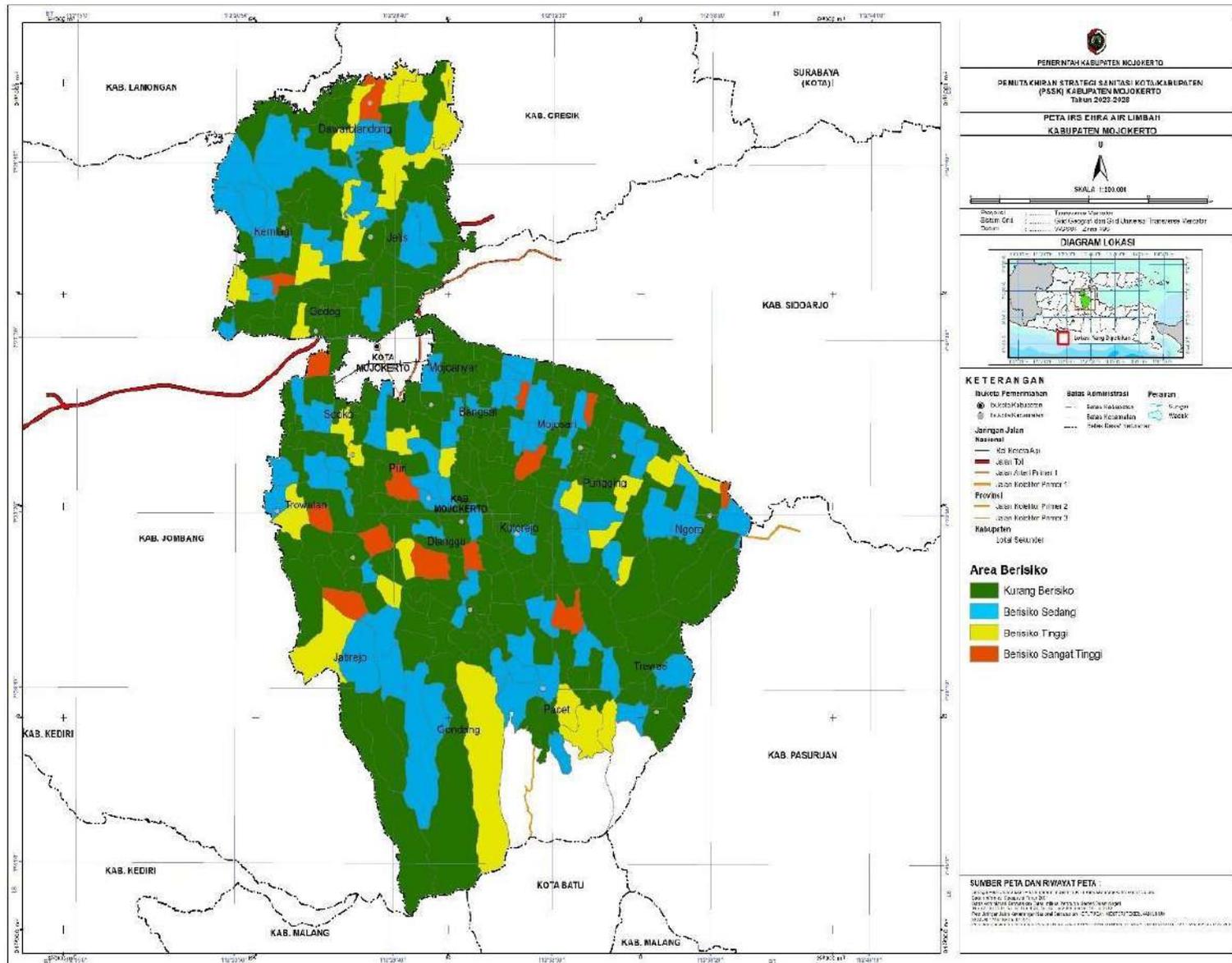
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa ada beberapa desa yang berisiko tinggi terkait pengelolaan air limbah di Kabupaten Mojokerto. Desa yang memiliki risiko air limbah Sangat Tinggi berada pada Kecamatan Jetis, sedangkan desa yang memiliki risiko air limbah Tinggi berada pada Kecamatan Dawar Blandong. Berikut adalah rincian desa tersebut.

Tabel 2. 29 Area Berisiko Air Limbah Domestik

No	Risiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Risiko 4 (Sangat Tinggi)	Jetis	Bendung
2	Risiko 3 (Tinggi)	Dawar Blandong	Cendoro

Sumber: Analisis, 2022.

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 19 Peta Area Berisiko Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa permasalahan baik terkait aspek teknis maupun non teknis. Permasalahan teknis diantaranya terkait kelembagaan serta sarana prasarana limbah, dalam pengelolaan air limbah.

Permasalahan yang terkait aspek non teknis diantaranya terkait regulasi daerah, kapasitas SDM serta partisipasi masyarakat. Berikut adalah rincian permasalahan area berisiko air limbah domestik Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 30 Permasalahan Mendesak Sektor Air Limbah

No	Permasalahan Mendesak
Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana	
1	Infrastruktur air limbah yaitu IPAL dan MCK komunal yang sudah terbangun sebagian tidak berfungsi ataupun mengalami kerusakan, yaitu 1 unit di IPAL & MCK komunal Ds. Jambuwok Kec. Trowulan.
2	Bangunan IPLT yang tersedia tidak berfungsi atau mengalami kerusakan, sehingga berperan pada pencemaran lingkungan akibat pembuangan isi tangki septik sebesar 99,0% (menurut Kajian EHRA 2022)
3	Tidak tersedianya layanan mengangkut lumpur tinja dari tangka septik komunal/individu.
4	Cakupan pelayanan IPAL dan MCK komunal masih terbatas, di mana sambungan rumah (SR) masih mencakup 0,2%, dan akses belum layak masih mencapai 4,3%.
Aspek Peraturan	
1	Belum memiliki Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik
2	Belum memiliki Perda UPTD IPLT
3	Belum memiliki Perda OPD Pengelola Air Limbah Domestik
Aspek Kelembagaan	
1	Belum ada kejelasan terkait siapa penanggung jawab terkait pengelolaan dan pengoperasian IPLT.
2	Belum ada legalitas lembaga masyarakat yang fokus pada air limbah
3	Belum adanya UPT pengelola IPLT dan pengelola air limbah domestik
Aspek Keuangan dan Peran Serta Masyarakat	
1	Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan untuk pemeliharaan IPAL dan MCK Komunal berupa swadaya masyarakat ataupun partisipasi dunia usaha/swasta
2	Jumlah SDM pengelola IPAL dan MCK komunal belum memadai
3	Kurangnya kesadaran masyarakat di beberapa cakupan wilayah IPAL dan MCK komunal untuk mengelola IPAL dan MCK komunal
4	Pelibatan pihak swasta terkait sistem pengelolaan air limbah belum diberdayakan

No	Permasalahan Mendesak
5	Kurangnya peran media dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye terkait sanitasi
6	Adanya ancaman pencurian fasilitas yang terdapat pada MCK komunal

Sumber: Analisis, 2022.

2.4.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

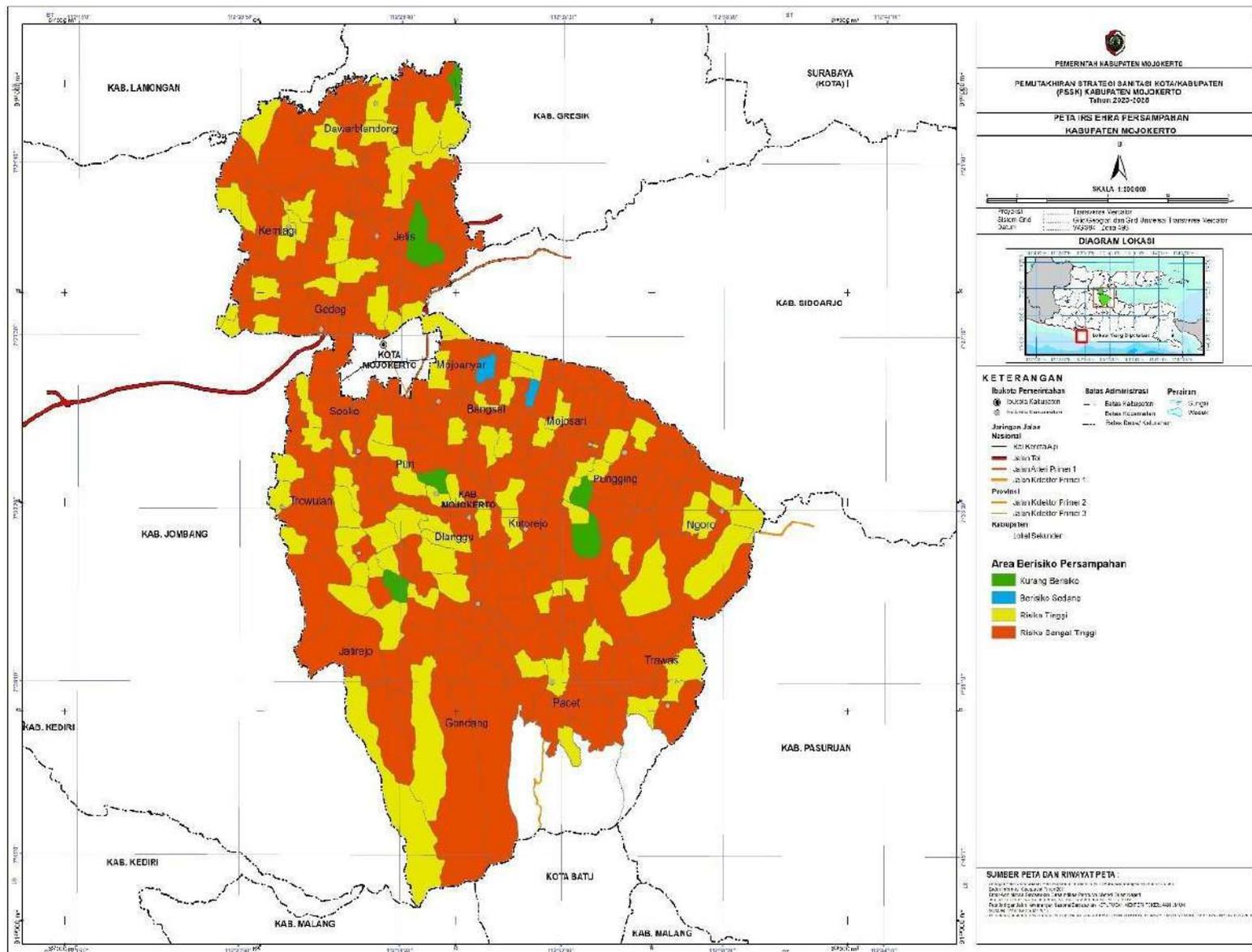
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa ada beberapa desa yang berisiko tinggi terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten Mojokerto. Desa yang memiliki risiko persampahan Sangat Tinggi berada pada Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Jetis. Sedangkan desa yang memiliki risiko persampahan Tinggi berada pada Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Dawar Blandong. Berikut adalah rincian desa tersebut.

Tabel 2. 31 Area Berisiko Persampahan

No	Risiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Risiko 4 (Sangat Tinggi)	Jatirejo	Sumberagung
		Jetis	Bendung
2	Risiko 3 (Tinggi)	Mojosari	Mojosari
		Dawar Blandong	Cendoro

Sumber: Analisis, 2022.

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 20 Peta Area Berisiko Persampahan Kabupaten Mojokerto

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa permasalahan baik terkait aspek teknis maupun non teknis. Permasalahan teknis diantaranya terkait kelembagaan serta operasional sarana prasarana persampahan.

Permasalahan yang terkait aspek non teknis diantaranya terkait regulasi pengelolaan dan retribusi sampah, unit teknis pengelola (UPT), kapasitas SDM serta partisipasi masyarakat. Berikut adalah rincian permasalahan area berisiko air limbah domestik Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 32 Permasalahan Mendesak Sektor Persampahan

No	Permasalahan Mendesak
Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana	
1	Beberapa bangunan TPS3R terbengkalai tidak terawat, sebanyak 8 unit, di lokasi berikut: 1) Desa Tampungrejo, Kec. Puri, 2) Desa Jambuwok Kec. Trowulan 3) Desa Trowulan, Kec. Trowulan 4) Desa Jampirogo Kec. Sooko 5) Desa Gebangsari, Kec. Jatirejo 6) Desa Gedangan Kec. Kutorejo 7) Desa Padusan Kec. Pacet 8) Desa Kupang Kec. Jetis
2	Banyak infrastruktur persampahan yang belum beroperasi dan berpengaruh pada cakupan pelayanan
3	Kegiatan pemilahan belum dilakukan oleh pengelola hanya dilakukan oleh pemulung
4	Tidak adanya kegiatan perawatan mesin pada infrastruktur
5	Usia Pakai TPA Belahantengah sudah maksimal (20 tahun, Tahun 1990-2022), sehingga perlu peninjauan ulang dan rencana pengadaan TPA baru.
6	Terkait TPA Karangdiyeng: a. minimnya infrastruktur pengelolaan sampah b. minimnya anggaran pembangunan, operasi dan pemeliharaan pengelolaan sampah b. kurangnya petugas pengelolaan sampah
Aspek Peraturan	
1	Belum memiliki Perda UPTD Pengelolaan Persampahan/ TPA dan turunannya
2	Terhambatnya penambahan petugas pengelolaan sampah akibat adanya pertauran terkait asn
Aspek Kelembagaan	

No	Permasalahan Mendesak
1	Terdapat infrastruktur dengan pengelola yang aktif tidak dibekali alat atau bantuan operasional
2	Masalah pencurian fasilitas di infrastruktur persampahan contohnya pompa air
Aspek Keuangan dan Peran Serta Masyarakat	
1	Pendanaan bermasalah baik dari pemerintah daerah maupun iuran warga untuk berjalannya infrastruktur persampahan
2	Rendahnya kesadaran warga akan pentingnya pengolahan sampah
3	Pelibatan pihak swasta terkait sistem pengelolaan air limbah belum diberdayakan
4	Kurangannya peran media dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye terkait sanitasi

Sumber: Analisis, 2022.

2.4.3 Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

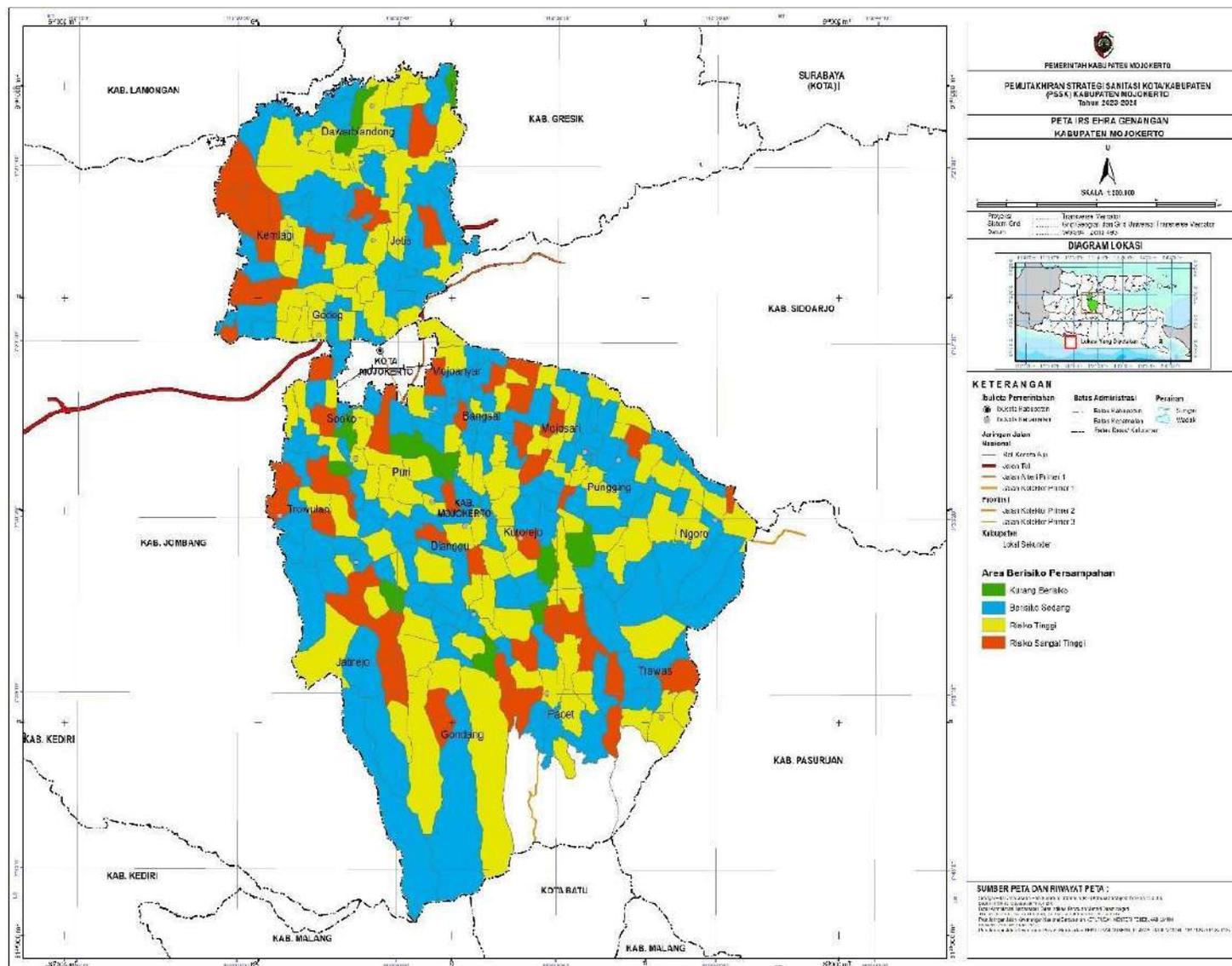
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa ada beberapa desa yang berisiko tinggi terkait pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Mojokerto. Desa yang memiliki risiko persampahan Sangat Tinggi berada pada Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Puri dan Kecamatan Jetis. Sedangkan desa yang memiliki risiko drainase lingkungan Tinggi berada pada Kecamatan Jatirejo, Pacet, Pungging, Mojosari, Bangsal, Gedek, Kemlagi, Jetis dan Kecamatan Dawar Blandong. Berikut adalah rincian desa-desa yang terdapat dalam kecamatan tersebut.

Tabel 2. 33 Area Berisiko Drainase

No	Risiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Risiko 4 (Sangat Tinggi)	Jatirejo	Sumberagung
		Puri	Banjaragung
		Jetis	Bendung
2	Risiko 3 (Tinggi)	Jatirejo	Dinoyo
		Pacet	Bendunganjati
		Pungging	Tunggalpager
		Mojosari	Mojosari
		Bangsal	Mejoyo
		Gedek	Beratwetan
		Kemlagi	Mojojajar
			Mojowiryo
			Kemlagi
			Mojodowo
		Jetis	Canggu
Dawar Blandong	Cendoro		
	Suru		

Sumber: Analisis, 2022.

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027



Gambar 2. 21 Peta IRS EHRA Drainase Lingkungan Kabupaten Mojokerto

Tabel 2. 34 Permasalahan Mendesak Sektor Drainase Lingkungan

No	Permasalahan Mendesak
Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana	
1	Saluran lingkungan tidak memiliki hulu dan hilir. Artinya saluran yang ada tidak terhubung satu terhadap yang lain dan hanya berputar di lingkungan tersebut, sehingga menyebabkan genangan pada lingkungan permukiman sebesar 416,35 Ha.
2	Tidak adanya saluran tepi jalan di beberapa bagian ruas jalan. Saluran drainase dengan kondisi rusak ringan sebesar 32% atau 334,69 km dan saluran drainase dengan kondisi rusak berat sebesar 9% atau 92,63 km
3	Adanya bangunan-bangunan yang yang memangkas badan air sehingga terjadi penyempitan penampang dan menurunkan fungsi saluran
4	Terdapat tumpukan sampah dan sedimen di dalam saluran serta tumbuh-tumbuhan yang dibiarkan menutup saluran
Aspek Peraturan	
1	Kurangnya sosialisasi peraturan daerah terkait drainase lingkungan
Aspek Kelembagaan	
1	Kurangnya Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase
Aspek Keuangan dan Peran Serta Masyarakat	
1	Rendahnya akses informasi dan keterlibatan/pemberdayaan masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi saluran
2	Warga seringkali membuat keputusan sendiri dalam membuat bangunan yang seringkali memangkas badan air, seperti pondasi atau berm

Sumber: Analisis, 2022

BAB III

KERANGKA

PENGEMBANGAN SANITASI



Bab ini menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup minimum informasi: Visi dan misi Sanitasi, Tahapan Pengembangan Sanitasi (Sistem dan zonasi), tujuan dan sasaran sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

3.1 VISI DAN MISI SANITASI

Perumusan visi dan misi sanitasi berisi penjelasan singkat mengenai visi misi sanitasi yang telah dimutakhirkan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten/kota terbaru, yaitu RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026. Visi dan misi sanitasi dirumuskan berdasarkan kajian eksisting dan analisis wilayah studi yang dikolaborasikan dengan usulan anggota Pokja PKP Kabupaten Mojokerto serta Fasilitator Provinsi.

Dengan tersusunnya visi dan misi sanitasi, maka arahan strategi dan program dapat terarah dan tersusun sesuai dengan kebutuhan prioritas penanganan.

Visi dan misi sanitasi dirinci berdasarkan masing-masing sektor, yaitu sektor air limbah, sektor persampahan dan sektor drainase lingkungan. Visi sanitasi kemudian akan diturunkan menjadi beberapa misi yang didasarkan pada potensi dan masalah yang tersusun dalam komponen SWOT.

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Mojokerto

Visi Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026	Misi Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026	Visi Sanitasi Kabupaten Mojokerto 2022 – 2027	Misi Sanitasi Kabupaten Mojokerto 2022 – 2027
“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. 2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, 	“Terwujudnya sanitasi Kabupaten Mojokerto yang aman, kolaboratif dan terjangkau ”	<p>Misi Air Limbah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan infrastruktur air limbah yang aman dan berkualitas. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan air limbah yang kolaboratif, akuntabel, transparan dan berintegritas. 3. Mewujudkan kolaborasi pemerintah,

Visi Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026	Misi Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026	Visi Sanitasi Kabupaten Mojokerto 2022 – 2027	Misi Sanitasi Kabupaten Mojokerto 2022 – 2027
	<p>akuntabel, bersih, transparan.</p> <p>4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan</p>		<p>masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah agar terakses semua kalangan.</p> <p>4. Mewujudkan permukiman layak huni dengan mengarusutamakan kualitas sistem air limbah.</p>
			<p>Misi Persampahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan infrastuktur persampahan yang aman dan berkualitas 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan pengelola persampahan yang kolaboratif, akuntabel, transparan dan berintegritas. 3. Mewujudkan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan agar cakupan layanan menyeluruh. 4. Mewujudkan permukiman layak huni dengan mengarusutamakan kualitas sistem persampahan

Visi Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026	Misi Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026	Visi Sanitasi Kabupaten Mojokerto 2022 – 2027	Misi Sanitasi Kabupaten Mojokerto 2022 – 2027
			<p>Misi Drainase Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan database drainase lingkungan yang sistematis dan terintegrasi 2. Mewujudkan tata kelola saluran drainase lingkungan agar terpelihara baik 3. Mewujudkan permukiman layak huni dengan memperhatikan kualitas saluran drainase lingkungan

Sumber: Analisis, 2022.

3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, Provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 3 sektor:

- a. Air Limbah Domestik
- b. Persampahan
- c. Drainase Lingkungan

Berikut adalah tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun (n+5) pada masing masing sektor.

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Data Dasar (3)
Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur pengolahan air limbah yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan pencemaran lingkungan akibat pembuangan isi tangki septik dari 99,0% menjadi 50% secara bertahap sampai dengan tahun 2027. 2. Pengurangan pencemaran lingkungan akibat SPAL tidak aman dari 88,52% menjadi 50% secara bertahap sampai dengan tahun 2027. 3. Memiliki SPALD Terpusat Skala Kabupaten dengan standar SNI/SPM yang berfungsi baik, dengan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sampai tahun 2027. 4. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses aman limbah domestik aman 5% dengan sarana pengangkutan dan pengolahan tinja pada tahun 2027 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran lingkungan karena pembuangan isi tangki septik sebesar 99,05% 2. Pencemaran karena SPAL dengan kategori tidak aman sebesar 88,52% 3. IPLT dan 1 (dari 2) IPAL tidak berfungsi 4. Capaian akses aman 0,2% pada tahun 2022.
Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor air limbah domestik yang profesional dan berintegritas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya UPTD air limbah domestik Kabupaten Mojokerto yang profesional dan berintegritas. 2. Tersedianya regulasi yang mengatur pengelolaan air limbah yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2027. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia UPTD air limbah domestik 2. Belum tersedia regulasi pengelolaan air limbah yang aman dan berkelanjutan.
Pendanaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto yang tercukupi dan memadai.	Tersedianya sumber dan jumlah pendanaan air limbah domestik sebesar Rp 102.772.000.000 sampai tahun 2027.	1. Terdapat selisih dana antara kebutuhan dengan kemampuan pendanaan tahun 2027 sebesar 61% dari kebutuhan.
Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni	1. Meningkatkan jumlah rumah tangga dengan tangki septik suspek aman	1. Tangki septik suspek tidak aman sebesar 85,22%

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
	dari 14,78% menjadi 50% pada tahun 2027. 2. Berkurangnya jumlah rumah tangga yang melakukan BABS menjadi 0% pada tahun 2027. 3. Meningkatkan CTPS di lima waktu penting : tidak dilakukan sebesar 15 %	2.2% penduduk melakukan BABS 3. CTPS di lima waktu penting tidak dilakukan sebesar 36,29%
Tercapainya Akses Layak di sektor air limbah domestik	Menurunkan angka BABS dari 2% menjadi 0% di tahun 2024	1. Data BABS 2%

Sumber: Kajian EHRA Kabupaten Mojokerto 2022, RPJMD Kabupaten Mojokerto 2020-2024, dan Analisis 2022.

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Kab Mojokerto

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Data Dasar (3)
Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur persampahan yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.	1. Tercapainya Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 73,0% pada tahun 2027. 2. Tercapainya Pengurangan Sampah Perkotaan sebesar 26,0% pada akhir tahun 2027.	1. Pengelolaan sampah tidak memadai sebesar 100% 2. Frekuensi pengangkutan sampah tidak memadai sebesar 32,5% 3. Ketepatan waktu pengangkutan sampah tidak tepat waktu sebesar 100% 4. Pengolahan sampah setempat tidak diolah sebesar 100,0% 5. 1 (dari 2) TPA tidak berfungsi 6. Capaian Penanganan Sampah Perkotaan 96,9% pada tahun 2022. 7. Capaian Pengurangan Sampah Perkotaan 0,2% pada tahun 2022.
Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor persampahan yang profesional dan berintegritas.	Tersedianya regulasi yang mengatur pengelolaan persampahan yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2027.	1. Belum tersedia UPTD air limbah domestik 2. Belum tersedia regulasi pengelolaan air limbah yang aman dan berkelanjutan.
Pendanaan Persampahan Kabupaten Mojokerto yang tercukupi dan memadai.	Tersedianya sumber dan jumlah pendanaan persampahan sebesar Rp Rp 17.843.000.000 sampai tahun 2027	Terdapat selisih dana antara kebutuhan dengan kemampuan pendanaan tahun 2027 sebesar 61% dari kebutuhan.
Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni	Meningkatnya praktik pemilahan sampah rumah tangga	1. Perilaku praktik pemilahan sampah rumah tangga sebesar 17,7%, tidak memilah 82,3%.

Sumber: Kajian EHRA Kabupaten Mojokerto 2022, RPJMD Kabupaten Mojokerto 2020-2024, dan Analisis 2022.

Tabel 3. 4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase Lingkungan Kab Mojokerto

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Data Dasar (3)
Kabupaten Mojokerto memiliki database sistem infrastruktur	Tersedianya database drainase lingkungan tiap kecamatan	Terdapat Masterplan Drainase Tahun 2019 dengan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
drainase lingkungan yang termutakhir.		pembahasan detail pada Kecamatan Sooko, Kecamatan Pungging dan Perkotaan yang mencakup DAS Kali Cemporat.
Kabupaten Mojokerto memiliki sistem drainase lingkungan yang terpelihara baik.	Tersedianya program kerja kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan drainase lingkungan	Belum terdapat program terkait drainase yang berbasis masyarakat.
Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni berdasarkan komponen drainase lingkungannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi luas genangan permukiman menjadi 0 Ha pada tahun 2027. 2. Mengurangi saluran drainase sekunder dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas genangan sebesar 416,35 Ha. 2. Saluran drainase sekunder yang memiliki kondisi baik adalah 59% dari total panjang saluran atau 607,72 km. saluran drainase dengan kondisi rusak ringan sebesar 32% atau 334,69 km dan saluran drainase dengan kondisi rusak berat sebesar 9% atau 92,63 km.

Sumber: Kajian EHRA Kabupaten Mojokerto 2022, RPJMD Kabupaten Mojokerto 2020-2024, dan Analisis 2022.

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan Pengembangan Sanitasi merupakan turunan dari misi sanitasi Kabupaten Mojokerto yang telah dirumuskan sebelumnya. Sesuai pedoman penyusunan Pemutakiran SSK, Tahapan Pengembangan Sanitasi disusun terpisah menurut 2 jenis sektor, yaitu sektor air limbah dan sektor persampahan, dengan pembagian tahapan pengembangan menjadi 2 tahapan yaitu sebagai berikut.

1) Tahapan Jangka Pendek

Tahapan Jangka Pendek dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2), yaitu tahun 2024.

2) Tahap Jangka Menengah

Tahap Jangka Menengah dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5), yaitu tahun 2027. Tahapan Jangka Menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK.

Penentuan target tahapan pengembangan sanitasi tiap sektor berdasarkan kebijakan sanitasi tingkat nasional, tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Kabupaten Mojokerto. Beberapa kebijakan yang dirujuk antara lain RPJMN 2020-2024, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

3.2.3 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Pada target RPJMN, target akses sanitasi dirinci menjadi 90% Akses Layak, termasuk 15% pada Akses Aman pada tahun 2024. Target nasional tersebut kemudian diturunkan pada target RPJMD Jawa Timur, yaitu menjadi 95% Akses Layak dan 20% Akses Aman pada tahun 2024. Target ini selanjutnya diturunkan ke tingkat Provinsi berdasarkan kondisi eksisting dan kapasitas Provinsi. Target akses air limbah tingkat Provinsi selanjutnya dijabarkan ke tingkat Kabupaten/Kota, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Berikut adalah skema yang menjelaskan proses perumusan target tersebut.



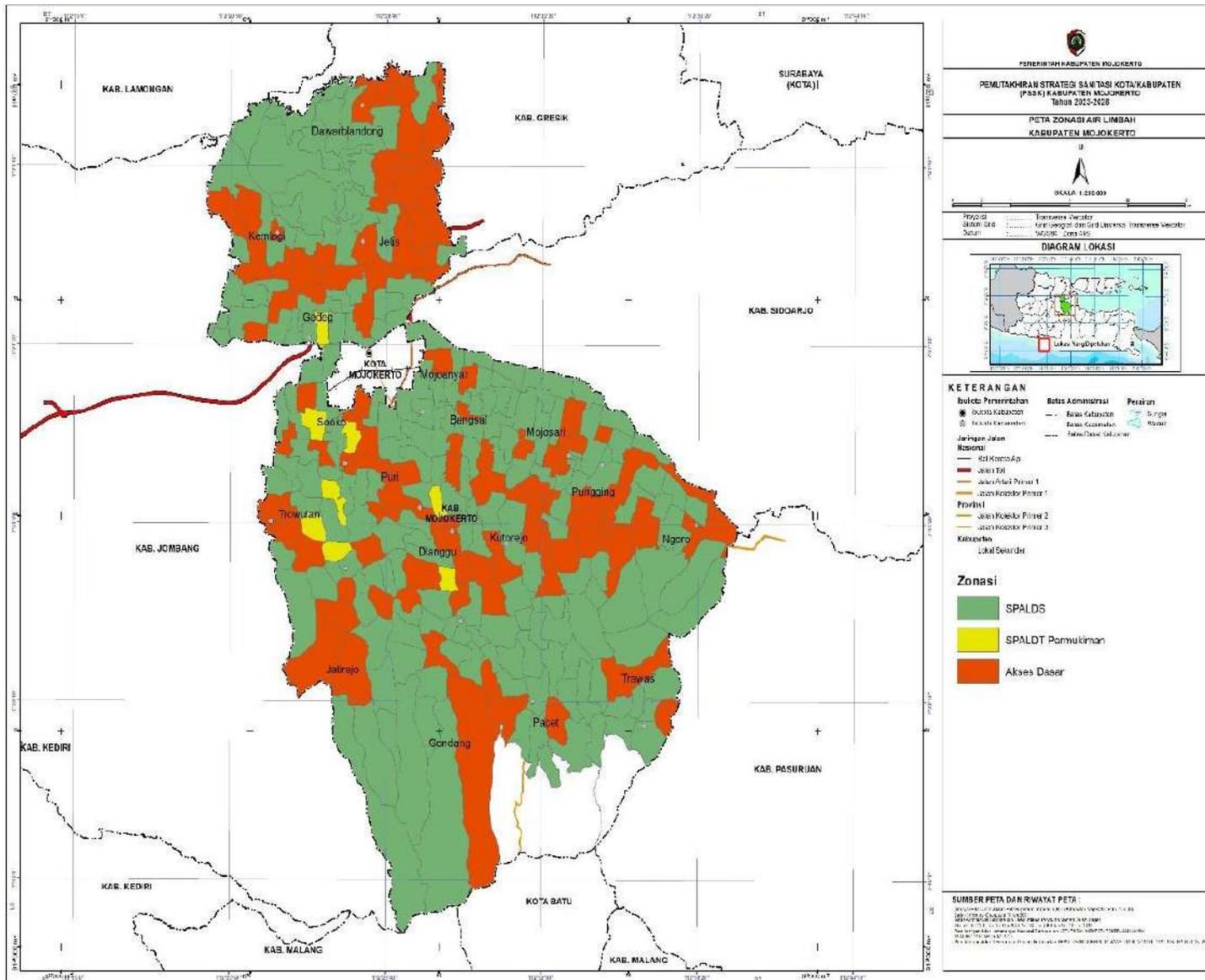
Gambar 3. 1 Target Sanitasi Tingkat Nasional dan Provinsi

Berikut adalah target akses air limbah domestik Kabupaten Mojokerto yang telah disesuaikan dengan rencana pendanaan pada sektor sanitasi sampai tahun 2027.

Tabel 3. 5 Target Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	Target RPJMN 2020-2024	Target	
			Provinsi Jawa Timur Th.2024	Kabupaten Mojokerto Th.2027
A	Akses Aman	15,0%	20,0%	10,0%
B	Akses Layak	90,0%	95,0%	97,0%
1	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	80,0%
2	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	5,0%
3	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	2,0%
C	Akses Belum Layak*			
	BABS Tertutup			
D	BABS di Tempat Terbuka	0,0%	0,0%	0,0%

Sumber: Analisis Instrumen SSK Kabupaten Mojokerto, 2022.



Gambar 3. 2 Peta Zonasi Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto

Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah menggunakan bantuan Instrumen SSK, dimana dalam instrumen tersebut terdapat tiga kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu:

Kondisi 1: Pengelolaan dengan Akses Dasar/Layak

Kondisi 2: Pengelolaan dengan SPALD Setempat

Kondisi 3: Pengelolaan dengan SPALD Terpusat

Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah, infrastruktur yang termasuk kedalam kategori akses dasar adalah cubluk dan plengsengan. Akses dasar diterapkan di kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah dan sudah tidak dilakukan dan masuk dalam kategori tidak layak. Pengelolaan dengan akses dasar pada Instrumen SSK ditujukan untuk mengakomodir 15% pemenuhan akses dasar pada target universal.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

- Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

3.2.4 Tahapan Pengembangan Persampahan

Pada sektor persampahan, target nasional untuk penanganan sampah adalah sebesar 70% dan untuk target pengurangan sampah sebesar 30% yang harus tercapai pada tahun 2025. Berikut adalah target pengelolaan persampahan perkotaan Kabupaten Mojokerto yang telah disesuaikan dengan rencana pendanaan pada sektor persampahan sampai tahun 2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 6 Target Pengelolaan Persampahan Perkotaan Kabupaten Mojokerto

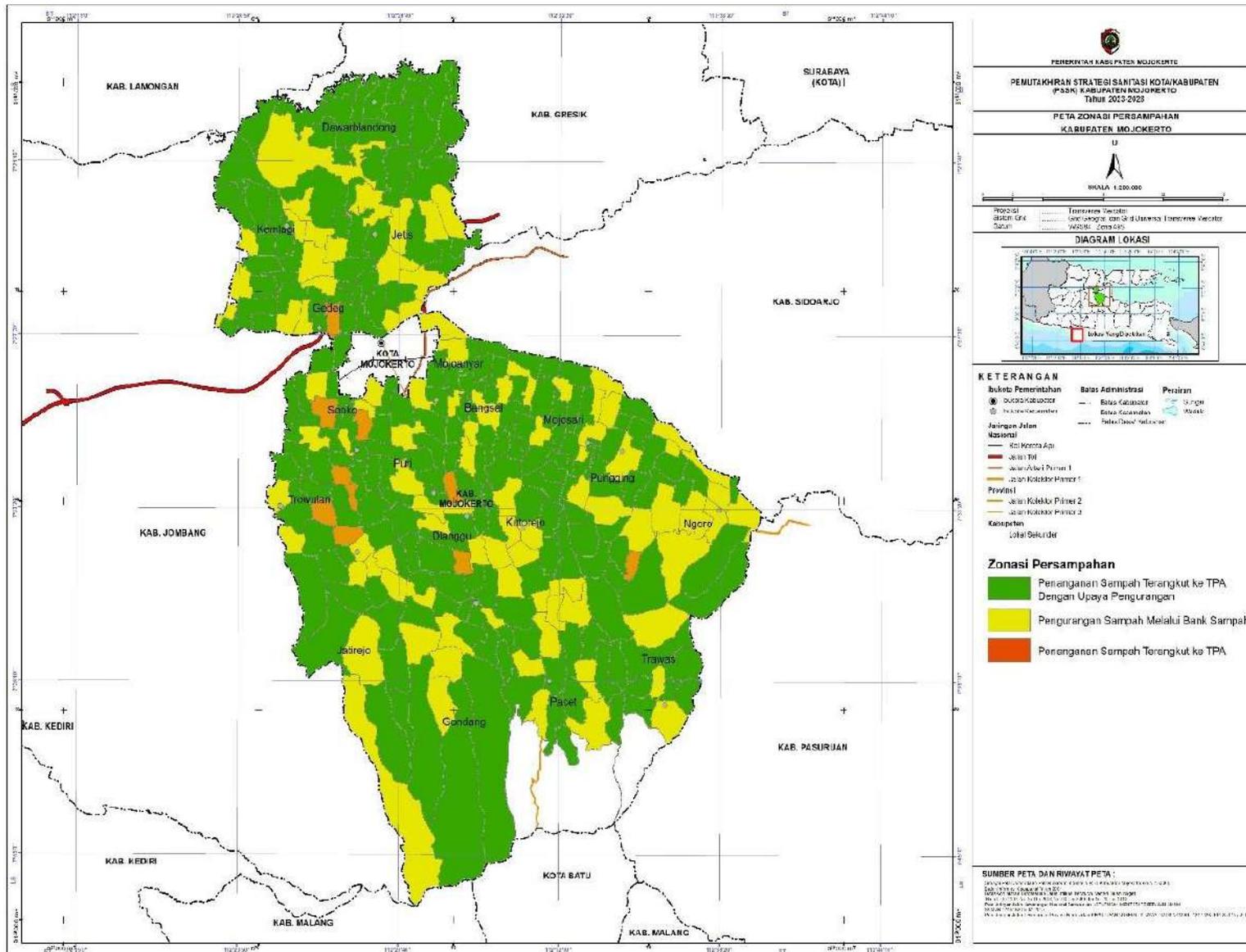
Indikator	Target RPJMN 2020-2024	Target 2024 (Referensi)		Target Jangka Pendek
		Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Mojokerto
Penanganan Sampah Perkotaan	80,0%	82,0%	75,0%	73,0%
Pengurangan Sampah Perkotaan	20,0%	18,0%	25,0%	26,0%

Sumber: Analisis Instrumen SSK Kabupaten Mojokerto, 2022.

Berdasarkan Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, sistem pengelolaan persampahan terbagi atas upaya pengurangan dan penanganan. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pengembangan persampahan, dengan menggunakan bantuan Instrumen SSK, terdapat tiga kondisi yang dapat diterapkan pada Kabupaten Mojokerto yaitu:

1. Kondisi 1: Penanganan sampah terangkut ke TPA dengan upaya pengurangan
2. Kondisi 2: Pengurangan Sampah Melalui Bank Sampah
3. Kondisi3: Penanganan sampah terangkut ke TPA

Mengingat besarnya target pengurangan volume sampah di Kabupaten Mojokerto, maka akan dilaksanakan upaya pengurangan dengan pendekatan infrastruktur Bank Sampah.



Gambar 3. 3 Peta Zonasi Persampahan Kabupaten Mojokerto

3.2.5 Tahapan Pengembangan Drainase Lingkungan

Pengelolaan sistem saluran drainase yang kurang memenuhi syarat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya banjir, selain karena faktor manusia dan alam. Banyak sistem desain drainase permukaan yang dibangun tersebut tidak terawat dengan baik, tidak dirawat secara berkala yang membuat saluran drainase tersebut tidak berfungsi secara optimal, juga banyaknya kondisi yang sangat membutuhkan saluran drainase namun saluran drainase masih belum terbangun.

Dalam penanganan drainase perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menimbulkan permasalahan, salah satunya berupa masalah genangan air. Ada beberapa kawasan di Kabupaten Mojokerto terjadi masalah genangan air yang pada umumnya disebabkan antara lain karena prioritas penanganan drainase kurang mendapat perhatian, kurangnya kesadaran bahwa pemecahan masalah genangan harus melihat pada sistem jaringan saluran secara keseluruhan yang mengakibatkan hambatan (*back-water*) dan beban saluran dari hulunya, tidak menyadari bahwa sistem drainase kawasan harus terpadu dengan sistem badan air regionalnya (*system flood control*), kurang menyadari bahwa pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran merupakan pekerjaan rutin yang sangat penting untuk menurunkan resiko genangan, belum optimalnya koordinasi antara pihak terkait agar sistem pengaliran air hujan dapat berjalan dengan baik.

Penanganan drainase perlu memperhatikan fungsi drainase lingkungan sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep drainase yang berwawasan lingkungan. Berlainan dengan paradigma lama yang prinsipnya mengalirkan limpasan air hujan ke badan air penerima secepatnya, tetapi prinsipnya agar air hujan yang jatuh ditahan dulu agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan buatan/alamiah seperti kolam tandon, waduk lapangan, sumur-sumur resapan, penataan lansekap dan lain-lain.

Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan/desa, maka perlu disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan.

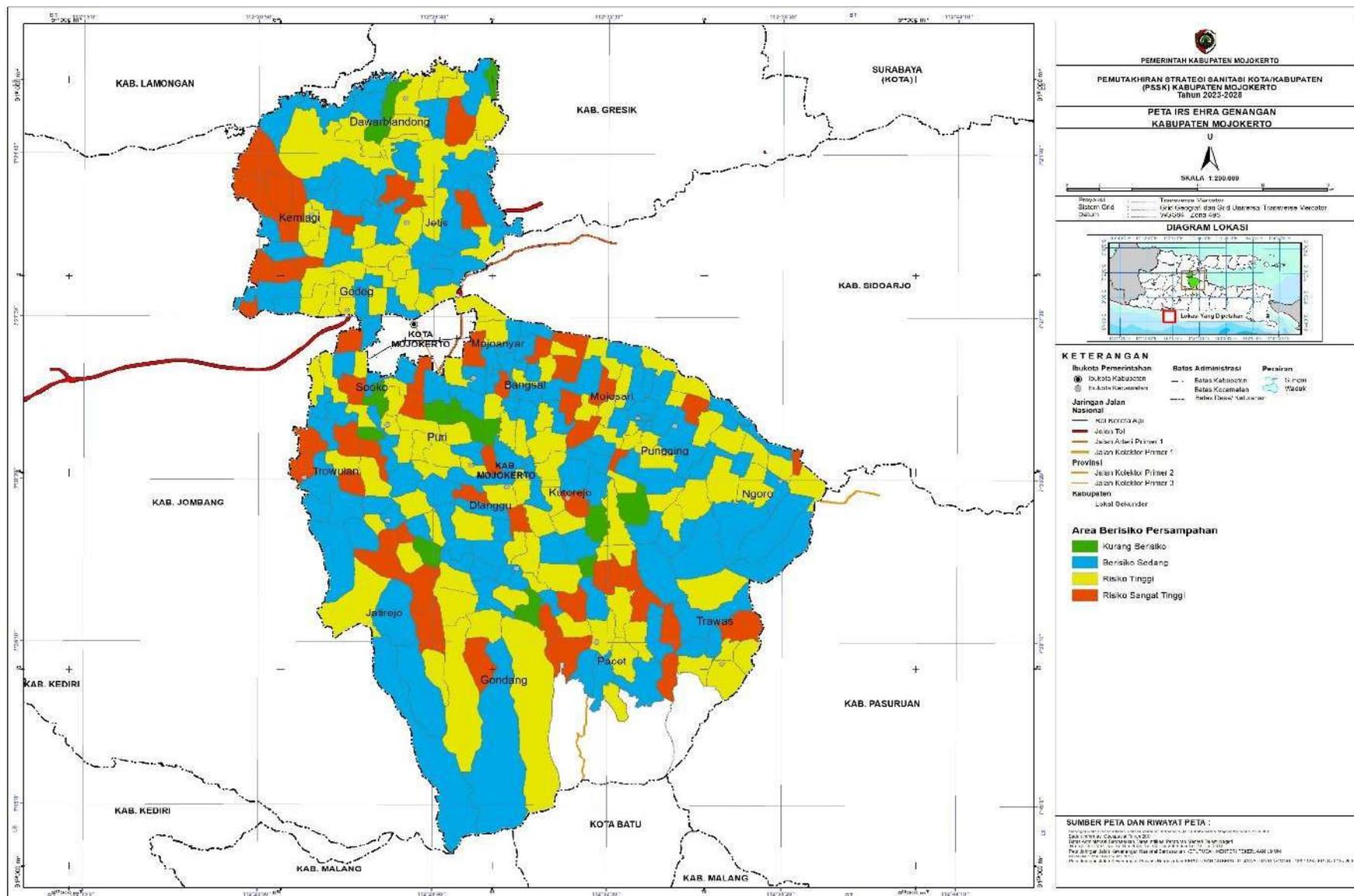
Target Penanganan Drainase yang dijadikan pada kebijakan nasional maupun provinsi adalah Sistem Drainase dan Penanganan Banjir Skala Regional. Sedangkan pada Kabupaten Mojokerto, penanganan drainase difokuskan pada wilayah rawan genangan, yaitu wilayah Kelurahan/Desa dengan skor risiko sanitasi sektor drainase tinggi (3) dan sangat tinggi (4). Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, Kecamatan

Sooko, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Puri, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Trowulan Mengacu pada target akses universal, pada tahapan jangka pendek ditargetkan terwujudnya pengentasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam). Dengan demikian, penanganan drainase lingkungan dilaksanakan hanya dalam 1 pentahapan yaitu tahap pengembangan jangka pendek (tahun 2022).

Tabel 3. 7 Target Pengelolaan Drainase Lingkungan Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa	Luas Genangan Eksisting (Ha)	Penanganan Genangan (Ha)	
			Jangka Pendek (2024)	Jangka Menengah (2027)
Bangsals	Gebangmalang	2,79	2,79	0
Bangsals	Jumeneng	6,28	6,28	0
Bangsals	Kepuhanyar	24,59	14,59	10
Bangsals	Mejoyo	9,08	9,08	0
Bangsals	Ngrowo	24,59	14,59	10
Bangsals	Pekuwon	30,52	20	10,52
Bangsals	Salen	22,63	12,63	10
Bangsals	Sidomulyo	1,01	1,01	0
Bangsals	Sumbertebu	1,24	1,24	0
Bangsals	Tinggarbuntut	32,89	20	12,89
Mojoanyar	Jotangan	34,09	20	14,09
Mojoanyar	Kebondalem	5,93	5,93	0
Mojoanyar	Modopuro	46,99	26,99	20
Mojoanyar	Randubango	8,42	8,42	0
Mojoanyar	Sadartengah	8,42	8,42	0
Mojoanyar	Sumberjati	2,57	2,57	0
Mojosari	Jasem	15,39	10	5,39
Mojosari	Kedungmaling	25,03	15,03	10
Mojosari	Kembangringgit	18,57	10	18,57
Mojosari	Kembangsri	27,54	20	17,54
Mojosari	Purwojati	1,27	1,27	0
Ngoro	Balongwono	16,08	10	6,08
Ngoro	Klinterejo	16,08	10	6,08
Ngoro	Sambiroto	24,12	14,12	10
Ngoro	Tawang Sari	10,10	10,10	0

Sumber: Analisis Pokja PKP 2022.



Gambar 3. 4 Peta Zonasi Drainase Lingkungan Kabupaten Mojokerto

Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Puri, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Trowulan.

Upaya mitigasi dan peningkatan peningkatan kapasitas adaptif dilakukan melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis pada sektor-sektor prioritas; peningkatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat yaitu kegiatan penyuluhan-penyuluhan, pelatihan dan simulasi situasi bencana (drill); serta peningkatan regulasi terkait ketahanan terhadap bencana dan iklim pada sektor prioritas.

Pada beberapa lokasi juga telah dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang didukung oleh basis data yang kuat dari pilar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yang meliputi penyusunan kajian dan peta risiko bencana, penguatan analisis mitigasi bencana geologi dalam penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan infrastruktur tahan bencana. Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain:

- a. Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau.
- b. Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah.
- c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor.
- d. Penetapan sempadan sungai
- e. Pembangunan talud sungai, normalisasi sungai, penghijauan di bagian hulu
- f. Relokasi pada permukiman pada kawasan rawan banjir,
- g. Pengadaan sistem pompa.

3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Salah satu faktor terpenting dalam penanganan sanitasi adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Berikut alokasi belanja sanitasi Kabupaten Mojokerto yang selalu terjadi peningkatan dalam penganggaran daerah dimana tertera rata-rata pertumbuhan pendanaan sanitasi serta komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan, dengan detailnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Mojokerto untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	Rp17.737.443.550	Rp11.077.000.000	Rp18.916.642.425	Rp20.302.242.000	Rp10.730.984.000	-0,02
1.1	Air Limbah Domestik	Rp5.125.000.000	Rp360.000.000	Rp8.457.808.299	Rp2.127.342.000	Rp2.664.947.500	5,27
1.2	Sampah Domestik	Rp6.256.000.000	Rp9.997.000.000	Rp2.001.025.827	Rp8.274.900.000	Rp7.866.036.500	0,72
1.3	Drainase Lingkungan	Rp6.356.443.550	Rp720.000.000	Rp8.457.808.299	Rp10.487.000.000	Rp849.551.000	2,30
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2)	Rp268.000.000	Rp130.500.000	Rp10.710.044.000	Rp3.207.342.000	Rp3.614.080.000	40,28
2.1	DAK Sanitasi	-	-	Rp4.650.000.000	Rp3.207.342.000	Rp3.614.080.000	-0,09
2.2	DAK Lingkungan Hidup	Rp45.000.000	Rp40.500.000	Rp3.315.000.000	-	-	40,38
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	Rp223.000.000	Rp90.000.000	Rp2.745.044.000	-	-	14,45
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)	Rp17.469.443.550	Rp10.946.500.000	Rp8.206.598.425	Rp20.302.242.000	Rp17.681.900.000	Rp7.766.455.000
	Total Belanja Langsung	Rp1.260.690.567.138	Rp835.446.539.732	Rp990.450.600.097	Rp2.052.539.784.333	Rp2.052.539.784.333	Rp1.840.219.525.021
	% APBD murni terhadap Belanja Langsung	1,39%	1,31%	0,83%	0,99%	0,86%	0,42%
	Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)						9%

Sumber: APBD Kabupaten Mojokerto dan hasil olah 2022.

Berdasarkan Tabel 3.8 Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendanaan belanja sanitasi Kabupaten Mojokerto sebesar 0,20% pertahun. Pada uraian air limbah domestik didapatkan rata-rata pertumbuhan belanja yaitu 5,27%, sampah domestik sebesar 0,72% dan drainase sebesar 2,30%. Sedangkan untuk persentase APBD murni untuk sanitasi terhadap belanja langsung, rata-rata pertumbuhannya sebesar -0,09%. Penetapan komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan ditentukan berdasarkan kesepakatan OPD yaitu 9%.

Tabel 3. 9 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Belanja Langsung	Rp1.681.463.866.121	Rp1.832.795.614.072	Rp1.997.747.219.339	Rp2.177.544.469.079	Rp2.373.523.471.296	Rp10.063.074.639.907
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	Rp44.014.255.940	Rp47.098.373.856	Rp50.402.500.026	Rp58.901.161.636	Rp63.024.242.951	Rp263.440.534.409
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	Rp39.139.918.639	Rp47.923.567.314	Rp140.557.012.644	Rp29.040.719.435	Rp40.692.442.396	Rp297.353.660.428

Sumber: Hasil Analisa, 2022.

Berdasarkan Tabel 3.9 Perkiraan belanja murni sanitasi 5 tahun ke depan didapatkan dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Didapatkan perkiraan komitmen pendanaan sanitasi sejumlah Rp 297.353.660.428, jumlah ini disesuaikan dengan hasil perhitungan dan analisis pada instrumen SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Tabel 3. 10 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Mojokerto untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No.	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi	Rp17.737.443.550	Rp11.077.000.000	Rp18.916.642.425	Rp20.302.242.000	Rp10.730.984.000	-0,02
1.1	Air Limbah Domestik	Rp5.125.000.000	Rp360.000.000	Rp8.457.808.299	Rp2.127.342.000	Rp2.664.947.500	5,27
1.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan	Rp5.125.000.000	Rp360.000.000	Rp8.457.808.299	Rp2.127.342.000	Rp2.664.947.500	5,27
1	Justified	Rp5.125.000.000	Rp360.000.000	Rp8.457.808.299	Rp2.127.342.000	Rp2.664.947.500	5,27
1.2	Sampah Domestik	Rp6.256.000.000	Rp9.997.000.000	Rp2.001.025.827	Rp8.274.900.000	Rp7.866.036.500	0,72
1.2	Biaya Operasional/Pemeliharaan	Rp6.256.000.000	Rp9.997.000.000	Rp2.001.025.827	Rp8.274.900.000	Rp7.866.036.500	0,72
1	Justified	Rp6.256.000.000	Rp9.997.000.000	Rp2.001.025.827	Rp8.274.900.000	Rp7.866.036.500	0,72
1.3	Drainase Lingkungan	Rp6.356.443.550	Rp720.000.000	Rp8.457.808.299	Rp10.487.000.000	Rp849.551.000	2,30
1.3	Biaya Operasional/Pemeliharaan	Rp6.356.443.550	Rp720.000.000	Rp8.457.808.299	Rp10.487.000.000	Rp849.551.000	2,30
1	Justified	Rp6.356.443.550	Rp720.000.000	Rp8.457.808.299	Rp10.487.000.000	Rp849.551.000	2,30

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Berdasarkan Tabel 3.10 Diketahui bahwa analisis terhadap pembiayaan operasional pelayanan sanitasi atau pemeliharaan infrastruktur sanitasi kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2018-2022 memperlihatkan tingkat pertumbuhan untuk semua sub sektor sanitasi pertahunnya yakni 0,21% dengan rincian air limbah domestik sebesar 5,27%, Persampahan sebesar 0,72% dan Drainase Lingkungan sebesar 2,30%.

Tabel 3. 11 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Mojokerto untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2027

No.	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja Sanitasi	Rp11.244.266.903	Rp13.250.678.620	Rp14.057.547.508	Rp14.157.926.783	Rp25.590.886.062	Rp78.301.305.876
1.1	Air Limbah Domestik	Rp520.000.000	Rp1.591.827.696	Rp340.000.000	Rp370.000.000	Rp10.592.645.868	Rp13.414.473.564
1.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan	Rp520.000.000	Rp1.591.827.696	Rp340.000.000	Rp370.000.000	Rp10.592.645.868	Rp13.414.473.564

No.	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Justified	Rp520.000.000	Rp1.591.827.696	Rp340.000.000	Rp370.000.000	Rp10.592.645.868	Rp13.414.473.564
1.2	Sampah Domestik	Rp340.000.000	Rp340.000.000	Rp1.380.000.000	Rp340.000.000	Rp340.000.000	Rp2.740.000.000
1.2	Biaya Operasional/Pemeliharaan	Rp340.000.000	Rp340.000.000	Rp1.380.000.000	Rp340.000.000	Rp340.000.000	Rp2.740.000.000
1	Justified	Rp340.000.000	Rp340.000.000	Rp1.380.000.000	Rp340.000.000	Rp340.000.000	Rp2.740.000.000
1.3	Drainase Lingkungan	Rp5.857.835.021	Rp6.385.040.173	Rp6.959.693.789	Rp7.586.066.230	Rp8.268.812.190	Rp35.057.447.402
1.3	Biaya Operasional/Pemeliharaan	Rp5.857.835.021	Rp6.385.040.173	Rp6.959.693.789	Rp7.586.066.230	Rp8.268.812.190	Rp35.057.447.402
1	Justified	Rp5.857.835.021	Rp6.385.040.173	Rp6.959.693.789	Rp7.586.066.230	Rp8.268.812.190	Rp35.057.447.402

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Pada Tabel 3.11 Dapat diketahui bahwa perkiraan biaya operasional/pemeliharaan pada 3 (tiga) sub-sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan (2023-2027) mencapai Rp49.598.633.790 dengan rincian masing-masing sub-sektor air limbah sebesar Rp13.414.473.564, persampahan Rp 2.740.000.000 dan drainase Rp 35.057.447.402. Biaya operasional air limbah domestik dan sampah domestik disesuaikan dengan hasil perhitungan analisis pada instrumen SSK Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 terkait kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan.

Tabel 3. 12 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Mojokerto dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No.	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	Rp6.717.835.021	Rp8.316.867.869	Rp8.679.693.789	Rp8.296.066.230	Rp19.201.458.058	Rp51.211.920.966
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	Rp44.014.255.940	Rp47.098.373.856	Rp50.402.500.026	Rp58.901.161.636	Rp63.024.242.951	Rp263.440.534.409
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	Rp39.409.486.757	Rp48.217.396.563	Rp140.877.286.525	Rp29.389.817.966	Rp41.072.959.794	Rp298.966.947.604
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	Rp37.296.420.919	Rp38.781.505.987	Rp41.722.806.237	Rp50.605.095.406	Rp43.822.784.892	Rp212.228.613.442
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	Rp32.691.651.736	Rp39.900.528.694	Rp132.197.592.736	Rp21.093.751.736	Rp21.871.501.736	Rp247.755.026.638

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa kemampuan perkiraan kebutuhan operasional/pemeliharaan dari tahun 2023-2027 total pendanaan sebesar Rp51.211.920.966, perkiraan APBD murni untuk sanitasi sebesar Rp263.440.534.409 dan perkiraan komitmen pendanaan sanitasi sebesar Rp298.966.947.604 sehingga dapat diketahui bahwa kemampuan mendanai SSK (APBD murni) selama 5 tahun mendatang sebesar Rp212.228.613.442, sedangkan kemampuan mendanai SSK (APBD komitmen) selama 5 tahun mendatang sebesar Rp 247.755.026.638.

BAB IV

STRATEGI

PENGEMBANGAN SANITASI



Untuk mencapai tujuan setiap sub sektor sanitasi sebagaimana yang telah direncanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan strategi pelaksanaan. Untuk identifikasi faktor kunci keberhasilan dan perumusan strategi ini digunakan Analisis SWOT dan Analisis CSF.

Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisa strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat).

Sedangkan Analisis CSF adalah kumpulan analisa dari banyak proses-proses penentu keberhasilan. Critical Success Factor (CSF), adalah suatu area/ factor pada organisasi, yang dapat menentukan kesuksesan performansi organisasi apabila area tersebut dilaksanakan atau dipenuhi (Rockart, 1981). CSF diperlukan untuk mencapai misi sebuah perusahaan. Berdasarkan hasil analisa strategi melalui SWOT, dapat ditetapkan beberapa faktor penentu kesuksesan sebuah strategi kelak setelah strategi tersebut dijalankan. Peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi sistem informasinya, memfokuskan proses perencanaan strategi SI (Sistem Informasi) pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi SI dan mengevaluasi strategi SI.

Dengan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dituangkan dalam Kerangka Kerja Logis (KKL) per sub-sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing persubsektor yaitu subsektor air limbah, persampahan, drainase. Dengan acuan hasil tersebut, maka dalam bab 4 SSK Kabupaten Mojokerto, telah dirumuskan tentang tujuan, sasaran dan strategi.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini.

Kerangka Kerja Logis (KKL) menjelaskan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi. Matriks KKL mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Permasalahan mendesak didefinisikan sebagai persoalan pokok dan mendasar, baik teknis maupun non teknis, terkait pelayanan sistem sanitasi di Kabupaten Mojokerto yang menghalangi tercapainya tujuan pelayanan sistem sanitasi sehingga harus ditemukan solusi dan diselesaikan secepatnya. Permasalahan mendesak juga merupakan isu strategis yang bersifat kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) yang diperoleh dari analisis SWOT.
2. Tujuan didefinisikan sebagai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi serta mengatasi permasalahan mendesak.
3. Sasaran didefinisikan sebagai hal-hal yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu dan sesuai dengan indikator tercantum dalam kebijakan, *sustainable development goals*, SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau kebijakan lainnya.
4. Strategi didefinisikan sebagai suatu upaya menjawab permasalahan mendesak bersumber dari rumusan strategi yang telah disepakati berdasarkan hasil analisis SWOT.
5. Indikasi program didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk melaksanakan strategi yang diselaraskan kepada sumber pendanaan. Rencana program harus meliputi 5 (lima) aspek utama dalam pengelolaan sanitasi yaitu (1) Aspek Peran Serta Masyarakat, (2) Aspek Kelembagaan, (3) Aspek Teknis, (4) Aspek Keuangan, (5) Aspek Pengaturan. Rencana program dalam aspek teknis mengacu pada hasil sistem dan zona pada Instrumen SSK, dan mengacu pada tahapan pengembangan sanitasi yang dirumuskan secara relevan dengan mata anggaran yang meliputi berbagai aspek, antara lain infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, komunikasi, promotif, kelembagaan dan pengaturan.
6. Indikasi kegiatan didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk melaksanakan strategi yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi institusi terkait secara teknis (kedinasan). Adapun kegiatan utama dan sub kegiatan sanitasi sesuai dengan rencana

program yang telah dirumuskan yang mengacu pada SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land acquisition, Action program, Construction, Operation and Maintenance) untuk rencana kegiatan yang terkait aspek teknis.

Untuk matriks KKL terbagi atas 3 bagian yaitu KKL Air Limbah, KKL Persampahan dan KKL Drainase.

4.1 STRATEGI AIR LIMBAH DOMESTIK

Dari hasil analisis SWOT dan analisis CSF, diperoleh strategi pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Mojokerto antara lain.

1. Strategi 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan limbah dan pelayanan sanitasi skala kabupaten.

Strategi 1 dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan standar baku keamanan pengelolaan limbah, salah satunya dengan mengoptimalkan Kembali/ revitalisasi penggunaan IPLT.

2. Strategi 2: Meningkatkan pengolahan air limbah skala lingkungan

Strategi 2 dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Mojokerto menjangkau sampai dengan skala lingkungan, melalui SPALD Setempat dan SPALD Terpusat untuk mencapai dan mempertahankan 100% pengelolaan air limbah dengan akses layak.

3. Strategi 3: Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola air limbah domestik

Salah satu permasalahan mendesak adalah kurangnya keahlian khusus di bidang pengelolaan air limbah sampai ke skala lingkungan, sehingga solusi dibutuhkan mulai dari kelembagaan sampai ke skala masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui workshop/pelatihan, sosialisasi, penggunaan media dan kampanye tentang pengolahan air limbah domestik diantaranya operasional tangki septik dan pentingnya penyedotan tinja terjadwal. Selain itu, kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, yang dapat memotong rantai penularan kuman dan dapat menekan angka stunting.

PHBS diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2269 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 5 tatanan PBHS yang dapat

menjadi simpul – simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat:

- a. PHBS di Rumah tangga, dengan sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Rumah Tangga Ber-PHBS, yang mencakup persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita tiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur tiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lainnya.
- b. PHBS di Institusi Pendidikan (kampus, sekolah, pesantren, seminari, padepokan dan lain-lain), dengan sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Institusi Pendidikan Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
- c. PHBS di Tempat kerja (kantor, pabrik dan lain-lain), dengan sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan tempat kerja Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
- d. PHBS di Tempat umum (tempat ibadah, pasar, pertokoan, terminal, dermaga dan lain-lain), dengan sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan tempat kerja Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
- e. PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, rumah sakit dan lain-lain), dengan sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan tempat kerja Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat,

membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain

4. Strategi 4: Penyamaan persepsi dan kesepakatan antar OPD dalam Pokja dalam pengelolaan infrastruktur sanitasi dan menggali peluang pendanaan sanitasi.

Bentuk penyamaan persepsi dapat dengan koordinasi anggaran, termasuk APBD, Alokasi Dana Desa dari Kementerian Desa.

5. Strategi 5: Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan OPD dalam mengatur pengelolaan air limbah domestik yang aman pada tiap tahapan sepanjang rantai layanan sanitasi.

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan pembentukan lembaga khusus pengelola air limbah domestik, yang bertujuan untuk mengelola sarana dan prasarana IPLT sehingga IPLT yang telah tersedia dapat berfungsi optimal dan terkendali.

Salah satu penyebab kurang optimalnya sistem pengelolaan air limbah adalah karena adanya tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan tupoksi pengelola air limbah, sehingga seluruh OPD yang pernah/sedang terlibat dalam pengelolaan harus mencapai satu kesepakatan bersama.

6. Strategi 6: Menggali potensi pendanaan dari pihak swasta seperti perusahaan, NGO dan federasi terkait sanitasi.

Penggalian potensi pendanaan di luar pemerintahan dibutuhkan mengingat pengadaan infrastruktur dan kegiatan nonteknis membutuhkan dana yang sangat besar dan dapat mengurangi beban pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional. Penggalian potensi ini dapat berupa penentuan skema pembiayaan yang memungkinkan untuk digunakan di Mojokerto.

7. Strategi 7: Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik secara aktif

Menawarkan program CSR yang dapat dilakukan kepada pihak swasta dan membuat kesepakatan dengan pihak swasta dalam pemenuhan pembiayaan atau infrastruktur air limbah domestik.

8. Strategi 8: Melakukan penataan permukiman kumuh dengan mengutamakan kebutuhan sanitasi

Permukiman kumuh merupakan salah satu lingkungan yang memiliki akses terbatas terhadap sanitasi, sehingga dengan dilakukan penataan, maka PSU permukiman kumuh termasuk sistem sanitasi dapat diperbaiki sesuai standar.

9. Strategi 9: Memberikan kemudahan pendanaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu kendala dalam mewujudkan lingkungan yang sehat adalah terbatasnya dana operasional terhadap infrastruktur, salah satunya adalah kemampuan untuk memenuhi retribusi jasa sanitasi. Sehingga dengan memberikan kemudahan pendanaan pada MBR, dapat membantu MBR tersebut mengakses sistem sanitasi yang baik dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 4. 1 Matriks Kerangka Kerja Logis Air Limbah Domestik

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
<p>Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana.</p> <p>1. Infrastruktur air limbah yaitu IPAL dan MCK komunal yang sudah terbangun Sebagian tidak berfungsi ataupun mengalami kerusakan</p> <p>2. Bangunan IPLT yang tersedia tidak berfungsi atau mengalami kerusakan</p> <p>3. Tidak tersedianya layanan mengangkut lumpur tinja dari tangka septik komunal/individu</p> <p>4. Cakupan pelayanan IPAL dan MCK komunal masih terbatas.</p>	Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur pengolahan air limbah yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.	Pengurangan pencemaran lingkungan akibat pembuangan isi tangki septik dari 99,0% menjadi 50% secara bertahap sampai dengan tahun 2027.	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan limbah dan pelayanan sanitasi skala kabupaten	Infrastruktur Skala Kabupaten/ Regional	Mengoptimalkan kembali penggunaan infrastruktur IPLT yang telah tersedia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Studi Kelayakan dan DED Revitalisasi IPLT 2. Revitalisasi IPLT 3. Penyiapan Lahan 4. Supervisi Revitalisasi IPLT 5. Operasi dan Pemeliharaan IPLT 6. Penambahan dan supervisi Sambungan Rumah (SR) 7. Pelatihan bagi Pengelola IPLT 8. Pengadaan sarana pengangkutan dan penyedotaan tinja (truck tinja)
		Pengurangan pencemaran lingkungan akibat SPAL tidak aman dari 88,52% menjadi 50% secara bertahap sampai dengan tahun 2027.			Melakukan kajian terkait perencanaan jaringan perpipaan air limbah skala kabupaten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Induk/ Masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) 2. Review Rencana Induk/ Masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) 3. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan Air Limbah Domestik 4. Pendataan Kebutuhan SPALD-T (MCK, IPAL, Septic tank, sambungan rumah) 5. Studi Kajian Strategi Sanitasi Sekolah
		Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses aman limbah domestik aman 100% dengan sarana pengangkutan dan pengolahan tinja pada tahun 2027				

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
		Meningkatkan SPALD Setempat dan Terpusat dengan standar SNI yang telah berjalan, yang kemudian melakukan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) mulai tahun 2023			Meningkatkan pengolahan air limbah dengan SPALD-S	<ol style="list-style-type: none"> Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan Pengadaan sarana pengangkutan dan penyedotaan tinja (truck tinja) Penyedotan tinja terjadwal
		Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses aman limbah domestik aman 100% dengan sarana pengangkutan dan pengolahan tinja pada tahun 2027	2. Meningkatkan pengolahan air limbah skala lingkungan	Infrastruktur Skala Lingkungan	Meningkatkan pengolahan air limbah dengan SPALD-T	<ol style="list-style-type: none"> Pembebasan dan Penyiapan Lahan/Tanah untuk MCK Komunal Penyusunan DED Teknis MCK/ Toilet Komunal Pembangunan MCK/ Toilet komunal. Operasional dan pemeliharaan MCK/ Toilet komunal. Operasional dan pemeliharaan IPAL komunal dan jaringan perpipaan Penyedotan tinja terjadwal pada IPAL Komunal
Aspek Non Teknis: Kelembagaan dan Kebijakan, Komunikasi, Peran Serta Masyarakat dan Swasta. <ol style="list-style-type: none"> Belum memiliki UPTD Pengelola Air Limbah Belum memiliki Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan untuk pemeliharaan IPAL dan MCK Komunal berupa swadaya masyarakat 		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah rumah tangga dan lingkungan secara aman mulai tahun 2020-2024	3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola air limbah domestik	Kapasitas Masyarakat	Mendorong pemerataan informasi dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah domestik	<ol style="list-style-type: none"> Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan) pada PKK dan perangkat desa terkait kualitas lingkungan dan permukiman yang sehat Pembentukan KSM Pengelola Septic Tank, MCK/Toilet Komunal, IPAL Komunal Pelatihan KSM terkait Manajerial, Administrasi & Keuangan pada Septic Tank, MCK/ Toilet Komunal, IPAL Komunal

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
ataupun partisipasi dunia usaha/swasta 4. Jumlah SDM pengelola IPAL dan MCK komunal belum memadai 5. Pelatihan SDM pengelola IPAL dan MCK Komunal belum memadai 6. Rendahnya akses informasi dan keterlibatan/pemberdayaan masyarakat di beberapa cakupan wilayah IPAL dan MCK komunal untuk mengelola IPAL dan MCK komunal 7. Terdapat beberapa MCK komunal yang tidak difungsikan secara maksimal oleh masyarakat dalam cakupan layanan 8. Belum adanya LSM yang terfokus pada air limbah 9. Belum ada legalitas Lembaga masyarakat yang fokus pada air limbah 10. Tidak ada dana dari masyarakat 11. Partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan sedot tinja masih rendah 12. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur limbah yang sudah disediakan 13. Pelibatan pihak swasta terkait sistem pengelolaan						

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
<p>air limbah belum diberdayakan</p> <p>14. Kurangnya peran media dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye terkait sanitasi</p> <p>15. Adanya ancaman pencurian fasilitas yang terdapat pada MCK komunal</p>						
					Mendorong masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan edukasi PHBS pada lingkungan permukiman kumuh dan informal Menyertakan edukasi PHBS pada substansi pendidikan dasar
	Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor air limbah domestik yang profesional dan berintegritas.	Tersedianya lembaga pengelola khusus air limbah domestik Kabupaten Mojokerto yang profesional dan berintegritas.	4. Penyamaan persepsi dan kesepakatan antar OPD dalam Pokja dalam pengelolaan infrastruktur sanitasi dan menggali peluang pendanaan sanitasi	Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	Menyepakati dan menjalankan porsi pengelolaan sanitasi sesuai tupoksi yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi terkait tupoksi pengelolaan sanitasi Koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber (APBD, APBN DAK Sanitasi, dan swasta)
Tersedianya regulasi yang mengatur pengelolaan air limbah yang aman dan		5. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan OPD dalam	Membentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik			Menyusun Perda OPD Pengelola Air Limbah Domestik
			Membentuk UPTD IPLT			Menyusun Perda UPTD IPLT

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
		berkelanjutan pada tahun 2027.	mengatur pengelolaan air limbah domestik yang aman pada tiap tahapan sepanjang rantai layanan sanitasi		Menyusun regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik terkait NSPK/SPM terbaru	Menyusun Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Pendanaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto yang tercukupi dan memadai.	Meningkatnya sumber dan jumlah pendanaan air limbah domestik	6. Menggali potensi pendanaan dari pihak swasta seperti perusahaan, NGO dan federasi terkait sanitasi.	Peran Swasta, NGO dan Federasi	Melakukan kerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan pihak swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah di Kab./Kota 2. Penentuan skema pembiayaan dan melakukan kesepakatan CSR pengelolaan air limbah domestik dengan pihak swasta. 3. Koordinasi Pokja Sanitasi Pemerintah Kab./Kota, Masyarakat dan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah untuk pendanaan Sanitasi di Kab./Kota
	Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni	<p>Meningkatkan jumlah rumah tangga dengan tangki septik suspek aman dari 14,78% menjadi 50% pada tahun 2027.</p> <p>Berkurangnya jumlah rumah tangga yang melakukan BABS menjadi 0% pada tahun 2027.</p>	7. Melakukan penataan permukiman kumuh dengan mengutamakan kebutuhan sanitasi	Luasan Permukiman Layak Huni	Melaksanakan rencana program rencana dalam RP2KPKP dan RP3KP	Melakukan koordinasi antara sanitarian yang telah dilakukan pada permukiman kumuh dan informal.
			8. Memberikan kemudahan	Pendanaan Pada MBR	Memberikan keringanan	Memberi hibah/subsidi biaya pengadaan fasilitas sanitasi

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
			pendanaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		pendanaan/subsidi terkait akses sanitasi pada masyarakat berpenghasilan rendah	rumahtangga dan menyediakan toilet umum yang terjangkau Memberi hibah/subsidi biaya sambungan saluran pembuangan rumah tangga dan sambungan ke toilet umum dan umum. Memberi hibah/subsidi biaya manajemen sanitasi on site

Sumber: Rencana, 2022.

4.2 STRATEGI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Dari hasil analisis SWOT dan analisis CSF diperoleh strategi pengembangan persampahan di Kabupaten Mojokerto antara lain.

1. Strategi 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan persampahan skala kabupaten.

Strategi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan standar baku, salah satunya dengan mengoptimalkan infrastruktur yang telah terbangun dan melengkapi sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan.

2. Strategi 2: Penyamaan persepsi dan kesepakatan antar OPD dalam Pokja dalam pengelolaan infrastruktur persampahan dan menggali peluang pendanaan persampahan

3. Strategi 3: Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, komunitas/lingkungan dalam mengatur pengelolaan persampahan yang aman pada tiap tahapan sepanjang rantai layanan

Pada kondisi eksisting, Kabupaten Mojokerto telah memiliki banyak lembaga pengelola sampah masyarakat yang mengelola TPS3R, TPST dan Bank Sampah. Namun belum ada kegiatan standarisasi, sehingga dibutuhkan kapasitas Lembaga yang setara dan sesuai dengan standar teknis pengelolaan sampah. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui workshop/pelatihan, sosialisasi, penggunaan media dan kampanye tentang pengolahan air limbah domestik diantaranya operasional tangki septik dan pentingnya penyedotan tinja terjadwal

4. Strategi 4: Menggali potensi pendanaan dari pihak swasta seperti perusahaan, NGO dan federasi terkait persampahan.

Penggalian potensi pendanaan di luar pemerintahan dibutuhkan mengingat pengadaan infrastruktur dan kegiatan nonteknis membutuhkan dana yang sangat besar dan strategi ini dapat mengurangi beban pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional. Penggalian potensi ini dapat berupa penentuan skema pembiayaan yang memungkinkan untuk digunakan di Mojokerto

5. Strategi 5: Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan persampahan secara aktif. Strategi ini dilakukan dengan secara aktif menawarkan program CSR yang dapat dilakukan kepada pihak swasta dan membuat kesepakatan dengan pihak swasta dalam pemenuhan pembiayaan atau infrastruktur air limbah domestik

6. Strategi 6: Melakukan penataan permukiman kumuh dengan mengutamakan kebutuhan persampahan.

Permukiman kumuh merupakan salah satu lingkungan yang memiliki akses terbatas terhadap layanan persampahan, sehingga dengan dilakukan penataan, maka PSU permukiman kumuh termasuk layanan persampahan dapat terpenuhi sesuai standar

7. Strategi 7: Mendorong masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh.

Kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, seperti perilaku cuci tangan pada lima waktu penting, yang dapat memotong rantai penularan kuman dan dapat menekan angka stunting

Tabel 4. 2 Matriks Kerangka Kerja Logis Persampahan

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
<p>Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa bangunan TPS3R terbengkalai tidak terawat 2. Banyak infrastruktur persampahan yang belum beroperasi dan berpengaruh pada cakupan pelayanan 3. Salah satu TPA (TPA Belahantengah) tidak beroperasi optimal sehingga terjadi penumpukan di TPA lainnya 4. Kegiatan pemilahan belum dilakukan oleh pengelola hanya dilakukan oleh pemulung 5. Tidak adanya kegiatan perawatan mesin pada infrastruktur 6. Terdapat infrastruktur dengan pengelola yang aktif tidak dibekali alat atau bantuan operasional 7. Masalah pencurian fasilitas di infrastruktur persampahan contohnya pompa air 8. Masalah perusakan fasilitas dari masyarakat 	Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur persampahan yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 73,0% pada tahun 2027. 2. Tercapainya Pengurangan Sampah Perkotaan sebesar 26,0% pada akhir tahun 2027. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan persampahan skala kabupaten 	Infrastruktur Skala Kabupaten/ Regional	<p>Pembangunan TPA/ Controlled Landfill Baru</p> <p>Mengoptimalkan Sarana pengelolaan sampah TPST</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan studi kelayakan TPA 2. Penyusunan Kajian/Studi Dampak Lingkungan Lingkungan 3. Perencanaan Teknis (DED) 4. Sosialisasi "Rencana" Rehabilitasi/Peingkatan TPA kepada masyarakat sekitarnya 5. Pembangunan dan Supervisi TPA 6. Pengadaan Excavator 7. Pengadaan Loader 8. Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya 9. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA 10. Pelatihan Pengelolaan TPA 11. Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA 12. Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi TPST 2. Operasi dan Pemeliharaan TPST 3. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
						Kinerja Pengelolaan Sampah 4. Monitoring dan Evaluasi Target dan Standar Pelayanan TPST
					Pengelolaan TPS 3R Berbasis Masyarakat yang sudah terbangun	1. Rehabilitasi TPS3R 2. Operasi dan Pemeliharaan TPS3R 3. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 4. Monitoring dan Evaluasi Target dan Standar Pelayanan TPS3R
					Optimalisasi TPA	1. Pengadaan Fasilitas Operasional TPA Pengadaan Bulldozer 2. Pengadaan Fasilitas Operasional TPA Pengadaan Excavator 3. Pengadaan Fasilitas Operasional TPA Pengadaan Loader 4. Pelatihan Pengelolaan TPA 5. Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA 6. Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional dan Fasilitasnya 7. Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi
					Melakukan kajian terkait perencanaan sistem persampahan skala kabupaten.	1. Pemutakhiran Database Persampahan, termasuk cakupan pelayanan, data TPST, TPS3R, Bank

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
						<ol style="list-style-type: none"> Sampah dan Data Pegepul. Menyusun Masterplan Persampahan Menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) Studi/ kajian tentang komposisi, kualitas dan kuantitas sampah Kabupaten Studi/ kajian pemanfaatan sampah sebagai sumber energi terbarukan Penyelenggaraan adipura
<p>Aspek Non Teknis: Kelembagaan dan Kebijakan, Komunikasi, Peran Serta Masyarakat dan Swasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya regulasi terkait pengelolaan persampahan dan retribusi persampahan Belum ada UPTD pengelola persampahan Pendanaan bermasalah baik dari pemerintah daerah maupun iuran warga untuk berjalannya infrastruktur persampahan Rendahnya akses informasi dan keterlibatan/pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah Kurangnya upaya pemerintah terkait 	Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor persampahan yang profesional dan berintegritas.	Tersedianya regulasi yang mengatur pengelolaan persampahan yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2027.	2. Penyamaan persepsi dan kesepakatan antar OPD dalam Pokja dalam pengelolaan infrastruktur persampahan dan menggali peluang pendanaan persampahan	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	Menyusun rencana anggaran persampahan yang sistematis dan transparan	Koordinasi lintas OPD dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber (APBD, APBN DAK Sanitasi, dan swasta)
			3. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, komunitas/ lingkungan dalam mengatur pengelolaan persampahan yang aman pada tiap		Membentuk UPTD Pengelolaan Persampahan/ TPA	Menyusun Perda UPTD Pengelolaan Persampahan/ TPA
					Menyusun regulasi terkait Pengelolaan Persampahan terkait NSPK/SPM terbaru	Menyusun Perda Pengelolaan Persampahan
					Menfasilitasi komunitas swadaya masyarakat dalam kegiatan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Pemilahan sampah Pengadaan dan Pengenalan Keranjang Sampah Takakura

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
publikasi pengolahan dan pengelolaan sampah 6. Pelibatan pihak swasta terkait sistem pengelolaan air limbah belum diberdayakan 7. Kurangnya peran media dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye terkait sanitasi 8. Adanya ancaman pencurian fasilitas yang terdapat pada MCK komunal			tahapan sepanjang rantai layanan			3. Workshop Daur Ulang Sampah 4. Lokakarya dan workshop pengolahan persampahan berbasis masyarakat 5. Monitoring dan evaluasi kinerja KSM pada tingkat kecamatan maupun desa
	Pendanaan Persampahan Kabupaten Mojokerto yang tercukupi dan memadai.	Tersedianya sumber dan jumlah pendanaan persampahan sebesar Rp Rp 17.843.000.000 sampai tahun 2027	4. Menggali potensi pendanaan dari pihak swasta seperti perusahaan, NGO dan federasi terkait persampahan.	Peran Swasta, NGO dan Federasi	Pendataan potensi sumber pendanaan dari pihak swasta yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan	1. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga, perusahaan, NGO dan federasi yang melakukan CSR 2. Secara aktif mengirim perwakilan daerah dan melibatkan diri dalam forum-forum dan lokakarya terkait persampahan untuk memperluas jaringan kerjasama
			5. Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan persampahan secara aktif			Menentukan teknis kerjasama dalam pengelolaan persampahan dengan pihak swasta
Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni	Meningkatnya praktik pemilahan sampah rumah tangga	Meningkatnya praktik pemilahan sampah rumah tangga	6. Melakukan penataan permukiman kumuh dengan	Luasan Permukiman Layak Huni	Melaksanakan rencana program rencana dalam RP2KPKP dan RP3KP	Melakukan koordinasi antara komunitas persampahan yang telah dilakukan pada

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola persampahan dan lingkungan secara aman mulai tahun 2020-2024	mengutamakan kebutuhan persampahan			permukiman kumuh dan informal.
			7. Mendorong masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh	Kapasitas masyarakat	Melakukan promosi dan publikasi terkait upaya pengurangan sampah (3R) secara menyeluruh	<p>Sosialisasi dan edukasi pengolahan sampah (3R) pada lingkungan permukiman kumuh dan informal</p> <p>Menyertakan edukasi Pengolahan sampah 3R pada substansi pendidikan dasar</p> <p>Program Festival terkait pemanfaatan sampah pada perayaan hari tertentu, seperti Hari Ulangtahun Kabupaten Mojokerto, Hari Bumi atau Hari Lingkungan Hidup.</p>

Sumber: Rencana, 2022.

4.3 STRATEGI DRAINASE LINGKUNGAN

Dari hasil analisis SWOT dan analisis CSF diperoleh strategi pengembangan drainase lingkungan di Kabupaten Mojokerto antara lain.

1. Strategi 1: Menyusun database dan perencanaan drainase yang komprehensif dari hulu ke hilir

Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat dasar teknis dalam perencanaan drainase lingkungan. Hal ini untuk menjawab permasalahan belum tersedianya data detail perencanaan drainase yang terperinci pada tiap Kecamatan dan lingkungan permukiman.

2. Strategi 2: Mengoptimalkan koordinasi dan fungsi Pokja PKP

Strategi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan jaringan koordinasi dalam Pokja PKP yang juga menangani perencanaan PSU lainnya dan memaksimalkan alokasi anggaran sesuai kebutuhan drainase.

3. Strategi 4: Melakukan perbaikan saluran drainase lingkungan yang rusak

Strategi ini diarahkan untuk peningkatan dan perbaikan jaringan drainase lingkungan dimana kondisi saat ini masih terdapat kondisi drainase yang kurang baik..

4. Strategi 5: Mendorong masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh.

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah tidak pada saluran drainase. Saluran drainase yang tersumbat dapat menimbulkan menurunnya kualitas Kesehatan lingkungan dan dapat memicu pertambahan angka stunting pada bayi dan anak.

Tabel 4. 3 Matriks Kerangka Kerja Logis Drainase Lingkungan

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana 1 Saluran lingkungan tidak memiliki hulu dan hilir. Artinya saluran yang ada tidak terhubung satu terhadap yang lain dan hanya berputar di lingkungan tersebut. 2 Tidak adanya saluran tepi jalan di beberapa bagian ruas jalan 3 Adanya bangunan-bangunan yang yang memangkas badan air sehingga terjadi penyempitan penampang dan menurunkan fungsi saluran 4 Terdapat tumpukan sampah dan sedimen di dalam saluran serta tumbuhtumbuhan yang dibiarkan menutup saluran	Kabupaten Mojokerto memiliki database sistem infrastruktur drainase lingkungan yang termutakhir.	Tersedianya database drainase lingkungan tiap kecamatan	Menyusun database dan perencanaan drainase yang komprehensif dari hulu ke hilir	Database Drainase Lingkungan	Penyusunan dan Review Masterplan/ Rencana Induk Drainase dan Perencanaan Sejenis	1. Penyusunan Masterplan Drainase yang komprehensif dengan substansi yang mencakup kajian drainase lingkungan tiap kecamatan 2. Penyusunan DED Jaringan Drainase 3. Penyusunan Outline Plan Drainase
					Penyusunan teknis updating database drainase yang dapat diisi dengan data dari masyarakat	sosialisasi kegiatan updating database dan edukasi tentang pentingnya kualitas drainase lingkungan
					Penyusunan Database dan Kajian Drainase Lingkungan Berbasis Masyarakat	Kajian peran masyarakat dalam mewujudkan drainase yang berwawasan lingkungan
Aspek Non Teknis: Kelembagaan dan Kebijakan, Komunikasi, Peran Serta Masyarakat dan Swasta. 1. Rendahnya akses informasi dan keterlibatan/pemberdayaan	Kabupaten Mojokerto memiliki sistem drainase lingkungan yang terpelihara baik.	Tersedianya program kerja kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan drainase lingkungan	Mengoptimalkan koordinasi dan fungsi Pokja PKP	Kerjasama Pokja dan Masyarakat	Penyusunan teknis updating database drainase yang dapat diisi dengan data dari masyarakat	1. Penyusunan Ranperda Pengelolaan Drainase berwawasan lingkungan 2. Edukasi tentang pentingnya kualitas drainase lingkungan sebagai pencegahan masalah kesehatan dan stunting

Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2027

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	CSF	Program	Kegiatan
masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi saluran 2. Warga seringkali membuat keputusan sendiri dalam membuat bangunan yang seringkali memangkas badan air, seperti pondasi atau berm	Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni berdasarkan komponen drainase lingkungannya.	1. Mengurangi luas genangan permukiman menjadi 0 Ha pada tahun 2027. 2. Mengurangi saluran drainase sekunder dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan	Melakukan perbaikan saluran drainase lingkungan yang rusak	Kondisi Saluran Drainase yang Baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Drainase	1. Perencanaan Saluran Drainase lingkungan 2. Penambahan Saluran Drainase lingkungan 3. Perbaikan kondisi saluran drainase lingkungan 4. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
			Mendorong masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh	Pengetahuan dan kemampuan masyarakat	Melakukan promosi dan publikasi terkait perilaku buang sampah sembarangan pada saluran drainase	Sosialisasi dan edukasi pengolahan sampah (3R) pada lingkungan permukiman kumuh dan informal agar tidak mencemari dan mengganggu kinerja drainase lingkungan. Menyertakan edukasi Pengolahan sampah 3R pada substansi pendidikan dasar agar sampah yang tidak terkelola tidak mencemari dan mengganggu kinerja drainase lingkungan

Sumber: Rencana, 2022.

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI



5.1 RINGKASAN PROGRAM KEGIATAN

Indikasi program dan kegiatan pembangunan sanitasi disusun sebagai bentuk jawaban dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi, misi pembangunan sanitasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan. Sumber penerimaan daerah secara garis besar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, indikasi biaya dan sumber pendanaan serta funding-gap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2023-2027) dapat diuraikan sebagai berikut.

Sektor sanitasi yang terdiri dari sistem air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu penentu kualitas Kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas suatu sistem sanitasi dapat menyebabkan turunnya tingkat kesehatan masyarakat, sementara kualitas SDM yang baik adalah suatu aset berharga suatu daerah. Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi 5 tahun kedepan.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun (x Rp. 1 juta)

No.	Uraian	Tahun					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	Rp24.961	Rp35.756	Rp21.558	Rp18.807	Rp20.621	Rp121.703
2	Persampahan	Rp7.922	Rp5.323	Rp53.050	Rp50.602	Rp2.759	Rp119.656
3	Drainase	Rp1.200	Rp1.546	Rp1.246	Rp856	Rp535	Rp5.383
Jumlah		Rp34.084	Rp42.625	Rp75.854	Rp70.265	Rp23.915	Rp246.743

Sumber: Analisa, 2022

Pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa total anggaran yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan sanitasi di Kabupaten Mojokerto adalah Rp 246.743 juta rupiah. Perhitungan anggaran ini didapatkan dari hasil analisis menggunakan instrumen SSK Kabupaten Mojokerto sehingga mendapatkan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sanitasi.

Tabel 5. 2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 Tahun (x Rp. 1 juta)

No.	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Kebutuhan Pendanaan	Rp34.084	Rp42.625	Rp75.854	Rp70.265	Rp23.915	Rp246.743
2	Kemampuan Pendanaan	Rp32.692	Rp39.901	Rp132.198	Rp21.094	Rp21.872	Rp247.755
3	Selisih (Rp.)	Rp1.392	Rp2.724	-Rp56.343	Rp49.171	Rp2.044	-Rp1.012
4	Selisih (%)	4%	6%	-74%	70%	9%	-0,4%

Sumber: Analisa, 2022

Berdasarkan Tabel 5.2 terlihat adanya Funding Gap APBD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 49.599 juta rupiah, sehingga untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan penggalan dana diluar APBD Kabupaten Mojokerto baik melalui dana Pemerintah (APBD Prov, APBN) maupun dana non-pemerintah (swasta/CSR dan masyarakat). Untuk memperoleh dana pemerintah perlu dilakukan sinkronisasi program/kegiatan dan penganggaran dengan SKPD di Provinsi dan pusat. Sedangkan untuk memperoleh dana non-pemerintah perlu dilakukan forum CSR / kerjasama dengan swasta maupun masyarakat.

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran (x Rp. 1 juta)

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten/Kota	Rp22.986	Rp28.287	Rp61.744	Rp53.741	Rp13.178	Rp179.937
2	APBD Provinsi	Rp408	Rp100	Rp0	Rp0	Rp439	Rp946
3	APBN	Rp8.367	Rp11.280	Rp11.557	Rp14.588	Rp8.317	Rp54.110
4	DAK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah A		Rp31.761	Rp39.668	Rp73.302	Rp68.329	Rp21.934	Rp234.993
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	Rp2.301	Rp2.939	Rp2.525	Rp1.918	Rp1.926	Rp11.609
2	Masyarakat	Rp22	Rp18	Rp28	Rp18	Rp56	Rp141
Jumlah B		Rp2.323	Rp2.957	Rp2.553	Rp1.935	Rp1.981	Rp11.749
Total (A+B)		Rp34.084	Rp42.625	Rp75.854	Rp70.265	Rp23.915	Rp246.743
Daftar Tunggu (Kebutuhan - A - B)		Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber: Analisa, 2022

Pada Tabel 5.3 didapatkan total kebutuhan yang didapat dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang (2023-2027) sebesar Rp 246.743 juta rupiah.

5.2 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2023 - 2027, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten/Kota, APBD

Provinsi, APBN). Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2023 - 2027, berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota (x Rp. 1 juta)

No.	Uraian	Tahun					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah	Rp14.336	Rp22.235	Rp11.177	Rp8.633	Rp10.380	Rp66.760
2	Persampahan	Rp7.450	Rp4.568	Rp49.383	Rp44.315	Rp2.323	Rp108.039
3	Drainase	Rp1.200	Rp1.484	Rp1.184	Rp794	Rp476	Rp5.139
Jumlah		Rp22.986	Rp28.287	Rp61.744	Rp53.741	Rp13.178	Rp179.937

Sumber: RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan Hasil Olah, 2022

Berdasarkan Tabel 5.4 pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto untuk kebutuhan sanitasi 5 tahun mendatang yaitu sebesar Rp 179.937 juta rupiah. Dengan rincian kebutuhan sanitasi air limbah sebesar Rp 66.760 juta rupiah, persampahan Rp 108.039 juta rupiah dan Drainase Lingkungan sebesar Rp 5.139 juta rupiah.

Tabel 5. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi (x Rp. 1 juta)

No.	Uraian	Tahun					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah	Rp88	Rp100	Rp0	Rp0	Rp50	Rp238
2	Persampahan	Rp320	Rp0	Rp0	Rp0	Rp389	Rp709
3	Drainase	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah		Rp408	Rp100	Rp0	Rp0	Rp439	Rp946

Sumber: Analisa, 2022

Tabel 5. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN (x Rp. 1 juta)

No.	Uraian	Tahun					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah	Rp8.362	Rp10.615	Rp8.312	Rp8.312	Rp8.312	Rp43.914
2	Persampahan	Rp5	Rp665	Rp3.245	Rp6.276	Rp5	Rp10.196
3	Drainase	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah		Rp8.367	Rp11.280	Rp11.557	Rp14.588	Rp8.317	Rp54.110

Sumber: Analisa, 2022

Tabel 5. 7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK (x Rp. 1 juta)

No.	Uraian	Tahun					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2	Persampahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
3	Drainase	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah		Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber: Analisa, 2022

Pada Tabel 5.5, Tabel 5.6 dan Tabel 5.7 yaitu rekapitulasi sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur, APBN dan DAK. Pendanaan dari APBD Provinsi, APBN dan DAK diperkirakan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada sektor air limbah yang

belum dapat dipenuhi oleh APBD Kabupaten, seperti untuk pembangunan IPLT dan sarana penunjangnya, operasional IPLT dan sebagainya.

5.3 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2023 - 2027, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat) Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2023 - 2027, berdasarkan sumber dari Swasta dan BUMN/D dapat dilihat pada Tabel 5.8 di bawah ini

Tabel 5. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR (x Rp. 1 juta)

No.	Uraian	Tahun					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	Rp2.167	Rp2.801	Rp2.065	Rp1.857	Rp1.865	Rp10.755
2	Persampahan	Rp134	Rp85	Rp407	Rp7	Rp7	Rp640
3	Drainase	Rp0	Rp53	Rp53	Rp53	Rp53	Rp214
Jumlah		Rp2.301	Rp2.939	Rp2.525	Rp1.918	Rp1.926	Rp11.609

Sumber: Analisa, 2022

Berdasarkan Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa anggaran yang diajukan melalui swasta/CSR selama 5 tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 11.609 juta rupiah yang akan digunakan sebagai pendanaan untuk sektor air limbah.

Tabel 5. 9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat (x Rp. 1 juta)

No.	Uraian	Tahun					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah	Rp9	Rp5	Rp4	Rp5	Rp15	Rp38
2	Persampahan	Rp13	Rp4	Rp15	Rp4	Rp36	Rp72
3	Drainase	Rp0	Rp8	Rp8	Rp9	Rp5	Rp31
Jumlah		Rp22	Rp18	Rp28	Rp18	Rp56	Rp141

Sumber: Analisa, 2022

Pada Tabel 5.9 yaitu sumber pendanaan yang berasal dari partisipasi masyarakat selama 5 tahun mendatang yaitu Rp 141 juta rupiah yang akan digunakan sebagai pendanaan untuk sector air limbah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK



6.1 GAMBARAN UMUM STRUKTUR MONITORING DAN EVALUASI SANITASI

Salah satu komponen penting dalam dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi adalah monitoring dan evaluasi sanitasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan dan kesesuaian antara program sanitasi yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan oleh Pokja Sanitasi Kota. Dengan begitu sasaran dan target yang dibuat dapat tercapai dan sesuai dengan isi pada dokumen pemutakhiran SSK. Sasaran pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program sanitasi meliputi:

1. Melakukan pengendalian yang sesuai sehingga pelaksanaan program/kegiatan perencanaan sanitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien
2. Memberikan masukan informasi kerangka hasil ke dalam system monitoring dan evaluasi ke dalam web NAWASIS

Selain itu, pada komponen monitoring dan evaluasi ini akan menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud umumnya mengenai 3 hal diantaranya perbaikan metode, percepatan proses, dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pertama berupa perbaikan atau pembenahan metode dikeluarkan ketika dalam proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan perencanaan. Output evaluasi memberikan konklusi tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan masing-masing program. Di samping itu, hasil monitoring dan evaluasi menjadi bentuk usaha dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi terkait sanitasi dalam rangka mencapai visi pembangunan sanitasi serta kelembagaan yang ada.

6.1.1 Air Limbah Domestik

Monitoring dan evaluasi SSK pada sector air limbah domestik dilakukan sekali dalam setahun. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan pada akhir tahun. Bentuk monitoring dan evaluasi akan ditampilkan berupa tabel capaian dalam pengisian pencapaian strategis. Berikut tabel capaian strategis air limbah domestik Kabupaten Mojokerto.

Tabel 6. 1 Capaian Strategis Sektor Air Limbah 1

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur pengolahan air limbah yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya

Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan limbah dan pelayanan sanitasi skala kabupaten.

Program: Mengoptimalkan kembali penggunaan infrastruktur IPLT yang telah tersedia.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Melakukan Studi Kelayakan dan DED Revitalisasi IPLT	500,0	1 Dok	1174547			
2	Penyiapan Lahan	200,0	1 Keg	1174547			
3	Supervisi Revitalisasi IPLT	12518,3	1 Keg	1174547			
4	Operasi dan Pemeliharaan IPLT	500,0	1 Keg	1174547			
5	Penambahan dan supervisi Sambungan Rumah (SR)	1251,8	1 Keg	1174547			
6	Pelatihan bagi Pengelola IPLT	100,0	1 Keg	1174547			
7	Pengadaan sarana pengangkutan dan penyediaan tinja (truck tinja)	500,0	1 unit	1174547			

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur pengolahan air limbah yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya

Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan limbah dan pelayanan sanitasi skala kabupaten.

Program: Melakukan kajian terkait perencanaan jaringan perpipaan air limbah skala kabupaten.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Penyusunan Rencana Induk/ Masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)	350,0	1 Paket	1174547			
2	Review Rencana Induk/ Masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)	200,0	1 Paket	1174547			
3	Penyusunan DED Jaringan Perpipaan Air Limbah Domestik	350,0	1 Paket	1174547			

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
4	Pendataan Kebutuhan SPALD-T (MCK, IPAL, Septic tank, sambungan rumah)	600,0	1 Paket				
5	Studi Kajian Strategi Sanitasi Sekolah	300,0	1 Paket	1174547			

Tabel 6. 2 Capaian Strategis Sektor Air Limbah 2

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur pengolahan air limbah yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya

Strategi: Meningkatkan pengolahan air limbah skala lingkungan.

Program: Meningkatkan pengolahan air limbah dengan SPALD-S.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	500,0	5 Keg	1174547			
2	Pengadaan sarana pengangkutan dan penyediaan tinja (truck tinja)	7270,2	14 Unit	1174547			
3	Penyedotan tinja terjadwal	727,0	1 Keg	1174547			

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur pengolahan air limbah yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya

Strategi: Meningkatkan pengolahan air limbah skala lingkungan.

Program: Meningkatkan pengolahan air limbah dengan SPALD-T.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Pembebasan dan Penyiapan Lahan/Tanah untuk MCK Komunal	96,0	4 Kegiatan	960			
2	Penyusunan DED Teknis MCK/ Toilet Komunal	75,0	4 Paket	960			
3	Pembangunan MCK/ Toilet komunal.	369,9	4 Unit	960			
4	Operasional dan pemeliharaan MCK/ Toilet komunal.	320,0	4 Paket	960			
5	Operasional dan pemeliharaan IPAL	1300,0	9 Unit	1174547			

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
	komunal dan jaringan perpipaan						
6	Penyedotan tinja terjadwal pada IPAL Komunal	520,0	9 Unit	1174547			

Tabel 6. 3 Capaian Strategis Sektor Air Limbah 3

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur pengolahan air limbah yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya

Strategi: Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola air limbah domestik.

Program: Mendorong pemerataan informasi dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah domestik.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan) pada PKK dan perangkat desa terkait kualitas lingkungan dan permukiman yang sehat	100	5 Keg	1174547			
2	Pembentukan KSM Pengelola Septic Tank, MCK/Toilet Komunal, IPAL Komunal	50,0	4 Keg	960			
3	Pelatihan KSM terkait Manajerial, Administrasi & Keuangan pada Septic Tank, MCK/ Toilet Komunal, IPAL Komunal	50,0	1 Keg	1174547			

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur pengolahan air limbah yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya

Strategi: Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola air limbah domestik.

Program: Mendorong masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Sosialisasi dan edukasi PHBS pada lingkungan	100	5 Keg				

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
	permukiman kumuh dan informal						
2	Menyertakan edukasi PHBS pada substansi pendidikan dasar	50,0	1 Keg				

Tabel 6. 4 Capaian Strategis Sektor Air Limbah 4

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor air limbah domestik yang profesional dan berintegritas

Strategi: Penyamaan persepsi dan kesepakatan antar OPD dalam Pokja dalam pengelolaan infrastruktur sanitasi dan menggali peluang pendanaan sanitasi.

Program: Menyepakati dan menjalankan porsi pengelolaan sanitasi sesuai tupoksi yang berlaku.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Koordinasi terkait tupoksi pengelolaan sanitasi	50,0	1 Keg	1174547			
2	Koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber (APBD, APBN DAK Sanitasi, dan swasta)	50,0	1 Keg	1174547			

Tabel 6. 5 Capaian Strategis Sektor Air Limbah 5

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor air limbah domestik yang profesional dan berintegritas

Strategi: Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan OPD dalam mengatur pengelolaan air limbah domestik yang aman pada tiap tahapan sepanjang rantai layanan sanitasi.

Program: Membentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik & UPTD IPLT, dan Menyusun regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik terkait NSPK/SPM terbaru.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Menyusun Perda dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik/ IPLT	100,0	1 Keg	1174547			

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
2	Menyusun Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100,0	1 Dok	1174547			

Tabel 6. 6 Capaian Strategis Sektor Air Limbah 6

Tujuan: Pendanaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mojokerto yang tercukupi dan memadai.

Strategi: Menggali potensi pendanaan dari pihak swasta seperti perusahaan, NGO dan federasi terkait sanitasi..

Program: Melakukan kerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan pihak swasta.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah di Kab./Kota	100,0	1 Keg	1174547			
2	Penentuan skema pembiayaan dan melakukan kesepakatan CSR pengelolaan air limbah domestik dengan pihak swasta.	30,0	1 Keg	1174547			
3	Koordinasi Pokja Sanitasi Pemerintah Kab./Kota, Masyarakat dan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah untuk pendanaan Sanitasi di Kab./Kota	50,0	2 Keg	1174547			

Tabel 6. 7 Capaian Strategis Sektor Air Limbah 7

Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni.

Strategi: Melakukan penataan permukiman kumuh dengan mengutamakan kebutuhan sanitasi.

Program: Melaksanakan rencana program rencana dalam RP2KPKP dan RP3KP.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Melakukan koordinasi antara sanitarian yang telah dilakukan pada	100,0	2 Keg	1174547			

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
	permukiman kumuh dan informal.						

6.1.2 Persampahan

Monitoring dan evaluasi SSK pada sektor persampahan dilakukan sekali dalam setahun. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan pada akhir tahun. Bentuk monitong dan evaluasi akan ditampilkan berupa tabel capaian dalam pengisian pencapaian strategis. Berikut tabel capaian strategis persampahan Kabupaten Mojokerto.

Tabel 6. 8 Capaian Strategis Sektor Persampahan 1

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur persampahan yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.

Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan persampahan skala kabupaten.

Program: Pembangunan TPA/ Controlled Landfill Baru.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Penyusunan studi kelayakan TPA	240,0	1 Paket	1174547			
2	Penyusunan Kajian/Studi Dampak Lingkungan Lingkungan	240,0	1 Paket	1174547			
3	Perencanaan Teknis (DED)	180,0	1 Paket	1174547			
4	Sosialisasi "Rencana" Rehabilitasi/Peingkatan TPA kepada masyarakat sekitarnya	75,0	1 Keg	1174547			
5	Pengadaan Tanah TPA	45000,0	1 Paket	1174547			
6	Pembangunan dan Supervisi TPA	104052,1	1 Paket	1174547			
7	Pengadaan Excavator	1800,0	1 Unit	1174547			
8	Pengadaan Loader	1800,0	1 Unit	1174547			
9	Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya	1000,0	1 Keg	1174547			
10	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA	100,0	1 Keg	1174547			
11	Pelatihan Pengelolaan TPA	100,0	1 Keg	1174547			
12	Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA	100,0	1 Keg	1174547			

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
13	Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi	100,0	1 Keg	1174547			

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur persampahan yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.

Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan persampahan skala kabupaten.

Program: Mengoptimalkan Sarana pengelolaan sampah TPST.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Rehabilitasi TPST	90,0	3 Paket	1174547			
2	Operasi dan Pemeliharaan TPST	300,0	15 Paket	1174547			
3	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	60,0	6 Unit	1174547			
4	Monitoring dan Evaluasi Target dan Standar Pelayanan TPST	60,0	6 Laporan	1174547			

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur persampahan yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.

Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan persampahan skala kabupaten.

Program: Pengelolaan TPS 3R Berbasis Masyarakat yang sudah terbangun.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Rehabilitasi TPS3R	240,0	8 Paket	1174547			
2	Operasi dan Pemeliharaan TPS3R	1400,0	70 Paket	1174547			
3	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	280,0	28 Unit	1174547			
4	Monitoring dan Evaluasi Target dan Standar Pelayanan TPS3R	280,0	28 Laporan	1174547			

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur persampahan yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.

Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan persampahan skala kabupaten.

Program: Optimalisasi TPA.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Pengadaan Fasilitas Operasional TPA Pengadaan Bulldozer	1800,0	1 Unit	1174547			
2	Pengadaan Fasilitas Operasional TPA Pengadaan Excavator	1800,0	1 Unit	1174547			
3	Pengadaan Fasilitas Operasional TPA Pengadaan Loader	1000,0	1 keg	1174547			
4	Pelatihan Pengelolaan TPA	100,0	1 Unit	1174547			
5	Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA	100,0	1 Keg	1174547			
6	Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional dan Fasilitasnya	100,0	1 Keg	1174547			
7	Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi	300,0	1 Laporan	1174547			

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem infrastruktur persampahan yang berfungsi baik pada setiap rantai pelayanannya.

Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan persampahan skala kabupaten.

Program: Melakukan kajian terkait perencanaan sistem persampahan skala kabupaten.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Pemutakhiran Database Persampahan, termasuk cakupan pelayanan, data TPST, TPS3R, Bank Sampah dan Data Pengepul	300,0	1 Paket	1174547			
2	Menyusun Masterplan Persampahan	200,0	1 Paket	1174547			
3	Menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP)	200,0	1 Paket	1174547			
4	Studi/ kajian tentang komposisi, kualitas dan kuantitas sampah Kabupaten	150,0	1 Paket	1174547			

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
5	Studi/ kajian pemanfaatan sampah sebagai sumber energi terbarukan	250,0	1 Paket	1174547			
6	Penyelenggaraan adipura	150,0	5 Laporan	1174547			

Tabel 6. 9 Capaian Strategis Sektor Persampahan 2

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor persampahan yang profesional dan berintegritas.

Strategi: Penyamaan persepsi dan kesepakatan antar OPD dalam Pokja dalam pengelolaan infrastruktur persampahan dan menggali peluang pendanaan persampahan.

Program: Menyusun rencana anggaran persampahan yang sistematis dan transparan.

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Koordinasi lintas OPD dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber (APBD, APBN DAK Sanitasi, dan swasta)	50,0	1 Keg	1174547			

Tabel 6. 10 Capaian Strategis Sektor Persampahan 3

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor persampahan yang profesional dan berintegritas.

Strategi: Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, komunitas/ lingkungan dalam mengatur pengelolaan persampahan yang aman pada tiap tahapan sepanjang rantai layanan.

Program:

1. Membentuk UPTD Pengelolaan Persampahan/ TPA
2. Menyusun regulasi terkait Pengelolaan Persampahan terkait NSPK/SPM terbaru

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Menyusun Perda UPTD Pengelolaan Persampahan/ TPA	100,0	1 Dok	1174547			

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
2	Menyusun Perda Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Sampah	100,0	1 Dok	1174547			

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem kelembagaan sektor persampahan yang profesional dan berintegritas.

Strategi: Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, komunitas/ lingkungan dalam mengatur pengelolaan persampahan yang aman pada tiap tahapan sepanjang rantai layanan.

Program: Memfasilitasi komunitas swadaya masyarakat dalam kegiatan persampahan

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Pengadaan dan Pengenalan Keranjang Sampah Takakura	360,0	1800 Unit	1174547			
2	Workshop Daur Ulang Sampah	100,0	1 Keg	1174547			
3	Lokakarya dan workshop pengolahan persampahan berbasis masyarakat	75,0	1 Keg	1174547			
4	Monitoring dan evaluasi kinerja KSM pada tingkat kecamatan maupun desa	60,0	2 Keg	1174547			

Tabel 6. 11 Capaian Strategis Sektor Persampahan 4

Tujuan: Pendanaan Persampahan Kabupaten Mojokerto yang tercukupi dan memadai.

Strategi: Menggali potensi pendanaan dari pihak swasta seperti perusahaan, NGO dan federasi terkait persampahan.

Program: Pendataan potensi sumber pendanaan dari pihak swasta yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga, perusahaan, NGO dan federasi yang melakukan CSR	50,0	1 Keg	1174547			

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
2	Secara aktif mengirim perwakilan daerah dan melibatkan diri dalam forum-forum dan lokakarya terkait persampahan untuk memperluas jaringan kerjasama	100,0	5 Keg	1174547			

Tabel 6. 12 Capaian Strategis Sektor Persampahan 5

Tujuan: Pendanaan Persampahan Kabupaten Mojokerto yang tercukupi dan memadai.

Strategi: Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan persampahan secara aktif.

Program: Pendataan potensi sumber pendanaan dari pihak swasta yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Menentukan teknis kerjasama dalam pengelolaan persampahan dengan pihak swasta	50,0	1 Keg	1174547			

Tabel 6. 13 Capaian Strategis Sektor Persampahan 6

Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni.

Strategi: Melakukan penataan permukiman kumuh dengan mengutamakan kebutuhan persampahan.

Program: Melaksanakan rencana program rencana dalam RP2KPKP dan RP3KP

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Melakukan koordinasi antara komunitas persampahan yang telah dilakukan pada permukiman kumuh dan informal.	50,0	1 Keg				

Tabel 6. 14 Capaian Strategis Sektor Persampahan 7

Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan layak huni.

Strategi: Mendorong masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh.

Program: Melakukan promosi dan publikasi terkait upaya pengurangan sampah (3R) secara menyeluruh

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Sosialisasi dan edukasi pengolahan sampah (3R) pada lingkungan permukiman kumuh dan informal	75,0	1 Keg	1174547			
2	Menyertakan edukasi Pengolahan sampah 3R pada substansi pendidikan dasar	40,0	1 Keg	1174547			
3	Program Festival terkait pemanfaatan sampah pada perayaan hari tertentu, seperti Hari Ulangtahun Kabupaten Mojokerto, Hari Bumi atau Hari Lingkungan Hidup.	350,0	5 Keg	1174547			

6.1.3 Drainase Lingkungan

Monitoring dan evaluasi SSK pada sektor drainase dilakukan sekali dalam setahun. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan pada akhir tahun. Bentuk monitoring dan evaluasi akan ditampilkan berupa tabel capaian dalam pengisian pencapaian strategis. Berikut tabel capaian strategis drainase Kabupaten Mojokerto.

Tabel 6. 15 Capaian Strategis Sektor Drainase 1

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki database sistem infrastruktur drainase lingkungan yang termutakhir.

Strategi: Menyusun database dan perencanaan drainase yang komprehensif dari hulu ke hilir.

Program:

1. Penyusunan dan Review Masterplan/ Rencana Induk Drainase dan Perencanaan Sejenis
2. Penyusunan teknis updating database drainase yang dapat diisi dengan data dari masyarakat
3. Penyusunan Database dan Kajian Drainase Lingkungan Berbasis Masyarakat

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Penyusunan Masterplan Drainase yang komprehensif dengan substansi yang mencakup kajian drainase lingkungan tiap kecamatan	700,0	1 Paket	1174547			
2	Penyusunan DED Jaringan Drainase	500,0	1 Paket	1174547			
3	Penyusunan Outline Plan Drainase	400,0	1 Paket	1174547			
4	sosialisasi kegiatan updating database dan edukasi tentang pentingnya kualitas drainase lingkungan	100,0	1 Keg	1174547			
5	Kajian peran masyarakat dalam mewujudkan drainase yang berwawasan lingkungan	200,0	1 Paket	1174547			

Tabel 6. 16 Capaian Strategis Sektor Drainase 2

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem drainase lingkungan yang terpelihara baik.

Strategi: Mengoptimalkan koordinasi dan fungsi Pokja PKP.

Program: Penyusunan teknis updating database drainase yang dapat diisi dengan data dari masyarakat

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Drainase berwawasan lingkungan	100,0	1 Keg	1174547			
2	Edukasi tentang pentingnya kualitas drainase lingkungan sebagai pencegahan masalah kesehatan dan stunting	100,0	1 Keg	1174547			

Tabel 6. 17 Capaian Strategis Sektor Drainase 3

Tujuan: Kabupaten Mojokerto memiliki sistem drainase lingkungan yang terpelihara baik.

Strategi: Melakukan perbaikan saluran drainase lingkungan yang rusak.

Program: Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Drainase

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Penambahan Saluran Drainase lingkungan	2139,8	1 Paket	1174547			
2	Perbaikan kondisi saluran drainase lingkungan	943,8	1 Paket	1174547			

Tabel 6. 18 Capaian Strategis Sektor Drainase 4

Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan layak huni berdasarkan komponen drainase lingkungannya.

Strategi: Mendorong masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh.

Program: Melakukan promosi dan publikasi terkait perilaku buang sampah sembarangan pada saluran drainase

No	Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (x Rp 1 juta)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Sosialisasi dan edukasi pengolahan sampah (3R) pada lingkungan permukiman kumuh dan informal agar sampah yang tidak terkelola tidak mencemari dan mengganggu kinerja drainase lingkungan	100,0	1 Paket	1174547			
2	Menyertakan edukasi Pengolahan sampah 3R pada substansi pendidikan dasar agar sampah yang tidak terkelola tidak mencemari dan mengganggu kinerja drainase lingkungan	100,0	1 Paket	1174547			

Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

